

Manajemen Konflik Sosial

Isu Polarisasi Politik dan Media Sosial

Dr. H. Indra Prasetyo, S.P., MM | Dr. Rusdiyanto, S.E., M.Ak., CH.,CHT
Nabilah Aliyyah, S.Par., MBA | Rahmat Luthfi Haidar, S.IP., M.AP

Editor:

Prof. Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA., CFA

Dr. Yenni Fayanni, SE, M.Ak., Ak., PIA

Dr. Suharto, MM

Umar Burhan, SE., M.M

Dini Ayu Pramitasari, S.Ant., S.E., M.Ak

Adiba Fuad Syamlan, S.E., M.M.

Anisaul Hasanah, S.Pd., M.Akun

Manajemen Konflik Sosial

Isu Polarisasi Politik dan Media Sosial

Dr. H. Indra Prasetyo, S.P., MM | Dr. Rusdiyanto, S.E., M.Ak., CH.,CHT
Nabilah Aliyah, S.Par., MBA | Rahmat Luthfi Haidar, S.IP., M.AP

Editor:

Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA., CFA

Dr. Yenni Fayanni, SE, M.Ak., Ak., PIA

Dr. Suharto, MM

Umar Burhan, SE., M.M

Dini Ayu Pramasari, S.Ant., S.E., M.Ak

Adiba Fuad Syamlan, S.E., M.M.

Anisaul Hasanah, S.Pd., M.Akun

 Penerbit
litrus.

**MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL:
Isu Polarisasi Politik dan Media Sosial**

**Penyusun : Dr. H. Indra Prasetyo, S.P., MM
Dr. Rusdiyanto, S.E., M.Ak., CH., CHt
Nabilah Aliyyah, S.Par., MBA
Rahmat Luthfi Haidar, S.IP., M.AP**

**Editor : Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA., CFA
Dr. Yenni Fayanni, SE, M.Ak., Ak., PIA
Dr. Suharto, MM
Umar Burhan, SE., M.M
Dini Ayu Pramitasari, S.Ant., S.E., M.Ak
Adiba Fuad Syamlan, S.E., M.M.
Anisaul Hasanah, S.Pd., M.Akun**

**ISBN : 978-623-127-662-9
E-ISBN : 978-623-127-663-6**

Copyright © Januari 2026
Ukuran: 15,5x23 cm; hlm: xii + 124

Desainer sampul : Bas
Penata isi : Bas

Cetakan I: Januari 2026

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis menyampaikan bahwa berkat rahmat dan karunia-Nya, buku referensi berjudul “Manajemen Konflik Sosial: Isu Polarisasi Politik dan Media Sosial” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan akan literatur yang komprehensif dan relevan di tengah dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, khususnya terkait dengan dampak media sosial dalam memperkuat ataupun memicu polarisasi politik di masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, telah merevolusi pola interaksi sosial masyarakat secara mendasar. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga menjadi arena pembentukan opini publik serta ruang kontestasi politik yang sangat dinamis. Di satu sisi, media sosial membuka peluang bagi demokratisasi informasi; di sisi lain, ia juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga memperuncing perbedaan pandangan yang berujung pada polarisasi sosial dan politik. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan konflik sosial di era digital.

Buku referensi ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika polarisasi politik, peran media sosial,

serta strategi manajemen konflik sosial yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Penulis berupaya menyajikan analisis berdasarkan kerangka ilmiah yang mutakhir, memadukan teori-teori klasik dengan temuan empiris terbaru. Pembahasan dalam buku ini meliputi konsep dasar konflik sosial, pola polarisasi politik, peran dan dampak media sosial, serta pendekatan strategis dalam pengelolaan konflik.

Penyusunan buku ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah terkini, dengan menekankan kejelasan argumentasi, sistematika pembahasan yang terstruktur, serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai perkembangan kebahasaan. Data dan referensi yang digunakan berasal dari sumber-sumber kredibel dan telah melalui proses seleksi serta verifikasi yang ketat, guna memastikan validitas dan relevansi informasi yang disajikan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu-isu sosial, politik, dan komunikasi. Melalui buku ini, diharapkan pembaca mampu memahami akar permasalahan polarisasi politik yang dipicu oleh media sosial, serta memperoleh wawasan mengenai strategi efektif dalam menangani dan meminimalisasi konflik sosial di lingkungan sekitar.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik manajemen konflik sosial di Indonesia.

Surabaya, January 2026

Dr. Indra Prasetyo, SP, MM

MOTTO

**“Hiduplah Dengan
Sederhana, *Berpikirlah
Dengan Jernih, Cintai
Dengan Tulus*”
Anonim**



RINGKASAN

Buku referensi berjudul “Manajemen Konflik Sosial: Isu Polarisasi Politik dan Media Sosial” membahas secara komprehensif dinamika konflik sosial yang semakin menonjol di era digital, khususnya akibat polarisasi politik yang diperkuat oleh penggunaan media sosial. Buku ini menyajikan analisis multidisipliner, mulai dari teori dasar konflik sosial, pemetaan pola polarisasi politik, hingga strategi pengelolaan konflik yang relevan dengan konteks Indonesia saat ini.

Pada bab-bab awal, buku ini mengulas teori-teori utama mengenai konflik sosial, mencakup definisi, karakteristik, penyebab, serta jenis-jenis konflik yang umum terjadi dalam masyarakat. Penulis menegaskan bahwa konflik sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, namun dapat dikelola agar tidak berkembang menjadi disintegrasi sosial. Dalam konteks Indonesia, konflik sosial sering kali berakar pada perbedaan identitas, kepentingan politik, dan ketidaksetaraan distribusi sumber daya.

Bagian selanjutnya memfokuskan pembahasan pada isu polarisasi politik yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Polarisasi politik didefinisikan sebagai keterbelahan masyarakat akibat perbedaan pandangan politik yang tajam, yang kerap diperkuat oleh narasi eksklusif dan retorika permusuhan di ruang publik. Buku ini menekankan bahwa

polarisasi politik tidak hanya terjadi di tingkat elit, melainkan juga merambah ke akar rumput, sehingga memicu segregasi sosial dan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Salah satu kontribusi utama buku ini adalah kajian kritis terhadap peran media sosial dalam memperkuat polarisasi politik. Media sosial dipaparkan sebagai ruang publik baru yang sangat dinamis, di mana informasi, opini, bahkan disinformasi, dapat tersebar dengan sangat cepat. Penulis menyoroti bagaimana algoritma media sosial cenderung menciptakan “echo chamber” atau ruang gema yang memperkuat keyakinan dan identitas kelompok tertentu, sekaligus mempersulit dialog lintas kelompok. Fenomena ini meningkatkan risiko polarisasi dan memperumit upaya manajemen konflik sosial.

Selanjutnya, buku ini menawarkan beragam strategi manajemen konflik sosial yang dapat diterapkan oleh pemerintah, masyarakat sipil, maupun aktor-aktor lainnya. Strategi tersebut meliputi pendekatan preventif, mitigatif, hingga resolutif, seperti penguatan literasi digital, promosi dialog antar kelompok, pembangunan jejaring sosial lintas komunitas, serta penerapan regulasi yang adil dan transparan di ranah media sosial. Penulis juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun ketahanan sosial menghadapi tantangan zaman.

Buku ini ditutup dengan refleksi mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan konflik sosial di masa depan, khususnya seiring dengan terus berkembangnya teknologi informasi. Penulis menegaskan bahwa manajemen konflik yang efektif membutuhkan sinergi antara kebijakan yang responsif, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi secara bijak.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian konflik sosial di Indonesia dengan menawarkan perspektif yang relevan, data empiris, serta rekomendasi strategis yang aplikatif. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun pengambil kebijakan yang ingin memahami dan mengelola isu polarisasi politik serta peran media sosial dalam dinamika konflik sosial masa kini.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar — iii

Motto — v

Ringkasan — vii

Daftar Isi — ix

BAB 1 PENDAHULUAN — 1

1.1 Latar Belakang — 1

1.2 Rumusan Masalah — 4

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan — 7

BAB 2 TEORI DAN KONSEP KONFLIK SOSIAL — 11

2.1 Definisi Konflik Sosial — 11

2.2 Karakteristik Konflik Sosial — 14

2.3 Faktor Penyebab Konflik Sosial — 17

2.4 Jenis-jenis Konflik Sosial — 20

2.5 Dampak Konflik Sosial dalam Masyarakat — 22

BAB 3 POLARISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT — 27

- 3.1 Pengertian Polarisasi Politik — 27
- 3.2 Sejarah dan Perkembangan Polarisasi Politik — 30
- 3.3 Gejala dan Indikator Polarisasi — 33
- 3.4 Studi Kasus Polarisasi Politik di Indonesia — 36
- 3.5 Implikasi Polarisasi terhadap Kehidupan Sosial — 39

BAB 4 PERAN MEDIA SOSIAL DALAM POLARISASI POLITIK — 43

- 4.1 Media Sosial sebagai Ruang Publik Baru — 43
- 4.2 Algoritma, Echo Chamber, dan Filter Bubble — 46
- 4.3 Penyebaran Informasi, Disinformasi, dan Hoaks — 49
- 4.4 Studi Kasus: Dinamika Polarisasi di Media Sosial Indonesia — 54

BAB 5 MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL DI ERA DIGITAL — 59

- 5.1 Teori dan Pendekatan Manajemen Konflik — 59
- 5.2 Strategi Preventif dalam Mengelola Konflik — 62
- 5.3 Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Institusi — 65
- 5.4 Literasi Digital dan Edukasi Publik — 67
- 5.5 Kolaborasi Lintas Sektor dalam Resolusi Konflik — 70

BAB 6 TANTANGAN DAN PELUANG DI MASA DEPAN — 73

- 6.1 Tantangan Manajemen Konflik di Era Teknologi — 73
- 6.2 Peluang Inovasi dalam Penanganan Konflik — 76
- 6.3 Rekomendasi Kebijakan dan Praktik Baik — 78
- 6.4 Refleksi dan Prospek Pengelolaan Konflik Sosial — 80

BAB 7 PENUTUP — 85

7.1 Kesimpulan — 85

7.2 Saran untuk Penelitian dan Praktik Selanjutnya — 86

Biodata Penulis — 89

Hasil Plagiarm Turnitin — 93

Sertifikat Ikapi — 95

Sertifikat Penulis Dan Editor — 96

Daftar Pustaka — 97



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik sosial di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang signifikan, yang kerap diperparah oleh interaksi antara identitas majemuk dan dinamika media digital (Hidayah et al., 2023). Fenomena peningkatan polarisasi sosial pada era media sosial menjadi perhatian utama, di mana platform ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena reproduksi konflik sosial (Sajian & Alif, 2025). Hal ini menjadi semakin krusial karena media sosial mampu menciptakan 'ruang gema' (echo chamber) yang membatasi pertukaran ide dan refleksi kritis, sehingga memperkuat pandangan kelompok tertentu dan menghambat pemahaman lintas perspektif (Hasfi, 2019). Globalisasi dan perkembangan digitalisasi juga turut memicu beragam konflik di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan inovatif dan adaptif dalam penyelesaiannya pada era digital (Hidayah et al., 2023). Dalam konteks ini, kapasitas resolusi konflik di era digital menuntut penguatan keterampilan komunikasi yang efektif serta pemahaman mendalam terkait dinamika konflik digital, baik pada tataran individu maupun institusi (Hidayah et al., 2023).

Buku Referensi ini menelaah bagaimana media digital berpotensi menyebarkan stereotip dan polarisasi, meskipun di sisi lain juga menghadirkan peluang untuk memfasilitasi kerukunan sosial melalui interaksi yang inklusif (Farisal et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi proaktif untuk mengelola konflik sosial yang timbul akibat perbedaan pandangan di era digital, termasuk penguatan integrasi nasional dan pencarian resolusi konflik yang efektif (Hidayah et al., 2023; Sugitanata & Ridwan, 2024). Upaya ini bertujuan untuk merespon konflik sebelum tereskalasi dan mencegah munculnya gejala konflik yang sulit dikendalikan, dengan mempertimbangkan bahwa teknologi digital dapat menjadi alat bantu dalam memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antarpihak (Hidayah et al., 2023; Takdir, 2017). Dalam menganalisis peta konflik, penting untuk memanfaatkan kerangka teori konflik sosial guna menelusuri akar perbedaan, yang kemudian dapat dilengkapi dengan teori manajemen konflik untuk memberikan solusi praktis di tingkat personal (Sugitanata & Ridwan, 2024).

Peran media sosial dalam konteks ini sangat ambigu, karena berpotensi menjadi media edukasi keagamaan sekaligus pemicu konflik agama, bahkan memfasilitasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang memicu polarisasi (Hidayah et al., 2023). Oleh sebab itu, literasi digital kritis sangat diperlukan untuk memahami dan mengenali konten radikal yang berpotensi memecah belah, serta diperlukan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan strategi moderasi yang holistik dan efektif (Gani et al., 2024). Selain itu, literasi digital, dialog antaragama, dan respons terhadap ancaman radikalisme di media sosial menjadi elemen kunci dalam perumusan strategi moderasi beragama yang efektif (Gani et al., 2024). Upaya tersebut meliputi pendidikan agama yang inklusif dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan, guna membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan toleran di tengah masyarakat digital yang semakin terkoneksi (Gani et al., 2024).

Gerakan moderasi beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu inisiatif krusial dalam menjaga

kerukunan umat beragama, meskipun implementasinya dihadapkan pada tantangan seperti resistensi kelompok tertentu dan kesenjangan di tingkat lokal (Mursalat & M, 2024). Namun demikian, inisiatif ini sering mengalami kendala dalam menyebarluaskan narasi kontra-radikalisasi dan mempromosikan nilai-nilai toleransi secara masif, terutama di tengah arus informasi yang bias dan fragmentasi audiens di media sosial (Nugroho, 2023). Secara praktis, promosi moderasi beragama melalui ruang digital menghadapi ambiguitas, sebab media digital berpotensi menyemai perdamaian namun juga dapat dimuati ekspresi keagamaan ekstrem yang justru mengaburkan pesan-pesan damai (Mahyudin et al., 2022). Masalah ini diperparah oleh realitas bahwa media sosial sering terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal dan kelompok berkepentingan, sehingga berpotensi menjerumuskan publik pada pilihan irasional dan mengaburkan makna ruang publik (Deni et al., 2016).

Dengan demikian, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan penguatan literasi digital, verifikasi informasi, dan kolaborasi multipihak untuk menghadapi tantangan polarisasi agama di media sosial (Gani et al., 2024; Rahmawati et al., 2023). Optimalisasi strategi ini memerlukan penyediaan konten narasi keagamaan moderat pada situs daring, serta pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan paham wasathiyah secara masif guna menangkal ideologi ekstremisme dan radikalisme digital (Mahyudin et al., 2022). Pemerintah memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan jangka panjang moderasi beragama, sementara lembaga pendidikan menjadi benteng utama dalam menanamkan nilai-nilai moderasi melalui kurikulum adaptif (Amrullah & Islamy, 2021, 2025). Peningkatan kompetensi multikultural guru dan sensitivitas terhadap isu gender juga menjadi elemen krusial dalam pendidikan agama Islam guna membentuk pemahaman yang inklusif dan toleran di tengah masyarakat multikultural (Yasin & Rahmadian, 2024).

Pemanfaatan media sosial untuk diseminasi pesan moderasi beragama memerlukan strategi yang tepat agar narasi damai dapat tersebar luas dan efektif menjangkau Generasi Z sebagai populasi digital utama

(Rahmawati et al., 2023). Hal ini menuntut pengembangan konten yang relevan, interaktif, dan mudah diakses oleh generasi muda yang akrab dengan teknologi digital, serta pemanfaatan algoritma platform media sosial guna memaksimalkan jangkauan pesan moderasi (Mahyudin et al., 2022). Peran aktif masyarakat dalam memverifikasi informasi dan melawan disinformasi juga sangat penting, mengingat dalam beberapa tahun terakhir 85% proses radikalisasi di Indonesia terjadi melalui media digital (2025). Oleh karena itu, penguatan literasi digital kritis dan kemampuan memverifikasi informasi menjadi sangat krusial dalam menahan laju penyebaran ideologi radikal di ranah daring (Rahmawati et al., 2023, 2025). Peningkatan literasi digital menjadi kunci utama untuk membekali masyarakat dengan kemampuan menyaring informasi dan mengidentifikasi narasi yang berpotensi intoleran atau ekstrem, sehingga masyarakat tidak mudah menjadi korban pesan-pesan provokatif yang tersebar di platform digital (Ikhwan et al., 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Oleh karena itu, diperlukan perumusan masalah yang mempertimbangkan bagaimana strategi moderasi beragama dapat dioptimalkan di tengah lanskap media digital yang kompleks guna meningkatkan resiliensi sosial dan menurunkan tingkat polarisasi (Hidayah et al., 2023; Mahyudin et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana implementasi dakwah digital dan analisis sentimen dapat dimanfaatkan dalam memperkuat pemahaman moderasi beragama di kalangan pemuda, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang timbul dalam konteks tersebut (Luthfia et al., 2025; Rumata et al., 2021). Secara spesifik, penelitian ini akan menganalisis efektivitas model XLM-RoBERTa dalam mengklasifikasikan sentimen warganet terhadap isu-isu keagamaan di media sosial, serta mengevaluasi peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital (Luthfia et al., 2025; Taufiq & Alkholid, 2021). Fokus lain dari penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi komunikasi yang paling efektif dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama melalui platform digital,

khususnya dalam menghadapi konten radikal dan ujaran kebencian (Mahyudin et al., 2022; Messakh et al., 2023). Selanjutnya, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pendidikan dan pengabdian masyarakat dapat berperan dalam merumuskan solusi konkret terhadap masalah radikalisasi, ekstremisme, dan intoleransi yang kerap diperparah oleh disrupsi agama di era digital (Mahyudin et al., 2022; Ridho & Sabil, 2023).

Dengan demikian, studi ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris untuk memperkuat ketahanan sosial digital (Luthfia et al., 2025). Selain itu, penelitian ini akan menginvestigasi peran perguruan tinggi keagamaan Islam dalam mengarusutamakan moderasi beragama di ruang digital, termasuk melalui reformulasi kurikulum yang menekankan tasawuf dan sejarah peradaban Islam (Taufiq & Alkholid, 2021). Buku referensi ini juga akan membahas bagaimana penyebaran narasi moderasi beragama di ruang digital dapat secara efektif menangkal bias informasi dan kontraproduktivitas dalam memahami narasi keagamaan yang ekstrem (Hefni, 2020). Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kampanye moderasi beragama di media sosial serta pemahaman dampaknya terhadap perubahan perilaku dan persepsi masyarakat terhadap isu-isu keagamaan yang sensitif juga akan dianalisis (Yuliawati & Asri, 2024).

Oleh karena itu, buku referensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka kerja strategis untuk pengarusutamaan moderasi beragama di era digital, khususnya di Indonesia (Hefni, 2020). Studi ini selanjutnya akan mengevaluasi metodologi analisis sentimen berbasis deep learning, seperti XLM-RoBERTa, dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan respons publik terhadap konten keagamaan di media sosial (Luthfia et al., 2025). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah sebagai acuan dalam pemetaan ideologis masjid-masjid di Indonesia, yang dapat dijadikan dasar kebijakan pencegahan ajaran radikal dan ideologi transnasional yang menyebar melalui media sosial (Fahmi et al.,

2023). Selanjutnya, kajian ini juga akan membahas bagaimana institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam dapat mengoptimalkan perannya sebagai garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi melalui konten digital yang berkualitas dan relevan (Hefni, 2020).

Perguruan tinggi keagamaan Islam juga dapat secara spesifik mengintegrasikan nilai-nilai kewargaan dalam kebijakan pendidikan mereka, serta menjadi pusat penanaman nilai-nilai kemanusiaan, kerukunan beragama, dan moderasi beragama di tengah tantangan pemahaman sektarian dan Islam transnasional (Hefni, 2020). Aspek ini sangat krusial mengingat media sosial telah menjadi platform utama penyebaran ideologi, termasuk yang mengarah pada radikalisme dan intoleransi, sehingga perlu diimbangi dengan narasi moderasi yang kuat dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila (Fahrudin, 2014; Hanif et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menganalisis strategi yang diterapkan oleh platform media sosial serta peran literasi etika digital dalam mendeteksi dan menangani konten berisiko secara efektif, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif akan batasan kebebasan berekspresi dalam kerangka norma sosial dan moral (Luthfia et al., 2025). Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan yang efektif untuk merespons ancaman radikalisasi yang muncul melalui ruang digital (Gani et al., 2024). Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana teknologi kecerdasan buatan, khususnya melalui analisis pola perilaku dan minat audiens, dapat digunakan untuk merancang konten dakwah yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mempromosikan moderasi beragama (Hidayatullah et al., 2024). Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi metode paling efektif untuk menyebarkan narasi moderasi beragama melalui platform digital, termasuk pemanfaatan meme dan konten visual lain yang relevan dengan generasi muda (Amrullah & Islamy, 2021; Zulfikar et al., 2023). Penelitian ini juga akan mengevaluasi peran Pendidikan Agama Islam dalam membentengi siswa dari radikalisme digital dengan mengintegrasikan pemahaman inklusif dan literasi digital ke dalam materi pembelajaran (2025).

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Buku referensi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi moderasi beragama di platform digital serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya, demi menciptakan lingkungan digital yang lebih inklusif dan toleran (Hefni, 2020; Taufiq & Alkholid, 2021). Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengarusutamakan moderasi beragama, meskipun di media sosial kerap muncul narasi penolakan terhadap konsep tersebut (Albana, 2022). Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika interaksi keagamaan di media sosial, serta merumuskan strategi pencegahan masalah sosial terkait isu SARA dan diskriminasi di ranah digital (Sastrawardana, 2024). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan program literasi digital yang lebih efektif dalam menangkal penyebaran ideologi ekstremis dan intoleransi di dunia maya (Arif et al., 2024; Hanif et al., 2025; Sastrawardana, 2024). Studi ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merancang intervensi yang tepat guna meningkatkan moderasi beragama di era digital (Mardiyah et al., 2024; Rumata et al., 2021). Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat mempromosikan kerukunan antarumat beragama di Indonesia, membantu masyarakat bersikap bijak dalam menghadapi teknologi digital, serta mendorong pemikiran kritis dalam menyikapi penyebaran informasi di media sosial (Rahmawati et al., 2023).

Buku referensi ini juga berupaya menganalisis peran media sosial sebagai saluran utama penyebaran ideologi radikal dan mengidentifikasi strategi moderasi yang dapat diterapkan, mengingat tantangan aktual yang dihadapi masyarakat global pada era digital (Gani et al., 2024). Penguatan literasi digital dan etika digital, bersamaan dengan pengembangan mekanisme moderasi pada platform media sosial, menjadi sangat krusial untuk mendeteksi serta menangani konten berisiko secara lebih cepat (Luthfia et al., 2025). Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji

bagaimana model XLM-RoBERTa dapat secara efektif mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sentimen publik terhadap isu-isu keagamaan yang sensitif, sehingga dapat mendukung upaya moderasi konten dan mencegah penyebaran narasi radikal secara lebih efisien (Luthfia et al., 2025). Keberhasilan penerapan model XLM-RoBERTa dalam mengklasifikasikan opini warganet ke dalam kategori sentimen positif, netral, dan negatif dengan akurasi tinggi membuktikan potensi teknologi ini dalam memahami respons publik terhadap isu-isu sensitif (Luthfia et al., 2025). Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan empiris mengenai respons moral masyarakat digital terhadap pelanggaran etika, yang dapat dijadikan dasar bagi pengambil kebijakan dan pengembang platform untuk memperkuat tata kelola konten dan program literasi (Luthfia et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meminimalkan permasalahan etika bermedia sosial serta memperkaya khazanah pengetahuan Islam dan negara terkait etika bermedia sosial di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 (Haliza et al., 2022).

Secara spesifik, buku referensi ini dapat menjadi fondasi untuk mengukur sentimen masyarakat terhadap pluralisme isu keagamaan, tidak hanya terkait produk non-halal, tetapi juga dalam memahami isu-isu agama yang lebih sensitif di ruang media sosial seperti Twitter (Kushardiyanti et al., 2022). Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif melalui analisis pustaka dengan merujuk pada sumber primer dan sekunder untuk menyusun kerangka teoritis yang komprehensif (Novita, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan identifikasi pola, konsep, dan kesenjangan pengetahuan dari studi-studi terdahulu, sehingga memberikan dasar teori yang kuat dan mengarahkan perumusan masalah (Tumanggor & Sazali, 2025). Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam fenomena spesifik terkait penyebaran narasi keagamaan di media sosial, guna memberikan konteks empiris yang kaya (Basid & Rahmah, 2023; Luthfia et al., 2025). Pengumpulan data primer dilakukan melalui analisis Al-Qur'an dan hukum negara, sedangkan data sekunder diperoleh dari

jurnal dan literatur terkait (Haliza et al., 2022). Metodologi deskriptif-kualitatif yang didasarkan pada kajian konseptual data kepustakaan ini memungkinkan analisis holistik melalui proses reduksi dan penyajian data untuk membentuk pemahaman baru mengenai fenomena yang diteliti (Hanif & Rahman, 2023).

Melalui pendekatan tersebut, prosedur moralitas diskursus dalam struktur otoritas wacana keagamaan di media sosial dapat ditegakkan guna mencegah penggantian keyakinan terhadap Tuhan sebagai otoritas tertinggi dengan klaim-klaim sepihak (Hanif & Rahman, 2023). Penelitian ini juga secara khusus akan mengkaji fatwa daring dan otoritas Islam dalam konteks media baru, dengan menganalisis bagaimana fatwa-fatwa yang dikeluarkan melalui platform digital memengaruhi aturan agama dan interaksi sosial (Asmar et al., 2023). Aspek lain yang akan ditelusuri adalah dampak literatur keagamaan digital terhadap pergeseran paradigma otoritas keagamaan di kalangan Muslim Indonesia, khususnya di era pasca-kebenaran dan masyarakat 5.0, di mana individu cenderung mencari solusi keagamaan di luar otoritas tradisional (Ichwan et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah mendorong pergeseran literatur keagamaan di kalangan Muslim Indonesia, dari ulama ke media sosial (Ichwan et al., 2024). Pergeseran tersebut menuntut analisis mendalam mengenai bagaimana otoritas keagamaan direkonstruksi dan diinterpretasikan dalam ekosistem digital, beserta implikasinya terhadap kohesi sosial dan pemahaman moderasi beragama di kalangan generasi muda (Rumata et al., 2021).

Buku Referensi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk memahami realitas keberagaman di ruang digital, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi aktivitas keagamaan di media daring (Pabbajah et al., 2022). Pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis kajian literatur ini memungkinkan reduksi data dan pembangunan konsep baru yang utuh dan segar, dengan analisis data menggunakan analisis isi yang menekankan intertekstualitas dan kreativitas mendalam (Rumata et al., 2021).



BAB 2

TEORI DAN KONSEP KONFLIK SOSIAL

2.1 Definisi Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan telah menjadi objek kajian penting dalam sosiologi maupun ilmu sosial lainnya. Secara umum, konflik sosial didefinisikan sebagai pertentangan atau perbedaan kepentingan yang melibatkan dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok, yang dapat berujung pada ketegangan, perdebatan, bahkan kekerasan (Takdir, 2017). Dalam perspektif sosiologis, konflik berakar pada disonansi nilai, ketidakmerataan distribusi sumber daya, serta perebutan kekuasaan yang dapat mengikis kohesi sosial (Mahyudin et al., 2022). Lewis A. Coser, salah satu tokoh teori konflik, mendefinisikan konflik sebagai perjuangan atas nilai dan pengakuan atas status, kekuasaan, serta sumber daya yang langka, di mana pihak-pihak yang bersaing berupaya untuk menetralkan, merugikan, atau bahkan menenyapkan lawan mereka (Hakim & Abdurahman, 2023). Sementara itu, Ralf Dahrendorf menyoroti konflik sebagai manifestasi dari struktur sosial yang hierarkis, di mana

kelompok-kelompok dengan otoritas berbeda saling berhadapan untuk mempertahankan atau mengubah tatanan yang ada.

Konflik sosial juga dapat dipahami sebagai fenomena yang inheren dalam interaksi manusia, di mana perbedaan interpretasi keagamaan maupun nilai-nilai spiritual kerap menjadi pemicu utama, khususnya dalam konteks interaksi antaragama (Ariyanto, 2023). Studi-studi terkini mengungkapkan bahwa konflik sosial dapat timbul dari ketegangan, pertentangan, atau perbedaan antara individu, kelompok, atau lembaga yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, maupun sumber daya (Simarmata et al., 2024). Dalam konteks digital, manifestasi konflik kini sering ditemukan melalui polarisasi isu-isu keagamaan di media sosial, yang berpotensi memicu ketegangan dan kekerasan di masyarakat (Faizin et al., 2024). Oleh karena itu, analisis sentimen terhadap komentar publik di media sosial menjadi salah satu instrumen penting untuk memahami dinamika konflik dan respons masyarakat terhadap isu-isu sensitif, seperti pelanggaran etika digital atau konten keagamaan yang kontroversial (Luthfia et al., 2025).

Konflik yang terjadi di ranah digital dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal melibatkan perbedaan antar kelompok budaya atau agama dalam masyarakat, sedangkan konflik vertikal merujuk pada ketegangan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok tertentu (Rantona & Husna, 2018). Muhammad Sholeh Isre mendefinisikan konflik sebagai situasi di mana kelompok-kelompok dengan identitas yang jelas terlibat secara sadar dalam pertentangan, berupaya mempertahankan klaim atas sumber daya, kekuasaan, atau status yang terbatas, bahkan dengan tujuan mencederai atau mengeliminasi lawan (Sopiyan et al., 2022).

Konflik ini tidak hanya dipicu oleh perbedaan pemahaman atas suatu fenomena, melainkan juga diperparah oleh modal sosial yang belum mapan serta penanganan konflik yang belum efektif dari pemerintah (Rofi'ah et al., 2021). Konflik kepentingan dapat pula muncul dari motivasi individu yang beragam dalam melaksanakan peran dan tugas, sedangkan

konflik horizontal seringkali dipicu oleh perbedaan persepsi di antara anggota organisasi dengan kedudukan yang setara (Kamaludin, 2022). Selain itu, konflik dapat timbul ketika individu tidak mampu memilih di antara dua atau lebih kebutuhan atau tujuan yang saling eksklusif, sehingga memaksa individu tersebut untuk mengorbankan salah satu kebutuhan atau tujuan (Asih et al., 2018).

Faktor-faktor struktural seperti ketimpangan sosial, korupsi, kelangkaan sumber daya, dominasi, dan eksploitasi menjadi pendorong utama kekerasan dan konflik sosial, yang seringkali diperparah oleh penyalahgunaan agama sebagai alat pemecah belah (Hyangsewu & Lestari, 2022; Nugroho, 2023). Dalam banyak kasus, konflik yang mengatasnamakan agama sebenarnya lebih sering disebabkan oleh penggunaan agama sebagai instrumen politik atau politik identitas, bukan semata-mata karena perbedaan keyakinan (Hyangsewu & Lestari, 2022). Fenomena polarisasi sosial di media sosial semakin mengemuka, di mana platform digital bukan hanya menjadi sarana komunikasi, melainkan juga arena terjadinya reproduksi konflik sosial akibat perbedaan identitas dan penyebaran informasi yang terfragmentasi (Sajian & Alif, 2025).

Kondisi ini menciptakan eforia digital yang mampu memicu konflik agama di tengah masyarakat pluralistik seperti Indonesia. Sebagai contoh, dalam kasus Pilgub DKI Jakarta, isu agama digunakan secara strategis sebagai alat propaganda politik dan disebarluaskan secara masif melalui media digital (Rantona & Husna, 2018). Dalam konteks tersebut, agama seringkali dipolitisasi sebagai simbol untuk memperoleh dukungan politik dan kekuasaan, bukan sebagai refleksi perilaku maupun ideologi partai atau kelompok itu sendiri (Rantona & Husna, 2018).

Selain faktor eksternal, dinamika internal juga turut berperan dalam memperumit konflik sosial di era digital, seperti lemahnya literasi digital, rendahnya kemampuan verifikasi informasi, serta adanya algoritma media sosial yang cenderung memperkuat ruang gema (echo chamber) dan membatasi pertukaran ide lintas kelompok. Hal ini berimplikasi pada semakin rentannya masyarakat terhadap disinformasi, ujaran kebencian,

serta narasi-narasi intoleran yang dapat dengan mudah menyulut konflik baru di dunia maya.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai konflik sosial, baik dari dimensi konseptual maupun aplikasi di era digital, sangat diperlukan. Upaya resolusi konflik yang adaptif harus mengintegrasikan pendekatan multidisipliner, penguatan literasi digital, serta peningkatan dialog lintas identitas guna membangun kohesi sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah masyarakat digital Indonesia.

2.2 Karakteristik Konflik Sosial

Karakteristik konflik sosial sangatlah kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai tingkatan aktor mulai dari individu, kelompok kecil, hingga kelompok besar dalam masyarakat. Kompleksitas tersebut tidak lepas dari dinamika multifaktorial yang melibatkan aspek ekonomi, politik, budaya, dan psikologis secara bersamaan. Konflik sosial sering kali berkembang dari sekadar perbedaan kepentingan menuju persaingan untuk menetralkan atau bahkan menenyapkan lawan, terutama ketika kepentingan kelompok tertentu menjadi dominan (Akhsan & Darmawan, 2023). Fenomena ini diperburuk oleh perbedaan pandangan dunia, doktrin keagamaan, filosofi sosial, dan interpretasi nilai, yang memicu persaingan ideologis di samping perebutan sumber daya ekonomi maupun politik (Retnowati, 2018).

Dimensi psikologis dalam konflik sosial juga tidak kalah pentingnya. Frustrasi, ketidakamanan, kecemasan kolektif, dan tekanan demografi dapat memicu akumulasi ketegangan yang akhirnya mengarah pada konflik terbuka (Deni et al., 2016). Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ekonomi dan sosial menjadi pemicu utama konflik, baik antara kelompok kaya dengan miskin, maupun antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan ini diperparah oleh akses informasi yang terbatas dan narasi identitas yang memecah belah, sehingga polarisasi serta ketidakpercayaan antarkelompok semakin meningkat (Hababil et al., 2024; Prasojo & Pabbajah, 2020).

Di era digital, karakter konflik sosial mengalami perubahan signifikan. Disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang menyebar di media sosial tidak hanya memperburuk suasana, tetapi juga menjadi pemicu polarisasi politik dan sosial yang dapat mengancam stabilitas nasional (Vu et al., 2025). Media sosial, dengan algoritmanya yang memperkuat echo chamber, sering kali menghadirkan ruang di mana kelompok “kita” dan “mereka” semakin terpisah secara ekstrem. Penyalahgunaan media sosial pun berperan dalam meningkatkan insiden cyberbullying, serta menyebarkan konten keagamaan ambigu yang dapat memicu konflik agama (Hafidz, 2021; Hidayah et al., 2023). Apabila narasi-narasi tersebut tidak direspons secara tepat, polarisasi akan semakin tajam, dengan kelompok mayoritas cenderung mengangkat derajat kelompok sendiri dan merendahkan atau melecehkan kelompok lain (Kamal, 2022).

Dinamika konflik juga dipengaruhi oleh interaksi antara proses psikologis individu dan budaya kolektif. Konflik tidak hanya merupakan hasil interaksi makro seperti industrialisasi, kapitalisasi ekonomi, dan perebutan kekuasaan, tetapi juga hasil dari proses mikro seperti kecemburuan, frustrasi, dan ketidakpuasan individu (Takdir, 2017; Arsal et al., 2022). Kesenjangan sosial yang menciptakan dikotomi tajam antara kelompok kaya-miskin atau menang-kalah sering kali menjadi pemicu utama konflik, apalagi dalam era modernisasi yang ditandai meningkatnya kebutuhan ekonomi, sosial, dan politik (Arsal et al., 2022). Selain faktor ekonomi dan sosial, latar belakang agama, suku, dan ras juga menjadi sumber konflik yang menonjol di Indonesia. Kelompok-kelompok besar di media sosial dapat memanfaatkan momentum tertentu untuk menggalang massa, membentuk opini, serta menjadi agen perubahan yang memengaruhi stabilitas nasional (Pratidina & Mitha, 2023). Polarisasi yang terjadi tidak hanya di tingkat elit, tetapi juga menyentuh kelompok akar rumput, didorong oleh intensitas interaksi digital yang tinggi dan rendahnya literasi digital masyarakat.

Peningkatan intensitas konflik sering kali dipicu oleh kebutuhan manusia yang semakin beragam dan kompleks, didorong oleh tingginya

tingkat pengetahuan serta tuntutan pemenuhan kepentingan ekonomi, sosial, dan politik (Arsal et al., 2022). Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, interaksi sosial yang intens dapat diperparah oleh kecemburuan ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak aspiratif, rasa kecewa, frustrasi, serta ketimpangan sosial dan diskriminasi berbasis ras, etnis, atau agama (Taufiq, 2021). Dalam konteks polarisasi politik, elit sering mengeksploitasi isu ekonomi dan ketimpangan sosial untuk memobilisasi dukungan massa, membingkai lawan politik dalam narasi “baik” versus “jahat” (Mansyur, 2023). Isu perbedaan agama, etnis, dan identitas lokal pun kerap dieksploitasi demi kepentingan politik praktis, sehingga menimbulkan perpecahan dan mengancam integrasi nasional (Bagja, 2024.; Khotimah, 2017).

Media sosial semakin memperparah polarisasi ini, tidak hanya melalui penyebaran ujaran kebencian dan hoaks, tetapi juga karena kemudahan akses informasi yang belum diimbangi dengan literasi digital yang memadai (Hidayah et al., 2023; Tinambunan, 2020). Penyebaran narasi radikal dan intoleran di media sosial menjadi tantangan besar, karena mampu memicu konflik lintas identitas secara masif. Tidak jarang, kelompok tertentu memanfaatkan algoritma media sosial untuk memperluas jangkauan propaganda mereka, menciptakan polarisasi yang semakin dalam.

Pada akhirnya, karakteristik konflik sosial di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor struktural seperti ekonomi, politik, dan budaya, tetapi juga oleh faktor psikologis dan teknologi. Konflik sosial di era digital menuntut pendekatan yang komprehensif dan adaptif, dengan menekankan pentingnya penguatan literasi digital, pembangunan dialog lintas identitas, serta penegakan hukum yang adil. Upaya mengatasi konflik sosial perlu didukung oleh kolaborasi multipihak, inovasi dalam penyelesaian konflik, serta penguatan kesadaran kolektif untuk menjaga kohesi dan integrasi sosial di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia..

2.3 Faktor Penyebab Konflik Sosial

Faktor-faktor penyebab konflik sosial di Indonesia sangat beragam dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama, seperti perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, serta perubahan sosial yang cepat (Hapsin, 2014). Secara lebih mendalam, aspek ideologis, perubahan stratifikasi sosial, serta dikotomi agama-politik juga menjadi unsur-unsur yang dapat memperuncing konflik di masyarakat (Sopiyan et al., 2022). Salah satu penyebab mendasar konflik sosial adalah kemajemukan vertikal, yaitu ketimpangan dalam distribusi pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan di antara kelompok masyarakat (Gultom & Fauzi, 2021). Ketidakmerataan ini sering kali menjadi sumber utama ketegangan sosial, khususnya di masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Selain ketimpangan struktural, lemahnya institusi negara dalam mengelola kemajemukan masyarakat dan ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga turut memperbesar potensi konflik (Heriyanti, 2022). Penolakan terhadap perbedaan pandangan serta rendahnya kesiapan dalam menghadapi perubahan sosial juga menjadi pemicu signifikan. Kurangnya kesadaran kolektif untuk menerima perbedaan di ruang publik memperparah situasi, sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus konflik di Indonesia (Deni et al., 2016). Aspek politik dan ekonomi kerap memperkeruh keadaan, terutama ketika kepentingan tertentu memengaruhi interpretasi atas sumber keagamaan, sehingga mempertegas batas-batas identitas kelompok (Retnowati, 2018).

Konflik politik muncul akibat persaingan dalam pembagian kekuasaan, yang terutama terjadi jika terjadi pertentangan tajam antar kelompok elit politik (Mupida, 2019). Distribusi kekuasaan yang tidak merata dari pusat ke daerah, meskipun dimaksudkan untuk mendemokratisasi ekonomi, sering kali malah menimbulkan konflik baru akibat perebutan kepentingan dan kemunculan oligarki ekonomi-politik di tingkat lokal (Deni et al., 2016). Di sisi lain, konflik sosial di Indonesia juga sering memiliki latar

belakang agama, etnis, bahasa, ekonomi, dan politik, yang tidak jarang menyebabkan korban jiwa dan kerugian materiil (Digdoyo, 2018).

Konflik agama, misalnya, acap kali dipicu oleh interpretasi yang beragam terhadap ajaran agama di masyarakat. Hal ini menyebabkan konflik atas nama agama, seperti yang pernah terjadi di Poso dan Aceh (Sari, 2022). Di Lombok, perbedaan agama juga sering menjadi pemantik konflik, meskipun kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan di luar ranah keagamaan, bahkan menimbulkan konflik internal agama akibat perbedaan penafsiran (Hamid, 2019). Secara lebih luas, kebijakan pemerintah yang sentralistik dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, hukum, politik, dan budaya, yang pada akhirnya menciptakan kecemburuan sosial dan politik, khususnya di daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang merasa terpinggirkan dalam pembangunan nasional (Hamid, 2019; Hadi Gayung Kasuma, 1966).

Kegagalan dalam mendemokratisasi ekonomi dan pemerataan distribusi sumber daya juga dapat memperparah ketimpangan dan memicu konflik. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus seperti konflik di Sumbawa yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi antara suku asli dan pendatang (Prihantoro & Hamidah, 2017). Konflik nelayan di Indonesia pun kerap disebabkan oleh aspek ekonomi, seperti perebutan akses terhadap sumber daya dan moda produksi, yang memicu kekerasan komunal (Revisi et al., 2023). Interaksi kompleks antara elit politik dan ketimpangan alokasi sumber daya yang tidak transparan dari pemerintah pusat juga berkontribusi pada fragmentasi sosial dan politik, sehingga memperbesar risiko terjadinya konflik (Baihaqi, 2020; Farchan, 2022).

Selain faktor-faktor di atas, pembangunan yang tidak merata dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan sering memperburuk ketegangan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi (Achank et al., 2021; Latifah, 2018). Ketika pembangunan hanya berfokus pada daerah tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, maka kecemburuan, ketidakpuasan, dan perasaan terpinggirkan menjadi semakin menumpuk.

Selain aspek struktural dan institusional, faktor kultural juga memengaruhi dinamika konflik. Perbedaan nilai, norma, serta simbol-simbol budaya dapat memperdalam segregasi sosial, terutama ketika narasi identitas kelompok didorong secara eksklusif dan menafikan kelompok lain. Sering kali, konflik terjadi bukan hanya karena perbedaan yang ada, melainkan karena kegagalan dalam mengelola dan memahami perbedaan tersebut secara konstruktif.

Perubahan sosial yang berlangsung cepat, yang dipicu oleh globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi digital, juga menjadi sumber konflik baru. Adaptasi yang tidak merata terhadap perubahan ini menimbulkan kegelisahan sosial, terutama ketika sebagian kelompok merasa tertinggal atau kehilangan identitas di tengah arus perubahan (Heriyanti, 2022). Ketidaksiapan masyarakat dalam menerima perubahan sering kali diwujudkan dalam bentuk penolakan, resistensi, bahkan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap “asing” atau membawa nilai baru.

Demokratisasi ekonomi yang tidak diiringi dengan keadilan dan pemerataan distribusi sumber daya hanya akan memperparah kecemburuan sosial serta memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin, pusat dan daerah, serta mayoritas dan minoritas (Deni et al., 2016). Dalam berbagai kasus, konflik juga dipicu oleh praktik-praktik diskriminatif, korupsi, serta kegagalan rezim demokratis dalam mengelola keragaman dan perbedaan kepentingan di masyarakat. Sebagai contoh, dalam konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar tanpa memperhatikan hak masyarakat adat dan lokal sering kali menimbulkan perlawanan dan bentrokan. Contoh lain, fragmentasi sosial akibat distribusi kekuasaan yang tidak adil dan transparan juga memperbesar potensi konflik horizontal maupun vertikal.

Dengan demikian, penyebab konflik sosial di Indonesia tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor struktural, kultural, ekonomi, politik, serta dinamika perubahan sosial yang berlangsung cepat. Solusi yang diambil pun harus bersifat komprehensif,

berorientasi pada keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan institusi yang mampu mengelola kemajemukan dan perbedaan secara demokratis dan inklusif.

2.4 Jenis-jenis Konflik Sosial

Konflik sosial dapat dikategorikan berdasarkan berbagai dimensi, termasuk skala, sifat, dan pihak-pihak yang terlibat, di mana masing-masing kategori menunjukkan dinamika serta dampak yang berbeda terhadap struktur sosial dan politik. Secara umum, konflik dapat diklasifikasikan berdasarkan intensitas, aktor yang terlibat, serta ruang lingkup geografis, yang masing-masing memerlukan pendekatan resolusi yang spesifik. Sebagai contoh, konflik dapat dibedakan menjadi konflik horizontal dan vertikal. Konflik horizontal terjadi antar kelompok masyarakat dengan status relatif setara, sementara konflik vertikal melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah atau lembaga lainnya (Harsasto, 2016).

Selain itu, konflik juga dapat dikategorikan berdasarkan jenis tujuannya, seperti konflik pendekatan-pendekatan, pendekatan-penghindaran, dan penghindaran-penghindaran, yang mencerminkan dilema individu dalam memilih antara berbagai motif atau tujuan (Asih et al., 2018). Konflik pendekatan-pendekatan timbul ketika individu dihadapkan pada pilihan antara dua atau lebih tujuan positif yang saling eksklusif. Sementara itu, konflik pendekatan-penghindaran terjadi saat individu tertarik sekaligus ingin menghindari suatu tujuan tunggal yang memiliki karakteristik positif dan negatif. Adapun konflik penghindaran-penghindaran muncul saat individu harus memilih antara dua tujuan negatif yang sama-sama tidak diinginkan (Rusanto et al., 2019).

Konflik juga dapat terjadi secara horizontal antarkomunitas maupun secara vertikal antara komunitas dan aparat pemerintah, yang sering kali dipicu oleh ketidakselarasan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah atau kecemburuan ekonomi (Benjamin, 2018). Misalnya, konflik yang muncul akibat ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi sering kali menjadi pemicu

utama instabilitas sosial dan politik (Deni et al., 2016). Adanya perbedaan dan keberagaman juga sering kali menjadi pangkal munculnya konflik, baik yang bersifat horizontal antar kelompok masyarakat maupun vertikal antara masyarakat dengan negara atau pemerintah (Sohendra, 2022).

Faktor-faktor seperti perbedaan kepentingan, perebutan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta ketidakseimbangan kekuasaan dapat memicu konflik vertikal. Sementara itu, kemajemukan sosial horizontal yang tidak memiliki konsensus nilai bersama dapat berujung pada benturan budaya dan separatisme (Jumadin & Wibisono, 2021). Tipe kekuasaan seperti kasta atau oligarki juga dapat mempertegas garis pemisah dalam masyarakat, sehingga membatasi mobilitas sosial dan berpotensi memicu konflik vertikal yang berakar pada ketidaksetaraan struktural (Fauzy & Kusdinar, 2020). Konflik vertikal ini sering kali terjadi antara pemerintah dan masyarakat, atau antara institusi pemerintah itu sendiri. Sedangkan konflik horizontal umumnya melibatkan kelompok-kelompok di masyarakat, seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (Anas et al., 2019; Yuliyanto, 2017).

Perbedaan individu yang bersumber dari latar belakang ekonomi, pola asuh, budaya, dan urutan kelahiran juga dapat memicu konflik dalam masyarakat (Gultom & Fauzi, 2021). Lebih lanjut, jenis konflik dapat diklasifikasikan menjadi konflik individual, konflik antar kelas sosial atau vertikal, konflik antar kelompok sosial atau horizontal, konflik rasial, dan konflik politik, yang masing-masing merefleksikan perbedaan kepentingan dan kebutuhan (Adam & Pariangu, 2020). Konflik-konflik ini sering kali disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang tidak dapat diselaraskan, baik pada tingkat individu maupun kelompok sosial, serta dapat diperparah oleh ketidakmampuan menerima perbedaan (Hafidz, 2021).

Konflik politik, khususnya, dapat digolongkan sebagai konflik sosial yang timbul dari interaksi intensif antarkelompok dalam masyarakat, yang sering kali berkaitan dengan perebutan kekuasaan atau dengan keputusan politik yang dibuat oleh penguasa (Ramadhan & Wahyudi,

2016). Konflik semacam ini dapat bersifat vertikal, melibatkan pemerintah dan partai politik, atau horizontal, yang terjadi antarpartai politik (Undang & Thamrin, 2017). Konflik horizontal juga dapat meluas ke antarorganisasi sosial dan keagamaan, serta antarkelompok elit, termasuk antarpartai dan antar-lembaga pemerintah atau aparat (Alam, 2016).

Perluasan konflik ke dalam ranah publik, baik dalam bentuk konflik horizontal maupun vertikal, sering kali dipicu oleh penyempitan akses terhadap ruang publik dan dominasi kepentingan pasar yang mengkooptasi ruang tersebut (Deni et al., 2016). Dengan demikian, pemahaman mengenai klasifikasi konflik sosial ini menjadi penting agar penanganan dan resolusi konflik dapat diarahkan secara tepat sesuai dengan karakteristik dan akar permasalahan yang ada, guna menciptakan harmoni dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

2.5 Dampak Konflik Sosial dalam Masyarakat

Selain itu, konflik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan kepentingannya menjadi konflik realistik dan non-realistik. Konflik realistik bersumber dari ketidaksepahaman terhadap tuntutan atau kepentingan tertentu, sedangkan konflik non-realistik berakar pada kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak (Asih et al., 2018; Hardjaloka, 2015). Konflik juga dapat dibedakan menjadi konflik pendekatan-pendekatan, pendekatan-penghindaran, dan penghindaran-penghindaran, tergantung pada motivasi individu terhadap tujuan yang bersifat positif maupun negatif (Asih et al., 2018). Selanjutnya, konflik dapat diklasifikasikan berdasarkan level permasalahannya, yakni konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat, serta konflik horizontal yang melibatkan antar-masyarakat atau antar institusi pemerintah (Anas et al., 2019). Konflik vertikal mencakup perselisihan antara pemerintah pusat, pemerintah kota, dan desa, sedangkan konflik horizontal sering kali melibatkan perselisihan antarsuku, agama, ras, dan golongan (Ramadhan & Wahyudi, 2016). Namun demikian, pemerintah juga dapat menjadi bagian dari konflik ini, yang berpotensi menimbulkan

ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang ada (Yuliyanto, 2017).

Dampak dari konflik-konflik tersebut tidak hanya menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat, tetapi juga mengganggu proses kehidupan sehari-hari dan berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi (Rusanto et al., 2019). Secara spesifik, dampak tersebut dapat berupa kerusakan infrastruktur, penurunan aktivitas ekonomi, timbulnya korban jiwa dan pengungsian, yang secara kolektif merugikan pembangunan jangka panjang (Sohendra, 2022). Selain itu, konflik sosial dapat pula mengakibatkan perubahan sosial yang signifikan, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana masyarakat merespons dan beradaptasi terhadap dinamika yang terjadi. Dampak ini bisa bersifat destruktif, menghasilkan kerugian materiil dan non-materiil, serta mengganggu stabilitas sosial politik, sebagaimana yang terlihat pada konflik-konflik destruktif yang menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda (Desike et al., 2021). Konflik realistik, seperti yang tercermin dalam kasus Mesuji, seringkali berakar pada perebutan sumber daya konkret atau materiil, seperti lahan atau sumber ekonomi (Perbawati, 2015). Namun, ketiadaan konflik secara total juga dapat diinterpretasikan secara negatif, karena dapat mengindikasikan adanya penekanan terhadap masalah-masalah mendasar yang berpotensi memicu kekacauan lebih besar di masa mendatang (Andriyani et al., 2021).

Konflik sering kali dianggap sebagai pendorong perkembangan masyarakat yang progresif, di mana bentrokan sosial dapat berfungsi sebagai katalisator untuk mencapai tahapan sosial yang lebih baik (Undang & Thamrin, 2017). Pentingnya konflik dalam perubahan sosial juga diakui dalam beberapa teori yang memandangnya sebagai mekanisme korektif untuk mengatasi ketidakadilan struktural dan mendorong adaptasi sosial (Gultom & Harianto, 2021). Dari perspektif sosiologis, konflik dapat berfungsi untuk memperjelas batas-batas kelompok, memperkuat solidaritas internal, serta mendorong restrukturisasi sosial menuju keseimbangan baru (Asih et al., 2018).

Namun demikian, konflik yang tidak terkendali, terutama yang disertai kekerasan, dapat mengganggu integrasi sosial, menimbulkan rasa takut, merusak lingkungan, menyebabkan kerugian harta benda, korban jiwa, hingga trauma psikologis, yang pada akhirnya menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Mulyono, 2015). Konflik dapat memperdalam permusuhan dan merusak tatanan sosial, namun juga bisa membawa masyarakat menuju perubahan sosial yang lebih baik dan mendorong kompetisi yang sehat (Trisno et al., 2019). Dampak positif dari konflik sosial meliputi peningkatan integrasi dan solidaritas internal kelompok, mendorong perubahan sosial untuk mengatasi kesenjangan, serta memperbaiki kapasitas kelembagaan yang berwenang (Adam & Pariangu, 2020). Namun, eskalasi konflik yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerugian jiwa, materi, serta menjadi hambatan bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat (Suwardi & Dinata, 2021).

Secara hakiki, konflik merupakan fenomena inheren dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam beberapa aspek dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sosial (Suprobowati, 2021). Akan tetapi, konflik yang tidak dikelola dengan baik cenderung bersifat destruktif, sebagaimana sering terjadi dalam konflik perebutan tanah yang berujung pada kekerasan (Muyassaroh & Dzulkarnain, 2022; Saraswati & Anas, 2023). Seringkali, konflik tersebut muncul akibat ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola perbedaan kepentingan, sehingga mendorong individu atau kelompok mengambil jalan pintas yang melanggar hukum (Hafidz, 2021).

Penyelesaian konflik yang efektif membutuhkan intervensi pihak ketiga yang netral guna memfasilitasi dialog, mencapai kesepakatan bersama, serta menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran demi menjaga stabilitas sosial (Widodo, 2020). Dalam konteks konsolidasi demokrasi, manajemen konflik sangat krusial untuk memulihkan dan memperkuat struktur politik bangsa, terutama ketika menghadapi tarik-menarik kepentingan antar kelompok dan responsivitas negara (Deni et al., 2016). Keterbukaan sistem demokratis dapat mengurangi kemungkinan konflik bersenjata, meski tidak menjamin stabilitas sepenuhnya, karena

memungkinkan kebebasan berekspresi dan akses informasi (Farchan, 2022). Hal ini memungkinkan masyarakat menyuarakan ketidakpuasan dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan, sehingga mengurangi akumulasi ketegangan yang dapat memicu konflik kekerasan (Sopiyan et al., 2022).

Paradigma kontemporer memandang konflik sebagai bagian tak terhindarkan dari interaksi sosial, yang apabila dikelola dengan tepat dapat menjadi katalisator perubahan positif dan perbaikan hubungan sosial maupun struktural (Rosana, 2015). Penyelesaian konflik secara efektif, khususnya terkait sengketa agraria, memerlukan kemauan politik yang kuat dan pendekatan kelembagaan yang komprehensif demi menjamin keadilan restoratif dan preventif (Ahoen, 2025). Konsep ideal kebijakan pengelolaan konflik seharusnya berfokus pada pengaturan dan pengendalian perselisihan agar tidak berujung pada kekerasan, serta memastikan penyelesaian yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum (Boboy et al., 2020). Pendekatan ini harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, mengingat konflik sering kali berakar pada ketidaksetaraan dalam akses sumber daya dan pengambilan keputusan.



BAB 3

POLARISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT

3.1 Pengertian Polarisasi Politik

Polarisasi politik merupakan fenomena yang merujuk pada pergeseran ideologi dalam sistem politik, di mana oposisi terhadap isu-isu krusial cenderung bersifat ekstrem dan menyebabkan semakin berkurangnya titik temu maupun kompromi antar kelompok (Anggraini, 2025). Polarisasi ini menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara kubu-kubu politik, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan yang konsensual dan berorientasi pada kepentingan bersama (Masyrullahushomad, 2019). Keadaan ini diperparah oleh dinamika konflik internal serta perebutan kekuasaan antara kekuatan politik lama dan baru, yang sama-sama berambisi memperoleh kekuasaan, sebagaimana terjadi pada masa transisi pasca-Soeharto (Deni et al., 2016).

Selain itu, polarisasi politik di Indonesia semakin dalam akibat munculnya praktik politik identitas dan politik transaksional yang secara nyata mengikis rasionalitas politik serta menempatkan kepentingan

kelompok di atas kemaslahatan publik (Anggraini, 2025). Politik identitas memanfaatkan sentimen primordial, seperti agama, etnis, atau identitas daerah, untuk memperkuat basis dukungan, sehingga proses demokratisasi sering kali berjalan tidak sehat dan jauh dari cita-cita demokrasi deliberatif. Praktik politik transaksional turut memperparah fragmentasi politik, di mana konsolidasi demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan biaya politik yang sangat tinggi. Situasi ini memicu maraknya politik uang, klientelisme, dan konflik di tingkat akar rumput, hingga terjadi pergeseran dari demokrasi prosedural ke praktik klientelisme yang menggerus kualitas kelembagaan politik (Anggraini, 2025).

Fenomena politik uang dan klientelisme ini juga melahirkan praktik “perkawinan pragmatis” antara calon kepala daerah dan partai politik, yang berdampak pada menurunnya kualitas kaderisasi politik serta merosotnya integritas kelembagaan politik (Anggraini, 2025). Hal ini tidak hanya menghambat proses demokratisasi, tetapi juga meningkatkan risiko konflik politik dan kekerasan kolektif, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa pasca-reformasi (Suprpto, 2013). Dengan demikian, konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi hambatan serius, khususnya dalam membangun sistem politik yang stabil dan inklusif (Deni et al., 2016). Persepsi masyarakat yang semakin bias akibat polarisasi politik menjadi salah satu alasan utama mengapa fenomena ini terus berlanjut di Indonesia (Jati, 2022). Dalam konteks ini, politik identitas seringkali dipandang negatif karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, meskipun pada kenyataannya kemunculan politik identitas merupakan hasil interaksi antara nilai-nilai demokrasi arus utama dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam masyarakat (Susanto et al., 2025).

Polarisasi politik di Indonesia meningkat tajam pada periode 2014-2019, khususnya antara kelompok Islamis dan pluralis, yang dipicu oleh manuver aktor-aktor politik strategis (Mansyur, 2023). Polarisisasi ini semakin kompleks dengan masifnya penggunaan politik identitas dan digital, yang menciptakan “perang narasi” di media sosial antara buzzer,

influencer, dan akun anonim dari setiap kubu politik. Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengikis rasionalitas politik publik, memperkuat prasangka, dan memperdalam fragmentasi sosial (Susanto et al., 2025).

Penggunaan politik identitas secara masif melalui media digital telah mengubah lanskap politik Indonesia. Media sosial menjadi ruang utama dalam pertarungan narasi, di mana buzzer politik dan akun anonim menyebarkan informasi yang sering kali bias, provokatif, bahkan hoaks. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas demokrasi, karena masyarakat lebih mudah terdorong pada polarisasi, intoleransi, dan perpecahan sosial. Fragmentasi sosial yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada hubungan antarkelompok dalam masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, seperti partai politik, lembaga legislatif, dan penyelenggara pemilu (“Politik Identitas, Ancaman Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Jelang Pilpres 2024, 2023; Wingarta et al., 2021).

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi masyarakat menuju demokrasi yang inklusif dan transformasional di Indonesia masih jauh dari harapan. Politik identitas dan polarisasi yang dimotori oleh kepentingan elektoral jangka pendek menjadikan demokrasi di Indonesia lebih bersifat prosedural daripada substantif (Wingarta et al., 2021). Demokrasi hanya berjalan sebagai rutinitas pemilu, tanpa disertai penguatan nilai-nilai deliberatif, inklusivitas, dan partisipasi yang sehat. Lebih jauh, polarisasi politik yang berkembang di masyarakat juga berdampak pada penurunan kualitas dialog publik dan menurunnya kemampuan masyarakat untuk menemukan kompromi atau titik temu. Akibatnya, proses pengambilan kebijakan publik menjadi kurang efektif, karena lebih didasarkan pada kepentingan kelompok daripada pertimbangan rasional dan kepentingan umum. Situasi ini juga memperbesar risiko terjadinya konflik sosial, kekerasan kolektif, dan instabilitas politik, yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan nasional.

Paradigma politik identitas dan polarisasi juga berpotensi menutup ruang bagi lahirnya kepemimpinan politik yang berkualitas, berintegritas, dan visioner. Kaderisasi politik menjadi terhambat, karena lebih diutamakan figur-figur yang memiliki kedekatan primordial dan elektabilitas tinggi, bukan kapasitas ataupun integritas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan kualitas pemerintahan maupun representasi politik di parlemen, sehingga masyarakat semakin apatis terhadap proses politik. Oleh karena itu, perlu adanya langkah strategis untuk mengurangi polarisasi politik di Indonesia, di antaranya dengan memperkuat pendidikan politik, meningkatkan literasi digital, dan mendorong dialog lintas kelompok. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan transparan serta penguatan kelembagaan politik sangat diperlukan agar demokrasi Indonesia dapat berkembang secara lebih substansial, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya-upaya ini tidak hanya penting untuk menurunkan tingkat polarisasi, tetapi juga untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan sosial dan berorientasi pada kepentingan bersama seluruh warga negara..

3.2 Sejarah dan Perkembangan Polarisasi Politik

Secara historis, polarisasi politik di Indonesia sering kali berakar pada kompleksitas sosiokultural dan religius yang mewarnai masyarakat Indonesia. Faktor-faktor ini kemudian dieksploitasi secara cermat oleh elite politik untuk mobilisasi dukungan, khususnya dalam perhelatan pemilihan kepala daerah yang sarat dengan praktik politik identitas (Anggraini, 2025; “Politik Identitas, Ancaman Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Jelang Pilpres 2024,” 2023). Dalam konteks demokrasi pasca-reformasi, fenomena politik identitas dan populisme justru semakin menguat, menimbulkan tantangan serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia (Wingarta et al., 2021).

Salah satu manifestasi nyata dari politik identitas adalah penggunaan simbolisasi Islam oleh partai-partai politik Islam untuk menggalang pemilih melalui sentimen keagamaan yang bersifat emosional. Strategi

ini memperlihatkan upaya elite politik untuk membangkitkan sentimen identitas keagamaan di tengah masyarakat, sehingga suara pemilih lebih mudah diarahkan berdasarkan ikatan emosional daripada pertimbangan rasional (Ummatin, 2020). Populisme berbasis identitas ini kerap kali muncul dari kelompok menengah Muslim yang rentan secara sosial dan ekonomi, sebagaimana terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Dalam peristiwa tersebut, perasaan inferioritas dan kerentanan mendorong kelompok ini untuk menyalahkan kelompok ekonomi mapan, termasuk kelompok etnis non-Muslim dan non-pribumi, sebagai biang kerok ketidakadilan yang mereka rasakan (Syamsudin & Dewi, 2024).

Isu-isu identitas yang sensitif kemudian dimanipulasi secara strategis oleh aktor politik, seperti Amien Rais dengan slogan “berantas KKN” (korupsi, kolusi, dan nepotisme) atau Wiranto dengan gagasan “strong leader” guna menarik simpati publik. Meskipun efektif dalam mengumpulkan dukungan, strategi ini sering kali memperparah polarisasi di tengah masyarakat (Deni et al., 2016). Pola serupa tampak dalam praktik politik transaksional yang melibatkan jual beli tiket pencalonan, pembelian suara pemilih, hingga suap kepada penyelenggara pemilu. Praktik ini tidak hanya memperparah korupsi politik, tetapi juga menyebabkan biaya politik menjadi sangat mahal dan sistem politik didominasi oleh kekuatan modal (Wardiana, 2025).

Akibat dari maraknya politik transaksional dan identitas, masyarakat Indonesia cenderung tidak memiliki preferensi ideologis yang kuat ketika memilih partai politik. Hal ini mendorong partai-partai politik untuk menempuh jalan pintas, seperti mempraktikkan politik uang atau menggunakan simbol-simbol identitas berbasis agama dan suku demi mengamankan suara elektoral (Wingarta et al., 2021). Lemahnya ideologi partai politik di Indonesia menyebabkan partai lebih memilih strategi populisme dan simbolisasi identitas ketimbang membangun basis programatik yang jelas.

Kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya politik identitas sebagai wacana elektoral yang memicu perdebatan dan pertentangan

antara kelompok nasionalis dan Islam radikal, sehingga menghasilkan ketegangan sosial yang kronis dan polarisasi berkepanjangan di Indonesia (Saputra & Firdaus, 2023). Polarisasi politik yang berbasis identitas agama dan etnis tidak hanya terjadi pada level elite, tetapi juga merembes ke level akar rumput, memecah masyarakat ke dalam kubu-kubu yang saling berseberangan. Politik identitas berbasis agama juga memperkuat segmentasi massa, memunculkan eksklusivitas kelompok, serta memudarkan ruang dialog dan moderasi yang seharusnya menjadi ciri demokrasi deliberatif.

Fenomena populisme bersentimen agama semakin nyata dalam kontestasi Pilkada 2017 dan Pemilu 2019, di mana kampanye politik didominasi oleh narasi konfrontatif dan penolakan terhadap kelompok yang dianggap “berbeda”. Narasi-narasi ekstrem ini meniadakan ruang kompromi serta menutup kemungkinan terjadinya moderasi politik, sehingga masyarakat semakin sulit untuk berdialog secara sehat dan terbuka (Wingarta et al., 2021). Media sosial turut memperparah situasi, karena menjadi arena utama penyebaran narasi identitas, hoaks, dan ujaran kebencian yang memperdalam fragmentasi sosial.

Dampak lanjutan dari polarisasi politik berbasis identitas adalah semakin rapuhnya integrasi sosial dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi. Publik menjadi semakin skeptis terhadap proses politik, karena melihat praktik politik yang didominasi oleh transaksi, manipulasi identitas, serta minimnya tawaran program yang substantif dari partai politik. Hal ini juga berdampak pada menurunnya kualitas kaderisasi politik, di mana figur-figur yang terpilih lebih sering didasarkan pada popularitas dan kedekatan identitas, bukan kapasitas, integritas, atau visi kepemimpinan.

Selain itu, polarisasi politik yang berbasis agama dan identitas juga dapat mengancam stabilitas nasional dan meningkatkan potensi konflik horizontal di masyarakat. Ketika politik identitas dijadikan kendaraan utama dalam kontestasi politik, maka ruang publik akan semakin dipenuhi oleh narasi eksklusif yang meminggirkan kelompok minoritas dan

memperuncing perbedaan. Akibatnya, proses demokrasi yang seharusnya inklusif dan membawa perubahan positif justru berpotensi menghasilkan perpecahan sosial yang akut.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi polarisasi politik di Indonesia. Upaya penguatan literasi politik dan pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting, agar masyarakat mampu menyaring informasi dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional, bukan sekadar sentimen identitas. Selain itu, reformasi sistem kepartaian dan penguatan ideologi partai juga harus terus digalakkan, agar partai politik tidak lagi tergantung pada populisme dan politik uang, melainkan mampu menawarkan program dan solusi yang substantif bagi masyarakat. Terakhir, media massa dan media sosial harus dioptimalkan sebagai ruang dialog yang sehat dan edukatif, bukan sekadar arena perseteruan politik berbasis identitas.

Dengan demikian, sejarah polarisasi politik di Indonesia menunjukkan bahwa kompleksitas sosiokultural dan religius, jika tidak dikelola secara bijak, dapat menjadi ladang subur bagi praktik politik identitas dan populisme yang berpotensi merusak tatanan demokrasi dan integrasi sosial bangsa. Tantangan ini harus direspons dengan kebijakan yang komprehensif, inovatif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi substantif serta pengelolaan keragaman secara inklusif dan berkeadilan.

3.3 Gejala dan Indikator Polarisasi

Salah satu indikator utama polarisasi politik di Indonesia adalah meningkatnya konflik antarelite politik yang memperebutkan kekuasaan. Persaingan ini kemudian mendorong mobilisasi pemilih secara masif untuk meningkatkan nilai elektoral masing-masing kontestan (Mansyur, 2023). Rivalitas yang begitu intens di antara para pendukung maupun kontestan sering kali mengganggu jalannya kampanye, bahkan dapat memicu bentrokan fisik di lapangan, sebagaimana kerap terjadi dalam pemilu dengan tingkat kompetisi yang sangat ketat (Bagja, 2024.). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika politik nasional, tetapi

juga memperlihatkan bagaimana polarisasi dapat merembet ke tingkat akar rumput, memecah belah masyarakat dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan.

Eksplorasi isu-isu perbedaan agama, etnis, dan identitas lokal oleh aktor politik turut memperparah polarisasi tersebut. Para politikus sering kali menggunakan narasi identitas untuk memperkuat basis dukungan mereka, baik dengan menonjolkan keunggulan kelompok sendiri maupun dengan mendiskreditkan kelompok lain. Taktik ini tidak hanya mengancam integrasi bangsa, tetapi juga menciptakan perpecahan sosial yang mendalam di tengah masyarakat multikultural Indonesia (Bagja, 2024.). Politik identitas yang dimainkan secara berlebihan berpotensi menimbulkan fragmentasi yang tajam, sehingga masyarakat terpolarisasi dalam kubu-kubu yang sulit untuk dipertemukan.

Dampak dari eksploitasi identitas ini tidak hanya terbatas pada konflik antarumat beragama, tetapi juga merambah ke dalam tubuh agama itu sendiri. Dalam banyak kasus, polarisasi yang terjadi telah melahirkan benturan pandangan internal dalam satu agama, bahkan mencapai tingkat ekstrem. Misalnya, fenomena pelabelan 'kafir' terhadap sesama muslim yang tidak mendukung calon tertentu dalam kontestasi politik menunjukkan betapa politik identitas dapat menggerus nilai-nilai toleransi dan persaudaraan dalam satu komunitas keagamaan (Ardipandanto, 2020). Fenomena ini menandai pergeseran orientasi politik dari dialog dan konsensus menuju konfrontasi dan eksklusivitas.

Selain itu, dinamika polarisasi politik diperkuat oleh penggunaan media sosial sebagai ruang utama pertarungan narasi. Media sosial memberikan ruang bagi aktor politik dan pendukungnya untuk menyebarkan propaganda, hoaks, ujaran kebencian, hingga fitnah yang bertujuan memperkuat identitas kelompok dan melemahkan kelompok lawan. Algoritma media sosial yang menonjolkan konten yang sejalan dengan preferensi pengguna juga berkontribusi pada terciptanya echo chamber, di mana individu hanya terpapar pada informasi yang

memperkuat keyakinan mereka, sehingga memperparah polarisasi politik di masyarakat.

Polarisasi yang demikian tajam tidak jarang berujung pada kekerasan fisik di lapangan, terutama saat masa kampanye atau setelah pengumuman hasil pemilu. Bentrokan antara pendukung sering kali terjadi, disertai aksi unjuk rasa yang berujung pada kerusakan dan perusakan fasilitas publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa polarisasi politik tidak hanya berdampak pada tataran wacana atau opini, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Keterlibatan elite politik dalam memperuncing polarisasi juga berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia. Ketika elite politik lebih memilih memanfaatkan isu-isu identitas untuk kepentingan elektoral ketimbang membangun narasi programatik yang substantif, maka demokrasi cenderung kehilangan esensinya sebagai sarana musyawarah dan pencapaian konsensus. Akibatnya, proses politik lebih banyak diwarnai oleh konflik kepentingan, kecurigaan antarkelompok, dan minimnya ruang dialog yang produktif.

Selain itu, polarisasi politik yang merasuk ke dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap hubungan sosial sehari-hari. Tidak jarang, perbedaan pilihan politik menyebabkan retaknya hubungan keluarga, persahabatan, atau komunitas lokal. Dalam konteks ini, polarisasi politik tidak hanya menjadi isu elite, tetapi juga menjadi masalah sosial yang nyata di tingkat individu dan kelompok. Masyarakat menjadi semakin sulit untuk menerima perbedaan, dan kecenderungan untuk mengedepankan sentimen kelompok kian menguat. Lebih jauh, polarisasi politik yang didorong oleh isu identitas juga dapat menghambat upaya pembangunan nasional. Ketidakstabilan sosial akibat polarisasi membuat investasi dan roda ekonomi terganggu, sementara pemerintah menjadi kurang efektif dalam menjalankan program-program pembangunan karena dihadapkan pada resistensi politik yang tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlambat kemajuan bangsa dan memperlebar jurang ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan polarisasi politik yang kian mengakar, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa. Elite politik harus lebih mengedepankan etika politik dan menjadikan kompetisi sebagai ajang adu gagasan, bukan adu sentimen identitas. Media massa dan media sosial perlu memainkan peran edukatif dengan memberikan informasi yang seimbang dan membangun ruang dialog yang inklusif. Selain itu, literasi politik dan pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat untuk membekali masyarakat dengan pemahaman yang matang tentang demokrasi, toleransi, serta pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Dengan upaya komprehensif tersebut, diharapkan polarisasi politik dapat diredam, dan masyarakat Indonesia mampu kembali membangun konsensus nasional yang berlandaskan musyawarah, persaudaraan, dan kepentingan bersama, sehingga demokrasi dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan..

3.4 Studi Kasus Polarisasi Politik di Indonesia

Salah satu contoh paling nyata dari polarisasi politik yang signifikan di Indonesia adalah Pemilihan Umum tahun 2019. Pada momentum ini, pertarungan antara dua kubu calon presiden—yang masing-masing didukung oleh pendukung fanatik dan elite politik—memecah belah masyarakat secara tajam berdasarkan afiliasi politik dan identitas sosial. Polarisasi ini semakin diperkuat dengan narasi “hitam-putih” yang secara eksplisit diusung oleh para pemimpin politik dan disebarluaskan melalui berbagai kanal media, baik konvensional maupun digital (Mansyur, 2023).

Fenomena polarisasi tersebut berakar pada penggunaan politik identitas, terutama identitas keagamaan, sebagai alat utama mobilisasi massa. Dalam proses kampanye, simbol-simbol agama dieksploitasi untuk mempertegas perbedaan antara “kita” dan “mereka”, sehingga meningkatkan intensitas intoleransi keagamaan dan polarisasi sosial yang ekstrem (Samosir & Novitasari, 2022; Syarif & Hannan, 2020). Strategi mobilisasi ini tercermin dari munculnya kampanye anti-kemapanan yang mengaitkan identitas keagamaan dengan narasi bahwa pemerintah

dan kelompok tertentu dianggap memarjinalkan umat Muslim. Contoh paling menonjol adalah kemunculan Gerakan “2019 Ganti Presiden”, yang secara terbuka mengekspresikan ketidakpuasan dan antipati terhadap pemerintahan saat itu, serta retorika “partai setan vs partai Allah” yang digaungkan oleh sejumlah tokoh politik dan agama (Ardipandanto, 2020).

Retorika semacam ini berhasil membelah masyarakat ke dalam dua kutub besar, yakni mereka yang mendukung status quo dan mereka yang ingin perubahan radikal, dengan masing-masing kutub saling menegasikan dan menolak kompromi. Polarisasi tidak hanya terjadi di ranah elite, namun juga merasuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, komunitas, hingga tempat ibadah. Diskusi politik di ruang-ruang sosial sering kali berujung pada konflik verbal, bahkan kekerasan fisik, ketika perbedaan pilihan politik dianggap sebagai ancaman identitas kelompok.

Peran media sosial dalam memperkuat polarisasi juga sangat signifikan. Platform digital menjadi arena utama pertarungan narasi, di mana buzzer, influencer, dan akun anonim dari masing-masing kubu secara masif menyebarkan propaganda, hoaks, dan ujaran kebencian. Algoritma media sosial yang cenderung memperkuat konten sejalan dengan preferensi pengguna memperdalam ruang gema (echo chamber), sehingga mempersempit ruang dialog rasional dan memperluas fragmentasi sosial. Akibatnya, masyarakat semakin sulit menerima perbedaan, dan intoleransi pun meningkat—terutama terhadap kelompok yang dianggap “berseberangan”.

Kampanye-kampanye yang mengasosiasikan identitas keagamaan dengan narasi marginalisasi juga berdampak pada meningkatnya eksklusivitas kelompok. Solidaritas internal kelompok yang didasarkan pada sentimen keagamaan semakin kuat, sementara rasa saling percaya antarkelompok masyarakat melemah. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang kian rapuh, di mana prasangka dan stereotip negatif mudah berkembang. Dalam beberapa kasus, polarisasi bahkan mendorong munculnya tindakan diskriminatif, penolakan terhadap simbol-simbol

keagamaan tertentu, hingga aksi massa yang berujung pada kekerasan fisik.

Polarisasi dalam Pemilu 2019 juga memengaruhi hubungan antarlembaga negara. Ketegangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif meningkat, seiring dengan memanasnya konflik politik di tingkat elite. Selain itu, polarisasi berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi, seperti KPU dan Bawaslu, yang kerap dianggap tidak netral dan berpihak pada salah satu kubu politik. Akibatnya, legitimasi hasil pemilu juga sering dipertanyakan, dan berbagai aksi unjuk rasa terjadi sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan. Dari sisi sosial, polarisasi politik memunculkan berbagai konsekuensi destruktif, seperti retaknya hubungan keluarga, persaudaraan, dan komunitas lokal. Perbedaan pilihan politik menjadi alasan untuk memutus tali silaturahmi atau bahkan melakukan perundungan (*bullying*) di lingkungan kerja atau pendidikan. Dalam konteks ini, politik identitas telah melahirkan segregasi sosial yang nyata, di mana individu dan kelompok saling menghindari interaksi dan membatasi ruang dialog.

Fenomena ini menunjukkan bahwa polarisasi politik berbasis identitas keagamaan telah melampaui sekadar kompetisi elektoral, dan bertransformasi menjadi masalah sosial yang kompleks serta mengancam kohesi nasional. Dalam jangka panjang, jika tidak dikelola dengan baik, polarisasi semacam ini dapat memperlemah integrasi bangsa, melemahkan budaya demokrasi inklusif, dan bahkan membuka peluang munculnya konflik terbuka yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa untuk meredam polarisasi politik. Strategi tersebut dapat meliputi pendidikan politik yang inklusif, penguatan literasi digital, serta pengembangan ruang dialog antaridentitas yang konstruktif. Selain itu, para elite politik dan tokoh agama harus menjadi teladan dalam menyejukkan suasana dan mengedepankan nilai-nilai persatuan, toleransi, serta keadilan sosial. Penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku ujaran kebencian serta upaya moderasi narasi politik di media sosial juga harus terus didorong, agar polarisasi

ekstrem tidak semakin memperlemah sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.5 Implikasi Polarisasi terhadap Kehidupan Sosial

Polarisasi politik yang berkelanjutan di Indonesia telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan, terutama dalam konteks dinamika sosial dan politik pasca reformasi. Polarisasi ini tak hanya berlangsung di tingkat elite politik, melainkan juga telah merembes ke akar rumput, memengaruhi pola interaksi antarwarga, bahkan dalam komunitas yang sebelumnya harmonis (Bagja, 2024.; Qodir et al., 2022). Fenomena ini memiliki implikasi serius terhadap kohesi sosial, karena secara nyata mampu memecah belah komunitas, mengikis rasa kebersamaan, serta merusak fondasi masyarakat sipil yang inklusif. Ketika masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan secara ideologis maupun identitas, maka potensi terjadinya fragmentasi sosial menjadi semakin besar.

Dampak dari polarisasi ini kian terasa ketika ruang untuk dialog konstruktif semakin menyempit. Ketidakmampuan untuk membangun dialog yang sehat dan saling menghormati menyebabkan kompromi politik dan pencapaian konsensus nasional menjadi sangat sulit diraih (Vu et al., 2025). Ketegangan ini diperparah dengan maraknya penggunaan media sosial sebagai arena pertarungan narasi yang sering kali mengedepankan sentimen emosional ketimbang rasionalitas. Akibatnya, informasi yang tersebar cenderung bias dan memperkuat prasangka, bukan mendorong pemahaman bersama. Salah satu titik krusial yang memperuncing polarisasi adalah perdebatan mengenai peran agama dalam kehidupan sosial dan politik. Di satu sisi terdapat kelompok Islamis yang menginginkan agar agama, khususnya Islam, memperoleh posisi istimewa dalam tata kelola kenegaraan, sementara di sisi lain terdapat kelompok pluralis yang menuntut pemisahan yang tegas antara agama dan negara (Mansyur, 2023). Perbedaan pandangan

ini tidak hanya menjadi perdebatan intelektual, melainkan juga memicu rivalitas yang berujung pada ketegangan sosial dan politik. Politik identitas pun ikut menguat seiring dengan meningkatnya kontestasi elektoral, di mana isu-isu keagamaan sering kali dijadikan komoditas politik untuk menggalang dukungan.

Kontestasi politik yang semakin intens dan didorong oleh polarisasi identitas berpotensi memicu konflik horizontal antarkelompok masyarakat. Polarisasi yang semakin tajam dapat memunculkan segregasi sosial, bahkan mengundang potensi kekerasan yang merusak tatanan sosial yang sudah terbangun (Anggraini, 2025). Dalam konteks ini, politik identitas kerap dimanfaatkan untuk membangun loyalitas kelompok sembari mendiskreditkan kelompok lain. Strategi ini sangat efektif terutama dalam situasi pemilihan umum yang kompetitif, di mana keberhasilan politikus sangat bergantung pada kemampuannya mengonsolidasikan basis dukungan. Selain itu, polarisasi politik juga diperparah oleh fenomena politik pelabelan, khususnya di kalangan kelompok Islam. Politik pelabelan muncul dalam bentuk pemberian cap atau label tertentu kepada individu atau kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan preferensi politik kelompok mayoritas. Label semacam ini sering kali digunakan sebagai instrumen strategis untuk membentuk citra publik, memperkuat legitimasi politik, dan mengukuhkan klaim keagamaan tertentu (Masykuri & Ramadlan, 2021). Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena label tersebut bisa sangat stigmatisasi, misalnya cap “kafir” yang disematkan kepada sesama umat Islam yang berbeda pilihan politik.

Praktik politik pelabelan ini terlihat nyata dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta, di mana isu keagamaan dan identitas sangat menonjol dalam kampanye politik. Dalam kasus ini, identitas agama tidak lagi sekadar menjadi faktor personal, melainkan dijadikan alat politik yang ekstrem, dengan membelah masyarakat ke dalam dikotomi moral seperti ‘pahala’ dan ‘dosa’ (Ardipandanto, 2020). Akibatnya, individu yang tidak mendukung calon tertentu bisa dicap sebagai berkhianat terhadap agama,

meskipun sesungguhnya preferensi politik adalah hak personal yang seharusnya dihormati. Implikasi dari fenomena ini sangat luas dan mendalam. Di satu sisi, polarisasi politik yang terus berlangsung dapat menghambat proses konsolidasi demokrasi dan memperlemah lembaga-lembaga negara. Di sisi lain, masyarakat sipil yang seharusnya menjadi ruang inklusif dan toleran justru terancam terfragmentasi. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik dan hukum, serta menghambat terciptanya stabilitas politik dan sosial.

Untuk mengatasi polarisasi ini, diperlukan upaya kolektif dari berbagai elemen bangsa. Pertama, pendidikan politik yang inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan harus terus digalakkan. Pendidikan ini penting untuk membentuk warga negara yang kritis, toleran, dan mampu menghargai perbedaan. Kedua, peran media massa dan media sosial perlu diarahkan untuk mendorong dialog yang sehat dan menyebarkan informasi yang objektif. Ketiga, para pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan elite politik harus memberikan teladan dalam membangun narasi persatuan, bukan justru memperkeruh perbedaan. Dengan demikian, polarisasi politik yang berkelanjutan merupakan tantangan serius bagi masa depan Indonesia sebagai negara demokratis yang majemuk. Jika tidak dikelola dengan bijak, polarisasi ini tidak hanya mengancam kohesi sosial, tetapi juga dapat menghambat pembangunan nasional, merusak harmoni sosial, dan mengancam cita-cita persatuan bangsa. Oleh karena itu, komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadaban menjadi keniscayaan dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa di tengah dinamika politik yang terus berkembang.



BAB 4

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM POLARISASI POLITIK

4.1 Media Sosial sebagai Ruang Publik Baru

Munculnya platform media sosial telah mengubah lanskap komunikasi politik secara fundamental di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Transformasi ini membawa perubahan signifikan dalam pola penyebaran informasi, mobilisasi dukungan, serta pembentukan opini publik yang kini terjadi dalam tempo yang sangat cepat dan dalam skala yang luas (Sitorus et al., 2024). Media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, telah menjadi arena krusial bagi diskursus politik, di mana setiap individu memiliki akses yang relatif setara untuk berpartisipasi dalam perbincangan politik. Namun, di balik kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi, media sosial juga memfasilitasi polarisasi politik melalui fenomena echo chambers dan filter bubbles. Dalam ruang digital yang terfragmentasi, pengguna cenderung terpapar pada informasi dan opini yang sejalan dengan pandangan mereka, sehingga memperkuat keyakinan kelompok dan mempersempit ruang dialog lintas pandangan.

Fenomena echo chambers dan filter bubbles ini berkontribusi pada terciptanya segregasi virtual dalam masyarakat. Algoritma media sosial yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna justru mendorong pengguna ke dalam kelompok-kelompok homogen, di mana narasi yang bias dan berita palsu dapat dengan cepat menyebar tanpa adanya mekanisme penyeimbang yang memadai (Jubba et al., 2019). Dalam konteks ini, narasi politik yang mengandung disinformasi lebih mudah diterima dan tersebar, memperkuat polarisasi dan memperuncing perbedaan antar kelompok masyarakat. Bahkan, diskursus politik di media sosial sering kali tidak lagi bertumpu pada substansi atau argumen rasional, melainkan pada sentimen emosional yang diulang-ulang dalam lingkup komunitas virtual tertentu.

Di tengah dinamika tersebut, peran buzzer dan influencer di media sosial menjadi semakin vital, sekaligus problematik. Mereka secara aktif membentuk lanskap opini publik dengan menyebarkan narasi politik yang seringkali memecah belah dan sarat dengan disinformasi (Susanto et al., 2025). Dengan jumlah pengikut yang besar dan kemampuan memengaruhi persepsi publik, buzzer dan influencer mampu mengorkestrasi pertempuran narasi yang sengit di ranah digital. Tidak jarang, mereka memanfaatkan isu-isu sensitif, seperti agama, etnis, dan identitas politik, untuk menggagalkan dukungan atau menjatuhkan lawan. Hal ini tidak hanya memperburuk fragmentasi sosial, tetapi juga membahayakan kohesi masyarakat secara luas.

Politisasi agama melalui media sosial menjadi fenomena yang makin mengemuka, terutama pada masa-masa pra-pemilihan presiden 2024. Praktik ini menunjukkan bagaimana media sosial secara aktif dapat digunakan untuk memfasilitasi ujaran kebencian, manipulasi fakta, serta memperkuat narasi eksklusivisme kelompok tertentu (Achfandhy et al., 2024; Bagja, 2024.). Penyebaran konten yang bersifat provokatif dan intoleran melalui berbagai kanal media sosial tidak jarang memicu ketegangan antarkelompok masyarakat, bahkan pada level akar rumput. Dengan demikian, platform digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana

komunikasi, melainkan juga menjadi medium efektif dalam memperluas dan memperdalam polarisasi politik.

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial telah berlangsung secara intensif dan sistematis, sehingga memerlukan pengelolaan yang serius untuk menjaga stabilitas politik nasional. Upaya pengelolaan ini dapat dilakukan melalui kanal resmi pemerintah, pelibatan masyarakat sipil, serta optimalisasi fungsi media sosial itu sendiri sebagai sarana edukasi dan klarifikasi (Anung Wibowo, 2024.). Pemerintah, melalui badan-badan terkait, perlu meningkatkan kapasitas deteksi dini dan penanganan konten berbahaya, termasuk memperkuat kolaborasi dengan platform media sosial untuk menekan laju penyebaran disinformasi. Di sisi lain, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan agar mampu menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan.

Sikap masyarakat dalam menyikapi kebijakan pemerintah dan isu-isu publik kini sangat dipengaruhi oleh interaksi di media sosial. Opini, baik yang bersifat positif maupun negatif, dapat dengan mudah tersebar dan memengaruhi persepsi publik secara luas (Rahman & Lestari, 2024). Dalam kondisi demikian, media sosial telah berevolusi menjadi instrumen pembentuk opini publik yang sangat signifikan, bahkan mampu menggerakkan mobilisasi sosial dalam skala besar. Contohnya dapat dilihat pada gelombang aksi massa yang bermula dari viralnya isu tertentu di media sosial, yang kemudian berujung pada demonstrasi atau gerakan sosial di dunia nyata (Rumata et al., 2024).

Selain itu, media sosial juga memperkuat politik identitas digital. Narasi yang dibangun oleh buzzer, influencer, serta akun anonim sering kali berfokus pada isu-isu identitas, sehingga memicu pertempuran opini yang ditandai oleh penyebaran hoaks, disinformasi, dan kampanye hitam (Susanto et al., 2025). Praktik ini tidak hanya terjadi antar kelompok masyarakat, tetapi juga di antara pendukung calon politik tertentu, sehingga memperdalam segregasi dan memperlemah solidaritas sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam proses konsolidasi

demokrasi dan membahayakan keutuhan masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya multipihak. Pemerintah harus memastikan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Platform media sosial perlu berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menangkal konten berbahaya. Masyarakat, khususnya generasi muda, harus didorong untuk aktif mengembangkan literasi digital, berpikir kritis, dan membudayakan dialog yang sehat di ruang digital. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan industri teknologi menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem media sosial yang mendukung demokrasi, toleransi, dan inklusivitas.

Dengan demikian, walaupun media sosial telah memberikan banyak peluang dalam demokratisasi komunikasi politik, dampak negatif berupa polarisasi, penyebaran hoaks, dan penguatan politik identitas tidak dapat diabaikan. Perlu strategi komprehensif dan kolaboratif untuk mengelola platform ini agar tetap menjadi kekuatan positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan cara inilah stabilitas politik, kohesi sosial, dan demokrasi yang sehat dapat terjaga di tengah derasnya arus informasi digital saat ini..

4.2 Algoritma, Echo Chamber, dan Filter Bubble

Algoritma pada platform media sosial merupakan salah satu inovasi teknologi yang paling berdampak besar terhadap pola konsumsi informasi masyarakat modern. Algoritma ini secara khusus dirancang untuk mengidentifikasi preferensi dan perilaku pengguna berdasarkan riwayat interaksi, seperti konten yang pernah dilihat, disukai, dikomentari, atau dibagikan oleh individu tersebut (Jubba et al., 2019). Tujuan awal dari desain algoritma ini adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memastikan bahwa mereka menerima konten yang relevan dan menarik minat pribadi. Namun, di balik efisiensi tersebut, terdapat konsekuensi yang cukup serius, terutama berkenaan dengan terciptanya ruang gema

(echo chambers) dan gelembung filter (filter bubble) dalam lingkungan digital.

Fenomena echo chamber dan filter bubble merujuk pada kondisi di mana individu hanya terpapar pada informasi serta pandangan yang sejalan atau mengkonfirmasi keyakinan dan nilai yang sudah mereka miliki sebelumnya (Sitorus et al., 2024; Suhendra & Pratiwi, 2024). Dalam ruang digital yang demikian, diskursus publik menjadi sangat homogen, dan peluang untuk menerima atau mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda menjadi sangat terbatas. Secara alami, hal ini memperkuat bias konfirmasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk lebih mudah menerima dan mengingat informasi yang menguatkan pandangannya sendiri, serta mengabaikan atau menolak informasi yang bertentangan. Lebih jauh, algoritma media sosial memainkan peran kunci dalam membentuk opini politik masyarakat. Melalui proses kurasi konten yang bersifat personal dan otomatis, algoritma akan terus menyajikan konten yang serupa dengan apa yang telah disukai atau dikonsumsi oleh pengguna sebelumnya (Fatih, 2024; Sitorus et al., 2024). Akibatnya, pengguna secara tidak sadar akan terperangkap dalam lingkaran informasi yang sangat terbatas, yang didominasi oleh narasi dan opini kelompok tertentu, terutama jika pengguna cenderung mengikuti politisi, influencer, atau akun yang memiliki kecenderungan politik tertentu. Proses amplifikasi semacam ini memperkuat polarisasi opini politik, karena pengguna menjadi semakin yakin pada kebenaran sudut pandangannya sendiri tanpa pernah mendapatkan paparan yang memadai terhadap perspektif alternatif.

Fenomena filter bubble menjadi semakin kuat seiring dengan kemajuan teknologi algoritma dan meningkatnya personalisasi konten pada berbagai platform digital (“Digital Activism and Political Change: Challenges of Social Media’s Impact on Political Development,” 2024). Penelitian telah menunjukkan bahwa pengguna media sosial yang aktif cenderung memiliki jaringan pertemanan atau lingkungan virtual yang homogen secara ideologis. Akibatnya, ketika terjadi perdebatan atau

peristiwa politik yang kontroversial, narasi yang berkembang dalam ruang digital tersebut juga cenderung bersifat satu arah dan menguatkan polarisasi dalam masyarakat (Suhendra & Pratiwi, 2024). Tidak hanya itu, filter bubble juga dapat menyebabkan 'disonansi kognitif' ketika individu akhirnya dihadapkan pada informasi yang berbeda, sehingga mereka lebih mudah menolak atau bahkan menyerang sumber informasi yang dianggap berseberangan.

Dampak dari dominasi algoritma dalam membentuk ekosistem informasi ini sangat signifikan, terutama dalam konteks demokrasi dan kohesi sosial. Pertama, ruang publik yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan dan pencarian kompromi antar kelompok masyarakat berubah menjadi arena konflik narasi yang saling menegasikan. Ketika setiap kelompok hanya berinteraksi dalam ruang gema masing-masing, proses deliberasi publik menjadi terhambat dan dialog lintas kelompok menjadi langka. Kedua, keterbatasan paparan terhadap perspektif yang beragam membuat masyarakat rentan terhadap penyebaran hoaks, disinformasi, dan kampanye hitam, yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek.

Selain memperkuat polarisasi, algoritma juga berperan dalam mempercepat penyebaran isu-isu sensitif yang dapat memicu konflik horizontal di masyarakat. Konten yang bersifat emosional, provokatif, atau sensasional cenderung mendapatkan perhatian dan interaksi lebih banyak dari pengguna, sehingga secara otomatis mendapat prioritas dalam algoritma distribusi (Fatih, 2024). Hal ini menjadikan isu-isu identitas, agama, dan politik mudah dipolitisasi dan digunakan untuk memecah belah masyarakat. Tidak jarang, peristiwa-peristiwa politik besar, seperti pemilu atau pilkada, diiringi oleh maraknya penyebaran ujaran kebencian dan kampanye hitam yang didorong oleh mekanisme algoritma.

Dalam jangka panjang, keberadaan ruang gema dan filter bubble dapat mengancam kualitas demokrasi dan menghambat terbentuknya masyarakat yang toleran dan inklusif. Solusi untuk menghadapi tantangan ini tidak hanya terletak pada perubahan desain teknologi algoritma oleh

perusahaan media sosial, tetapi juga pada peningkatan literasi digital di tengah masyarakat. Pengguna harus didorong untuk aktif mencari dan membandingkan informasi dari berbagai sumber, mengembangkan sikap kritis, serta membuka diri terhadap perbedaan pandangan. Selain itu, perlu adanya regulasi yang mendorong transparansi algoritma, khususnya dalam penyajian konten politik dan informasi publik. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil harus berperan aktif dalam mengedukasi publik mengenai risiko filter bubble dan pentingnya keterbukaan informasi. Dengan demikian, media sosial dapat tetap menjadi ruang yang inklusif, dialogis, dan bermanfaat bagi penguatan demokrasi, bukan justru memperkuat polarisasi yang destruktif.

Sebagai penutup, algoritma media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini dan perilaku politik masyarakat. Fenomena ruang gema dan gelembung filter yang dihasilkan oleh mekanisme algoritma telah memperkuat polarisasi, membatasi paparan terhadap perspektif yang beragam, dan menghambat dialog yang sehat di ruang publik. Oleh karena itu, kolaborasi multi-pihak dalam mengelola dampak negatif algoritma sangat dibutuhkan untuk memastikan media sosial dapat berfungsi optimal sebagai sarana komunikasi politik yang sehat, inklusif, dan demokratis..

4.3 Penyebaran Informasi, Disinformasi, dan Hoaks

Fenomena ini semakin diperparah oleh praktik manipulasi dan pemelintiran fakta yang disebarluaskan melalui berbagai platform digital dengan tujuan membentuk persepsi negatif serta menciptakan ketegangan politik, khususnya melalui eksploitasi isu-isu SARA (Bagja, 2024.). Penyebaran disinformasi dan hoaks secara masif, terutama melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Twitter, tidak hanya merusak sentimen publik, tetapi juga mengikis legitimasi gerakan politik (“Digital Activism and Political Change: Challenges of Social Media’s Impact on Political Development,” 2024). Fakta ini menegaskan betapa krusialnya

peran media sosial dalam mempercepat polarisasi opini publik dan memfasilitasi propaganda politik, yang secara signifikan telah mengubah lanskap politik Indonesia (Bagja, 2024.; Fatih, 2024).

Penggunaan media sosial yang meluas telah menciptakan situasi di mana pengguna kesulitan memverifikasi kebenaran informasi, sehingga fakta bercampur dengan manipulasi maupun kekeliruan. Kondisi ini berdampak serius terhadap internalisasi ideologi keagamaan serta relasi antaragama (Kamal, 2022). Ditambah lagi, media sosial sebagai ruang yang relatif bebas dari kontrol negara, turut andil besar dalam kemunculan berita hoaks yang digunakan untuk memenangkan kandidat atau partai politik tertentu (Rosidi & Khotimah, 2018). Sistem rekomendasi pada media sosial, yang dirancang untuk menampilkan konten berdasarkan riwayat pencarian dan preferensi pengguna, memperkuat fenomena filter bubble dan echo chamber. Akibatnya, individu cenderung hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan politiknya dan mengabaikan perspektif lain (Ali & Eriyanto, 2021; “Peran Algoritma Media Sosial Dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu,” 2024). Penyebaran berita palsu yang didorong oleh kelompok ideologi politik ini menciptakan narasi yang bias, menghambat partisipasi politik yang positif, serta membentuk ruang gema kelompok (Wahyuni, 2021).

Oleh sebab itu, strategi penanganan disinformasi membutuhkan pendekatan multi-dimensional, seperti peningkatan literasi digital masyarakat dan pengembangan regulasi yang efektif agar penyebaran konten berbahaya dapat dikendalikan tanpa mengekang kebebasan berekspresi (“Digital Activism and Political Change: Challenges of Social Media’s Impact on Political Development,” 2024; Fatih, 2024). Dampak hoaks pun tidak hanya terbatas pada disintegrasi sosial, melainkan juga mengancam persatuan bangsa, terlebih jika isu tersebut berkaitan dengan aspek sosial-politik dan SARA (Purwantoro et al., 2021).

Realitas politik yang ditampilkan di media sosial sering kali merupakan konstruksi yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu,

dengan pembingkaihan strategis serta penggunaan gimmick politik sebagai alat manipulasi persepsi (Alfiyani, 2018). Perkembangan pesat media digital telah mengubah ekosistem komunikasi politik secara mendasar, memungkinkan diseminasi informasi yang lebih cepat, dinamis, dan terdesentralisasi (Rando & Hastuti, 2025). Walaupun media sosial menawarkan interaksi dan akses informasi yang mudah, terdapat pula dampak negatif seperti peningkatan perilaku antisosial, penyebaran kebohongan pribadi, dan maraknya perundungan siber (Hafidz, 2021). Algoritma media sosial turut memperkuat penyebaran narasi emosional dan disinformasi, sehingga otoritas fakta menjadi tergerus (Alfiyani, 2018). Dalam konteks pemilu, manipulasi narasi melalui media sosial kerap mengeksploitasi perbedaan agama, etnis, maupun identitas lokal demi meraih dukungan politik, yang pada akhirnya berpotensi memicu perpecahan sosial dan mengancam integrasi nasional (Bagja, 2024.).

Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu secara aktif merespons tantangan ini dengan merancang strategi komprehensif, mencakup penguatan literasi media, regulasi yang adaptif, serta kolaborasi dengan platform digital guna mengidentifikasi dan menekan konten yang bersifat memecah belah (Bagja, 2024.; Susanto et al., 2025). Upaya kolektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik terkait risiko propaganda digital, serta mengembangkan mekanisme verifikasi informasi yang lebih transparan (Bagja, 2024.; “Peran Algoritma Media Sosial Dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu,” 2024). Penting juga untuk mendorong pendekatan yang lebih bijak dan kritis dalam menerima serta menyebarkan informasi melalui teknologi, sehingga kemajuan digital dapat berjalan selaras dengan karakter pengguna yang bertanggung jawab (Wulandari, 2023).

Pendekatan ini meliputi peningkatan literasi digital, penguatan regulasi kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan memitigasi penyebaran hoaks serta ujaran kebencian secara dini, terutama menjelang kontestasi politik (Bagja, 2024.; Febriansyah & Muksin, 2020). Dengan demikian, mitigasi dampak negatif media sosial tidak hanya

memerlukan intervensi teknologi dan regulasi, tetapi juga transformasi budaya digital menuju penggunaan yang lebih etis dan kritis (Susanti & Nurmiati, 2022). Media sosial, dengan kemampuannya menyebarkan informasi secara cepat dan luas, telah menjadi katalisator utama dalam pembentukan serta penguatan polarisasi politik dan sosial di masyarakat (Afrianto Singgalen, 2021). Platform-platform ini secara signifikan memperparah kesenjangan budaya dengan memfasilitasi penyebaran stereotip dan informasi yang tidak akurat, sehingga memicu konflik antarbudaya dan ketegangan sosial (Farisal et al., 2024). Meski platform digital memiliki potensi untuk menyebarkan pandangan yang sempit dan berprasangka, pada saat bersamaan, ia juga memperkuat pemisahan serta polarisasi antarkelompok dengan membatasi paparan individu terhadap perspektif yang beragam (Farisal et al., 2024; Hidayah et al., 2023).

Hal ini utamanya disebabkan oleh algoritma yang cenderung menampilkan konten sesuai preferensi pengguna, menciptakan “filter bubble” dan “echo chamber” yang membatasi individu pada informasi yang konsisten dengan pandangan sendiri (Farisal et al., 2024). Akibatnya, diskusi publik menjadi semakin terfragmentasi dan empati terhadap sudut pandang yang berbeda terkikis, sehingga menghambat dialog konstruktif dan memperdalam perpecahan sosial (Farisal et al., 2024). Polarisasi ini semakin diperburuk oleh mudahnya akses informasi di internet, yang meskipun menawarkan peluang pendidikan politik, juga membawa risiko tinggi penyebaran ujaran kebencian dan hoaks yang memperkeruh situasi politik (Tinambunan, 2020). Fenomena ini sering kali dimanfaatkan oleh aktor politik untuk menggalang dukungan melalui polarisasi opini publik, sehingga memecah masyarakat berdasarkan garis ideologis dan demografis (Prasojo, 2021). Studi menunjukkan bahwa media sosial secara signifikan berkontribusi pada polarisasi politik melalui mekanisme seperti filter bubble dan echo chambers, sehingga menegaskan pentingnya program literasi media agar masyarakat dapat menavigasi platform ini secara efektif (Otieno, 2024). Penelitian juga mengindikasikan bahwa media sosial dapat meningkatkan polarisasi dengan memperkuat pandangan ekstrem, yang berdampak signifikan

terhadap diskursus publik dan kohesi sosial (Suhendra & Pratiwi, 2024). Ekosistem informasi yang terpolarisasi di media sosial memperkuat keyakinan radikal dan memperlebar kesenjangan antarkelompok (Gani et al., 2024). Bahkan, kemudahan akses terhadap informasi di media sosial, meskipun bermanfaat, secara ironis dapat memperkuat polarisasi dengan membatasi keragaman pandangan individu melalui algoritma personalisasi (Ali & Eriyanto, 2021).

Media digital, terutama media sosial, memperparah fragmentasi ini dengan mengutamakan keterlibatan pengguna dibanding deliberasi substantif, sementara algoritma YouTube dan TikTok memperkuat homogenitas konten melalui repetisi algoritmik (Ferreira & Ferreira, 2025). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep polarisasi kelompok, di mana diskusi antarpemilik pandangan serupa cenderung mengarahkan kelompok ke titik yang lebih ekstrem (Chenou & Restrepo, 2023). Kondisi ini semakin diperkuat oleh kecenderungan media sosial menciptakan lingkungan di mana individu berinteraksi dengan konten yang selaras dengan nilai serta gaya hidup mereka, sehingga memperkuat identitas kelompok dan membentuk komunitas yang homogen secara ideologis (Avci, 2024).

Dampaknya, kemampuan masyarakat untuk mencapai konsensus dalam isu-isu krusial menjadi terhambat, bahkan meningkatkan risiko konflik sosial akibat perbedaan pandangan yang semakin mendalam (Faizin et al., 2024). Selain itu, algoritma media sosial berperan sentral dalam membentuk persepsi publik, khususnya di bidang politik, dengan menciptakan “filter bubble” dan “echo chamber” yang membatasi pengguna pada pandangan yang selaras dengan keyakinan mereka (“Peran Algoritma Media Sosial Dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu,” 2024; Rum et al., 2023). Dengan demikian, perlu upaya sistematis lintas sektor untuk mengurangi dampak negatif media sosial terhadap polarisasi, baik melalui pendidikan literasi digital, regulasi adaptif, maupun pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini hoaks dan

ujaran kebencian, sehingga tercipta ekosistem digital yang lebih sehat dan konstruktif bagi kohesi sosial dan demokrasi.

4.4 Studi Kasus: Dinamika Polarisasi di Media Sosial Indonesia

Studi kasus ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pola polarisasi yang terbentuk dan berkembang di platform media sosial di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor budaya, politik, dan demografi yang khas di negara ini. Dengan pendekatan komprehensif, analisis akan difokuskan pada identifikasi narasi polarisasi yang dominan, pemetaan peran aktor kunci—termasuk influencer digital, buzzer, dan kelompok kepentingan—serta evaluasi dampak interaksi daring terhadap kohesi sosial dan stabilitas politik dalam konteks Indonesia (Suhendra & Pratiwi, 2024). Studi ini secara khusus akan menyoroti perubahan polarisasi afektif di Indonesia, yang awalnya berakar pada preferensi kepribadian namun kini semakin bergeser menjadi pengelompokan ideologis yang didorong oleh ekosistem media digital (Munandar et al., 2025).

Pemilihan Umum 2024 menjadi titik krusial dalam memahami dinamika polarisasi di media sosial, terutama di platform seperti Instagram yang sangat populer di kalangan pemilih muda. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana interaksi sosial di Instagram dan media sosial lainnya memicu polarisasi politik, memperdalam wacana yang terfragmentasi, serta membentuk persepsi publik secara masif (Munandar et al., 2025; Sitorus et al., 2024). Dalam konteks ini, narasi digital yang berkembang sering kali diarahkan oleh kelompok-kelompok dengan agenda tertentu, sementara algoritma media sosial berperan sebagai penguat opini dan filter informasi.

Buku referensi ini akan mengidentifikasi mekanisme penyebaran informasi yang berkontribusi terhadap polarisasi selama masa kontestasi politik, mulai dari viralitas konten, keterlibatan buzzer dan influencer, hingga strategi amplifikasi narasi oleh kelompok kepentingan. Salah satu aspek sentral yang akan dikaji adalah bagaimana algoritma media sosial

membentuk “kamar gema” (echo chamber) dan “gelembung filter” (filter bubble) yang mempersempit spektrum informasi yang diterima pengguna sehari-hari (Ali & Eriyanto, 2021; Ridzki, 2024). Mekanisme ini tidak hanya membatasi paparan pengguna terhadap pandangan yang beragam, tetapi juga memperkuat bias konfirmasi melalui seleksi dan amplifikasi konten yang sesuai dengan preferensi dan perilaku sebelumnya (Dutta et al., 2025; Gupta & Bansal, 2024; Suhendra & Pratiwi, 2024).

Fenomena filter bubble dan echo chamber yang dihasilkan algoritma media sosial telah mendapat banyak perhatian dalam berbagai studi, yang menunjukkan bahwa kecenderungan pengguna untuk hanya terpapar pada pandangan sejalan membuat polarisasi opini publik semakin tajam (Suhendra & Pratiwi, 2024). Hal ini menegaskan bahwa platform digital tidak sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga aktor penting yang membentuk lanskap politik, memengaruhi proses polarisasi, dan bahkan mengarahkan pilihan politik individu (Sitorus et al., 2024). Sebagai contoh konkret, riset membuktikan adanya polarisasi politik di Indonesia, di mana pengguna media sosial terbagi ke dalam kelompok pro dan anti-Joko Widodo, dengan hipotesis bubble filter dan selective exposure terbukti valid (Ali & Eriyanto, 2021). Pola ini juga terlihat dalam diskursus politik saat pemilu, di mana narasi yang berkembang dan viral di media sosial sering kali berujung pada pembentukan kubu-kubu yang saling berseberangan secara ekstrem, sehingga mempersempit ruang dialog dan kompromi.

Studi ini juga akan menyoroti peran media sosial dalam pembentukan identitas politik dan komunikasi politik selama Pemilu 2024, terutama melalui narasi digital yang digerakkan oleh buzzer, influencer, serta akun anonim. Praktik seperti disinformasi, propaganda, dan pembunuhan karakter politik semakin jamak dijumpai, memperkuat polarisasi sosial dan memengaruhi perilaku pemilih (Puspita et al., 2024; Susanto et al., 2025). Pengaruh kampanye negatif terhadap perilaku pemungutan suara, partisipasi politik, serta hasil pemilihan menjadi aspek penting dalam

kajian ini, mengingat masifnya perhatian media dan intensitas kampanye di platform digital (Solehudin et al., 2024).

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini meliputi analisis konten dan analisis jaringan media sosial (social network analysis/SNA). Analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi pola komunikasi, sentimen, serta topik utama yang muncul selama periode kampanye. Sementara itu, analisis jaringan akan membantu memetakan struktur interaksi dan distribusi pengaruh di antara aktor-aktor digital (Alhuda, 2025; Ruslan et al., 2023). Kombinasi metode ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana interaksi daring, struktur jaringan, dan kekuatan narasi digital berkontribusi pada fragmentasi diskursus politik dan polarisasi sosial di Indonesia (Afrianto Singgalen, 2021).

Secara khusus, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak algoritma media sosial yang, meskipun dirancang untuk personalisasi, justru mempersempit spektrum informasi melalui penciptaan filter bubble dan echo chamber (Ahmad, 2022; Hasfi, 2019). Situasi ini menyebabkan pengguna lebih mudah menerima pandangan yang homogen dan mengabaikan perspektif berbeda, sehingga memperkuat polarisasi. Selain itu, media sosial juga terbukti meningkatkan partisipasi politik, namun di sisi lain berkontribusi pada penyebaran propaganda dan polarisasi melalui praktik mikrotargeting dan disinformasi (Fatmah, 2025; Miarta, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa intensitas penggunaan aplikasi digital berkorelasi dengan perubahan tren popularitas isu politik berdasarkan norma subjektif dan persepsi kemudahan penggunaan, yang kemudian memengaruhi sentimen publik (Afrianto Singgalen, 2021). Dalam konteks Pemilu 2024, analisis sentimen publik terhadap hasil pemilihan melalui media sosial menjadi penting untuk memahami dinamika politik, respons masyarakat, serta bagaimana narasi digital memengaruhi persepsi dan tindakan warganet (Tarigan et al., 2025).

Dengan demikian, studi ini menegaskan pentingnya analisis metode dan algoritma dalam mengkaji sentimen serta opini publik yang terbentuk

di media sosial, khususnya dalam konteks kontestasi politik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi literasi digital, pengelolaan media sosial yang lebih sehat, serta pemahaman yang lebih baik tentang dinamika polarisasi politik di era digital di Indonesia (Afrianto Singgalen, 2021; Sukmawati & Fatmawati, 2023). Pendekatan interdisipliner dalam penelitian ini menjadi kunci untuk mengurai kompleksitas polarisasi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif guna memperkuat kohesi sosial dan demokrasi di tengah tantangan transformasi digital..



BAB 5

MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL DI ERA DIGITAL

5.1 Teori dan Pendekatan Manajemen Konflik

Memahami konflik sosial dalam konteks digital memerlukan pendekatan yang komprehensif, khususnya dengan meninjau ulang teori-teori manajemen konflik tradisional dan menyesuaikannya terhadap karakteristik unik yang melekat pada ruang siber. Di era digital, dinamika konflik tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan dipengaruhi oleh anonimitas, kecepatan penyebaran informasi, serta cakupan global yang menjadi ciri khas utama platform digital. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner menjadi penting untuk mengeksplorasi bagaimana dinamika konflik berkembang dan direspon dalam ekosistem digital.

Anonimitas di dunia digital memungkinkan individu untuk mengekspresikan opini—termasuk yang kontroversial dengan risiko sosial yang lebih rendah. Hal ini berkontribusi pada peningkatan intensitas konflik, karena pengguna sering kali terdorong untuk bertindak lebih berani atau ekstrem dibandingkan interaksi di dunia nyata. Selain itu,

kecepatan dan jangkauan distribusi informasi di media digital, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan, memfasilitasi eskalasi konflik dalam waktu singkat, melampaui batas geografis dan kultural. Dalam konteks ini, teori manajemen konflik klasik seperti Thomas-Kilmann Model atau teori konflik sosial Lewis Coser perlu diadaptasi dengan memasukkan variabel-variabel digital seperti viralitas, algoritma, dan jejaring daring.

Etika komunikasi digital menjadi aspek penting yang harus dianalisis dalam menghadapi konten sensitif dan kontroversial. Literasi etika digital, yang menekankan pada kesadaran akan tanggung jawab moral dalam menggunakan teknologi informasi, dapat menjadi instrumen utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi dari perilaku daring yang tidak etis (Luthfia et al., 2025). Penguatan literasi ini penting agar masyarakat mampu memilah informasi, menghargai perbedaan, serta meminimalisasi potensi konflik yang destruktif di dunia maya. Dengan demikian, literasi etika digital berperan sebagai fondasi dalam membangun budaya komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab di ruang digital.

Selain aspek etika, peran algoritma dalam memperkuat atau memperlemah konflik digital juga sangat signifikan. Algoritma yang dirancang untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan topik diskusi sering kali tanpa disadari memperkuat bias pengguna, membatasi paparan terhadap perspektif beragam, dan akhirnya memperburuk konflik sosial (Afrianto Singgalen, 2021). Hal ini terjadi karena algoritma cenderung merekomendasikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga membentuk 'filter bubble' dan 'echo chamber' yang menghambat dialog lintas kelompok. Akibatnya, pengguna lebih mudah terjebak dalam lingkaran narasi homogen yang memperkuat pandangan ekstrem dan polarisasi sosial.

Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang Natural Language Processing (NLP), memungkinkan analisis data media sosial secara otomatis untuk mengidentifikasi pola bahasa dan sentimen pengguna. Analisis sentimen berbasis NLP dapat mengekstraksi informasi emosional,

opini, dan persepsi masyarakat dalam skala besar dan waktu nyata (Luthfia et al., 2025). Hal ini sangat berguna untuk memahami dinamika percakapan publik, mengidentifikasi isu-isu yang memicu konflik, serta mendeteksi potensi eskalasi konflik sosial di ruang maya. Pendekatan ini juga relevan untuk menganalisis sentimen terhadap isu-isu pembangunan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, serta mengkaji dampak komunikasi politik terhadap kondisi ekonomi dan sosial (Afrianto Singgalen, 2021).

Penelitian ini akan memanfaatkan data dari berbagai platform media sosial untuk mengidentifikasi tren penggunaan, isu-isu populer, dan polarisasi yang muncul selama periode tertentu, misalnya terkait Pemilu 2024 di Indonesia (Permana et al., 2024; Prayudi et al., 2025). Analisis ini penting untuk mengetahui bagaimana opini publik terbentuk dan berkembang dalam perdebatan politik daring. Dengan demikian, kajian ini akan menggunakan pendekatan multidisipliner, menggabungkan wawasan dari ilmu komunikasi, psikologi sosial, ilmu politik, dan ilmu komputer, guna menyusun kerangka kerja komprehensif dalam menganalisis konflik digital secara holistik (Suhendra & Pratiwi, 2024).

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat penting dalam mengembangkan program dan inisiatif yang mendorong resolusi konflik konstruktif di era digital (Hidayah et al., 2023). Upaya ini harus difokuskan pada penguatan literasi etika digital secara kolaboratif, agar ruang digital di Indonesia menjadi lebih etis, inklusif, dan bertanggung jawab (Amril & Sazali, 2025). Pengembangan kerangka teoretis integratif juga diperlukan untuk memahami interaksi antara komunikasi digital, pembentukan opini publik, dan konteks sosial-politik yang lebih luas (Suhendra & Pratiwi, 2024).

Studi lebih lanjut perlu mengidentifikasi kesenjangan riset, terutama terkait keterlibatan aktif masyarakat dalam proses resolusi konflik digital. Salah satu aspek penting adalah bagaimana platform digital dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi dialog lintas kelompok dan kolaborasi

sosial, bukan sekadar sebagai arena polarisasi (Hidayah et al., 2023). Model-model prediktif berbasis analisis sentimen dan pencarian teks yang terintegrasi dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika opini publik secara real-time, khususnya dalam konteks pemilihan umum dan peristiwa besar lainnya (Baharuddin et al., 2022).

Penelitian di masa depan hendaknya tidak hanya mengandalkan analisis data pasif, tetapi juga mengeksplorasi strategi intervensi digital yang bertujuan untuk memediasi dan meredakan konflik daring yang tereskalasi (Tumanggor & Sazali, 2025; Vu et al., 2025). Oleh karena itu, studi komparatif lintas budaya dan platform sangat dibutuhkan untuk mengungkap variasi dinamika pembentukan opini dan konflik dalam berbagai konteks sosial dan teknologi, serta untuk mengembangkan model teoretis yang lebih komprehensif dan aplikatif (Suhendra & Pratiwi, 2024). Akhirnya, memahami konflik sosial di era digital menuntut integrasi teori tradisional dengan pendekatan baru yang relevan bagi ekosistem digital. Dengan kombinasi analisis teknologi, literasi etika, dan kolaborasi multi-stakeholder, diharapkan tercipta solusi inovatif yang mampu mendorong resolusi konflik yang konstruktif dan memperkuat kohesi sosial di era transformasi digital yang semakin kompleks..

5.2 Strategi Preventif dalam Mengelola Konflik

Strategi preventif dalam pengelolaan konflik digital menuntut pendekatan yang komprehensif dengan titik berat pada penguatan literasi digital dan etika komunikasi. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif mengenai batasan kebebasan berekspresi di ruang digital, terutama di tengah meningkatnya eskalasi konflik yang dipicu oleh rendahnya literasi digital dan multitafsirnya regulasi yang ada (Tumanggor & Sazali, 2025; Marpaung & Sazali, 2025). Literasi digital yang kritis menjadi esensial agar individu mampu mengenali dan memitigasi konten yang berpotensi radikal, bias, maupun menyesatkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen konflik modern yang menekankan

pentingnya pemahaman akurat terhadap sumber informasi (Gani et al., 2024; Sugitanata & Ridwan, 2024).

Penguatan literasi etika digital tidak hanya terbatas pada pemahaman teknis, melainkan juga mencakup penanaman sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial (Amril & Sazali, 2025). Hal ini menjadi pondasi dalam menciptakan ruang digital yang sehat, di mana setiap individu mampu menimbang dampak dari setiap tindakan daring, serta membudayakan perilaku komunikasi yang menghormati norma sosial dan moral. Literasi etika digital juga mendorong individu untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten yang berwawasan kebangsaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.

Strategi preventif ini harus didukung oleh reformasi regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif dalam menangani penyebaran informasi ekstrem. Reformasi regulasi diperlukan untuk mengurangi dampak negatif amplifikasi algoritma yang kerap memprioritaskan konten emosional dan provokatif, sehingga mempercepat penyebaran narasi yang dapat memicu polarisasi maupun konflik (Amril & Sazali, 2025). Selain itu, penerapan mekanisme moderasi pada platform media sosial menjadi sangat krusial. Moderasi yang efektif, baik berbasis kecerdasan buatan (AI) maupun didukung oleh moderator manusia, dapat mendeteksi, menanggulangi, serta menurunkan risiko eskalasi konten berbahaya secara lebih cepat dan terukur (Araghi et al., 2025; Luthfia et al., 2025). Penguatan kapasitas moderasi juga harus disertai pelatihan berkelanjutan bagi para moderator agar mampu melakukan intervensi secara tepat dalam meredam konflik daring. Penggunaan teknologi AI dalam moderasi konten dapat membantu dalam penyaringan awal terhadap ujaran kebencian, hoaks, dan konten ekstrem, sehingga moderator manusia dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang membutuhkan penilaian etis dan kontekstual secara mendalam.

Selain itu, strategi preventif harus mencakup upaya mengatasi polarisasi informasi yang marak di ruang digital, khususnya pada isu-isu sensitif seperti agama dan identitas sosial. Penguatan dialog lintas agama dan budaya di media sosial menjadi sangat penting sebagai bagian dari langkah

mitigasi radikalisasi dan polarisasi (Gani et al., 2024). Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan strategis dalam mengampanyekan literasi digital, menyebarkan informasi positif tentang harmoni beragama, serta memperluas jangkauan edukasi melalui kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk lembaga pendidikan, komunitas digital, dan organisasi masyarakat sipil (Humaizi et al., 2024).

Penting pula untuk melibatkan kaum muda dalam upaya edukasi dan advokasi harmoni antaragama di ruang digital. Generasi muda memiliki peran sentral dalam membentuk masa depan kehidupan sosial, sehingga keterlibatan mereka dalam gerakan literasi digital dan moderasi beragama akan berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan harmoni sosial (Humaizi et al., 2024). Pemerintah, tokoh agama, dan individu perlu berperan aktif dalam mengantisipasi dan mengelola risiko konflik di ruang digital, termasuk media sosial, dengan mengedepankan sikap hati-hati, pengendalian diri, dan kesadaran akan potensi dampak dari setiap tindakan daring (Rahyudidwiputra et al., 2024).

Masyarakat secara keseluruhan juga dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan sosial akibat globalisasi dan kemajuan teknologi digital, dengan menjadi konsumen informasi yang bijaksana, logis, dan berimbang. Kemampuan untuk memverifikasi informasi secara mandiri serta membedakan antara fakta dan opini menjadi keterampilan kunci dalam menghindari terjebak dalam arus konflik siber (Khainuddin & Huda, 2022). Pendekatan inklusif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemuka agama, influencer digital, dan lembaga pendidikan, sangat diperlukan untuk membangun budaya verifikasi informasi dan moderasi beragama di kalangan generasi muda (Humaizi et al., 2024; Rahmawati et al., 2023).

Secara keseluruhan, strategi preventif dalam pengelolaan konflik digital harus mengintegrasikan penguatan literasi digital, pembaruan regulasi, optimalisasi teknologi moderasi, serta pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, ruang digital Indonesia dapat dikembangkan menjadi ekosistem yang lebih etis, inklusif, dan tangguh

terhadap berbagai potensi konflik, sekaligus memperkuat kohesi sosial dan harmoni di tengah keragaman masyarakat.

5.3 Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Institusi

Peran kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan serta keagamaan menjadi sangat krusial dalam membentuk ekosistem digital yang harmonis dan resilien di era disrupsi teknologi informasi saat ini. Pemerintah, sebagai regulator dan fasilitator, memiliki tanggung jawab utama untuk merumuskan kebijakan progresif yang mendukung penguatan pendidikan digital dan pengawasan konten daring. Hal ini sejalan dengan kebutuhan adaptasi kurikulum, khususnya kurikulum Pendidikan Agama Islam, agar lebih responsif terhadap tantangan serta tuntutan era digital (2025). Pengembangan kerangka regulasi yang menekankan tanggung jawab platform digital dalam menekan penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian sangat dibutuhkan, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang konstruktif dan bertanggung jawab (Luthfia et al., 2025).

Pemerintah juga perlu meluncurkan program literasi digital yang komprehensif, bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah, menyaring, dan mengenali informasi yang berpotensi memecah belah. Langkah ini dapat diwujudkan melalui kerja sama lintas kementerian, lembaga pendidikan, serta kolaborasi dengan platform digital untuk mendukung edukasi publik secara berkelanjutan (Arifin et al., 2024, 2025). Selain itu, pelibatan masyarakat dalam dialog konstruktif di ruang digital menjadi pilar penting untuk membangun budaya diskusi yang sehat. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan konten yang tidak pantas, menghindari penyebaran hoaks, serta mempraktikkan etika digital dalam interaksi daring sehari-hari (Luthfia et al., 2025).

Institusi, khususnya lembaga pendidikan dan keagamaan, berperan vital dalam mengintegrasikan literasi digital serta nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Kurikulum yang adaptif harus membekali generasi muda dengan pemahaman agama

yang benar, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan menavigasi tantangan konten digital yang beragam dan kompleks (Pernanda & Holid, 2024, 2025). Integrasi literasi digital religius bertujuan membangun daya tahan individu Muslim terhadap arus informasi negatif, mengajarkan kemampuan memilah, memproses, dan menerima konten positif sekaligus menolak narasi-narasi intoleran dan ekstrem (Athoillah et al., 2023).

Kolaborasi lintas institusi menjadi salah satu strategi kunci. Institusi pendidikan, tokoh agama, dan lembaga teknologi perlu berinovasi dalam mengembangkan metode dakwah digital yang relevan dengan dinamika media sosial, serta memperkuat program pendidikan berkelanjutan bagi siswa dan masyarakat umum. Inisiatif ini dapat berupa pengajaran literasi digital, pemanfaatan konten multimedia yang berorientasi pada toleransi, serta pelatihan keterampilan verifikasi informasi daring (Jinan, 2008; Baihaki, 2020; Rahmawati et al., 2023). Hal ini sejalan dengan Gerakan Moderasi Beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berfokus pada penguatan toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat (Mursalat & M, 2024). Kementerian Agama telah aktif mendorong moderasi beragama melalui berbagai kebijakan dan program, terutama dalam merespons tantangan konflik antarumat beragama, radikalisme, serta penyebaran paham keagamaan transnasional di ranah digital (Taufiq & Alkholid, 2021). Reformulasi kurikulum di perguruan tinggi keagamaan menjadi langkah strategis untuk memasukkan mata kuliah relevan, seperti tasawuf, sejarah peradaban Islam, serta pengarusutamaan moderasi beragama di ruang digital. Upaya ini bertujuan membangun narasi penyeimbang terhadap informasi keagamaan yang kaku dan cenderung eksklusif.

Peningkatan kualitas pendidikan agama menjadi faktor kunci untuk membekali generasi muda dengan pemahaman Islam yang moderat, toleran, dan inklusif, sekaligus memperkuat kemampuan digital mereka agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda ekstremisme. Program edukasi nilai-nilai moderasi juga harus menekankan pentingnya dialog lintas agama serta penanaman prinsip verifikasi informasi sebelum

menyebarkan atau menanggapi isu-isu sensitif di ruang publik digital (Ikhwan et al., 2023). Selain upaya formal, keterlibatan kaum muda dalam kampanye digital moderasi beragama juga sangat penting. Generasi muda yang aktif di media sosial dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan narasi positif dan mendorong terciptanya ruang digital yang damai serta toleran. Program pelatihan, workshop literasi digital, serta advokasi berbasis komunitas perlu diperluas untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, khususnya di lingkungan pendidikan dan komunitas keagamaan.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan maupun keagamaan harus diarahkan pada pembentukan ekosistem digital yang harmonis dan resilien. Implementasi kebijakan yang progresif, penguatan literasi digital religius, serta integrasi nilai-nilai moderasi dalam pendidikan akan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga dewasa secara moral dan spiritual, sehingga mampu menghadapi tantangan dan risiko polarisasi di era digital dengan bijaksana..

5.4 Literasi Digital dan Edukasi Publik

Peningkatan literasi digital publik menjadi faktor yang sangat krusial, terutama dalam konteks penyaringan informasi keagamaan di era digital. Rendahnya literasi digital masyarakat terbukti memperparah ancaman ideologis dan memudahkan penyebaran disinformasi maupun ujaran kebencian berbasis agama (2025). Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan mengidentifikasi, memverifikasi, serta menolak informasi yang menyesatkan dan memecah belah, khususnya yang tersebar melalui platform digital (Prasetyo et al., 2025).

Program edukasi ini harus mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam menilai sumber informasi, mengenali bias dan framing yang tersembunyi dalam narasi digital, serta mengidentifikasi ciri-ciri narasi radikal yang kerap menggunakan dikotomi sempit

seperti kafir-beriman atau halal-haram (2025). Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan pemahaman keberagaman dalam masyarakat pluralistik. Hal ini tidak hanya mempersiapkan individu untuk berinteraksi secara konstruktif di ruang publik digital, tetapi juga berkontribusi dalam menangkal polarisasi yang sering kali didorong oleh ekstremisme daring (Rolando et al., 2024).

Dialog antaragama dan penghargaan terhadap keberagaman pandangan perlu menjadi bagian integral dari program literasi digital. Pendidikan kewarganegaraan dapat diperkuat untuk menanamkan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan antiradikalisme sejak dini. Kebijakan sekolah dan kurikulum operasional harus mendukung pencegahan radikalisme melalui integrasi nilai-nilai moderasi, baik dalam pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler (Darraz, 2024). Dengan demikian, upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pendidikan formal dan nonformal.

Intervensi dini di lingkungan komunitas, termasuk sekolah dan madrasah, dapat dilakukan dengan mendeteksi dan mengidentifikasi gejala radikalisme atau ekstremisme pada individu yang rentan, kemudian memberikan dukungan positif untuk pengalihan perilaku (Darraz, 2024). Pencegahan radikalisme menuntut integrasi nilai-nilai luhur universal dalam seluruh aspek kehidupan sekolah, mulai dari kebijakan internal, aktivitas pembelajaran, hingga bimbingan konseling. Lingkungan pendidikan harus diciptakan agar inklusif dan aman, memungkinkan siswa mengembangkan pemikiran kritis, kemandirian, dan kemampuan menolak ideologi ekstrem secara argumentatif dan rasional (Darraz, 2024).

Penguatan kompetensi digital para guru juga merupakan komponen penting dari strategi pencegahan radikalisme di sekolah. Guru harus dibekali dengan keterampilan literasi digital yang mencakup akses, seleksi, analisis, dan evaluasi informasi digital. Pelatihan khusus bagi guru Pendidikan Agama Islam sangat diperlukan untuk mendeteksi indikasi awal pemikiran radikal di lingkungan siswa, mengelola konflik,

serta memperkuat narasi Islam wasathiyah atau Islam moderat (Hibana & Surahman, 2021; 2025). Dengan demikian, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan pelindung siswa dari pengaruh ideologi yang menyimpang.

Pemerintah dan lembaga pendidikan memegang peran sentral dalam mendukung dan mengimplementasikan strategi-strategi ini agar tercipta pemahaman inklusif dan toleran di tengah masyarakat multikultural (Yasin & Rahmadian, 2024). Hal ini sangat penting mengingat radikalisme telah menyusup ke berbagai sektor, termasuk pendidikan. Data penelitian bahkan menunjukkan bahwa hampir 48,9% siswa cenderung menerima pandangan radikal (Ma`arif et al., 2024). Oleh sebab itu, revitalisasi kurikulum pendidikan agama menjadi sangat mendesak, dengan penekanan pada internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dan literasi digital untuk membendung penyebaran ideologi radikal, khususnya di kalangan pelajar (Abdiyantoro et al., 2023).

Integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum pendidikan Islam dan pelatihan guru harus dilakukan secara komprehensif dan kontekstual. Materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan realitas digital yang dihadapi siswa, sehingga mereka mampu memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip toleransi, dialog, serta verifikasi informasi dalam kehidupan sehari-hari (Arifin et al., 2023; Saputra & Mubin, 2021). Selain itu, pelatihan guru harus dirancang agar mampu meningkatkan kemampuan pedagogis sekaligus kepekaan sosial, sehingga mereka dapat merespons dinamika sosial-keagamaan siswa secara tepat.

Secara keseluruhan, penguatan literasi digital publik, revitalisasi kurikulum pendidikan agama, dan pengembangan kompetensi guru merupakan pilar utama dalam pencegahan radikalisme dan intoleransi berbasis digital. Upaya ini tidak hanya bertujuan membentengi masyarakat dari ancaman ideologi ekstremis, tetapi juga membangun generasi muda yang toleran, kritis, dan adaptif dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga menjadi kunci keberhasilan

untuk menciptakan ekosistem sosial yang inklusif, harmonis, dan berdaya tangkal tinggi terhadap radikalisme di dunia maya maupun dunia nyata..

5.5 Kolaborasi Lintas Sektor dalam Resolusi Konflik

Pendekatan kolaboratif dalam pencegahan dan penanggulangan radikalisme berbasis digital menjadi sangat penting di tengah tantangan kompleksitas ideologi ekstrem di masyarakat modern. Kolaborasi ini mencakup sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan tokoh agama untuk menciptakan ekosistem sosial yang mendukung nilai-nilai moderasi sekaligus menangkal penyebaran ekstremisme. Implementasi pendekatan ini perlu dirancang secara holistik dan terstruktur, mulai dari perumusan kebijakan makro, pengembangan kurikulum pendidikan, hingga pelibatan aktif masyarakat dalam membangun budaya toleransi dan inklusivitas.

Dalam konteks pendidikan, kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan kurikulum pembelajaran yang menekankan pentingnya toleransi, pemahaman mendalam terhadap Pancasila, serta penguatan nilai-nilai keindonesiaan. Kurikulum ini tidak hanya terbatas pada pembelajaran intrakurikuler, tetapi juga diperluas melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang menumbuhkan sikap inklusif, rasa hormat terhadap perbedaan, dan keterampilan dialog antaragama (Arifin et al., 2023; Mubarak & Bakri, 2021; Prasetyo et al., 2025). Melalui aktivitas seperti diskusi lintas agama, permainan peran, dan proyek sosial, siswa dapat membangun empati serta memperkuat wawasan kebangsaan sebagai benteng terhadap radikalisme.

Efektivitas pendekatan kolaboratif juga tercermin dalam penetapan rencana strategis bersama yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pengambilan keputusan secara partisipatif terbukti mampu mengurangi konflik internal dan meningkatkan kepercayaan antara lembaga pendidikan, masyarakat, serta pemerintah (Kamaludin, 2022). Selain itu, sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan untuk mengembangkan platform

digital yang dapat mempromosikan konten-konten moderat, kontra-narasi terhadap ideologi ekstrem, serta menyediakan materi edukasi yang relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan digital (2025).

Pelatihan bersama yang melibatkan pendidik, pemuka agama, dan komunitas digital juga penting dalam meningkatkan kapasitas identifikasi, deteksi dini, serta mitigasi ancaman radikalisme digital. Program penguatan kapasitas ini tidak hanya fokus pada aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga pada penguatan wawasan kebangsaan, nilai-nilai toleransi, dan keterampilan berpikir kritis untuk menyeleksi informasi serta narasi yang beredar di dunia maya. Pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sipil harus berkolaborasi secara kolektif dalam mempromosikan moderasi beragama sebagai solusi proaktif untuk mencegah konflik dan radikalisasi (Hilal, 2023; Messakh et al., 2023). Upaya ini, misalnya, dapat diwujudkan melalui kampanye nasional literasi digital, penyuluhan lintas agama, hingga pelatihan kader moderasi di tingkat komunitas yang mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing.

Strategi ini sejalan dengan pengalaman berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat—seperti *tasamuh* (toleransi), *tawassuth* (moderat), dan *i'tidal* (adil)—ke dalam pendidikan formal sebagai benteng melawan ideologi ekstremis (Ma'arif et al., 2024). Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi penguatan moderasi beragama sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat pada berbagai inisiatif Kementerian Agama Republik Indonesia yang secara aktif mengarusutamakan nilai-nilai moderasi baik melalui kebijakan, pelatihan, maupun kolaborasi dengan komunitas lintas agama (Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Membangun Moderasi Beragama: Studi Kasus Kemenag Bali, Masjid Ibnu Batutah, Dan Desa Pegayaman, 2024.). Implementasi konsep moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, sangat vital untuk membentuk karakter inklusif dan keterbukaan berpikir terhadap keberagaman (Mufida & Mustolehudin, 2020, 2025). Selain integrasi nilai-nilai tersebut pada pelajaran Pendidikan

Agama Islam, mata pelajaran lain seperti Pendidikan Kewarganegaraan juga perlu diperkuat dengan materi tentang toleransi, dialog lintas budaya, serta penanaman semangat Pancasila sebagai ideologi pemersatu.

Penguatan ekosistem digital yang mendukung nilai-nilai moderasi juga dilakukan melalui pengembangan platform digital yang mendiseminasi konten edukatif, kontra-narasi terhadap ekstremisme, dan menyediakan ruang dialog yang aman serta inklusif. Program literasi digital yang terintegrasi dengan pelatihan nilai-nilai moderasi dapat membekali masyarakat, khususnya generasi muda, dengan kemampuan memilah informasi dan menghindari narasi radikal maupun intoleran. Di sisi lain, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program-program ini menjadi sangat penting. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dan masyarakat perlu melakukan asesmen dampak, memperbaiki strategi, serta menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan tokoh agama akan memperkuat daya tahan bangsa terhadap ancaman radikalisme dan ekstremisme di era digital. Sinergi ini tidak hanya mendorong terciptanya masyarakat yang toleran, inklusif, dan demokratis, tetapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis di tengah keberagaman. Dengan demikian, pendekatan kolaboratif menjadi fondasi utama bagi pencegahan radikalisme dan penguatan moderasi beragama dalam ekosistem digital Indonesia yang terus berkembang.



BAB 6

TANTANGAN DAN PELUANG DI MASA DEPAN

6.1 Tantangan Manajemen Konflik di Era Teknologi

Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi digital memang membuka peluang besar untuk diseminasi informasi yang bersifat moderat dan edukatif. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan signifikan dalam manajemen konflik sosial, khususnya karena potensi penyebaran narasi radikal yang sangat cepat dan meluas melalui media sosial (2025). Dinamika ini menuntut adanya strategi manajemen konflik yang adaptif dan proaktif, dengan mengoptimalkan kecerdasan buatan (AI) dan analitik data untuk mendeteksi pola penyebaran radikalisme digital serta memberikan respons yang efektif dan terintegrasi.

Salah satu langkah strategis adalah pengembangan sistem deteksi dini berbasis AI yang mampu mengidentifikasi ujaran kebencian, disinformasi, dan propaganda ekstremis secara real-time. Teknologi ini tidak hanya memudahkan proses moderasi konten di berbagai platform

digital, tetapi juga dapat mendorong intervensi cepat dari pemangku kepentingan untuk menghentikan penyebaran konten berbahaya sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas (Andini et al., 2024; Luthfia et al., 2025). Misalnya, algoritma canggih seperti XLM-RoBERTa telah terbukti efektif dalam analisis sentimen dan klasifikasi opini warganet terkait isu sensitif, sehingga memberikan landasan bagi respons kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Namun, teknologi saja tidak cukup. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pakar teknologi, sosiolog, psikolog, dan agamawan sangat penting untuk menghasilkan solusi komprehensif dalam membendung arus radikalisme daring (2025). Sinergi ini menjadi semakin relevan mengingat penyebaran ideologi radikal melalui media sosial bukan hanya ancaman teknis, tetapi juga sosial-budaya, terutama bagi generasi muda yang sangat rentan terhadap paparan informasi ekstrem dan manipulatif (Gani et al., 2024, 2025). Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan etika bermedia sosial harus menjadi prioritas utama, guna meningkatkan kesadaran kolektif tentang batas kebebasan berekspresi dan pentingnya menjaga norma sosial-moral saat menanggapi isu sensitif di ruang digital (Luthfia et al., 2025).

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum mereka, dengan menekankan aspek toleransi, antikekerasan, dan penghormatan terhadap keragaman (Hanif et al., 2025). Ini menjadi model yang dapat diadopsi oleh institusi pendidikan lain untuk membangun karakter peserta didik agar lebih resilien terhadap pengaruh ekstremisme digital. Peningkatan literasi digital untuk guru dan siswa menjadi aspek kunci, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk menyaring dan menanggapi konten ekstremis secara efektif (2025).

Pengembangan model kurikulum terintegrasi yang memperkuat moderasi beragama dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak sangat dibutuhkan. Kurikulum ini harus mampu mengembangkan karakter dan moral peserta didik, serta membekali mereka dengan keterampilan

berpikir kritis dalam menghadapi informasi yang beredar di dunia maya (Kosim et al., 2024). Selain itu, pentingnya pengembangan alat deteksi ujaran kebencian berbasis AI juga tak dapat diabaikan sebagai respons terhadap tantangan global dalam memerangi penyebaran konten negatif di berbagai platform digital (Andini et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa media sosial kerap menjadi sarana utama penyebaran propaganda ekstrem dan rekrutmen daring, sehingga upaya moderasi menjadi kian kompleks (Gani et al., 2024; Messakh et al., 2023). Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat sipil menjadi esensial dalam mempromosikan literasi digital yang kuat dan membekali individu dengan keterampilan kritis untuk mengenali serta menolak konten berbahaya di dunia maya (Athoillah et al., 2023). Program pelatihan literasi digital dan etika bermedia sosial yang berkelanjutan harus dirancang untuk memperluas jangkauan edukasi dan memastikan masyarakat tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi. BNPT juga merekomendasikan narasi kontra-radikalisme yang bersifat moderat dan tidak provokatif di media sosial, sebagai upaya melindungi generasi muda dari paparan ideologi ekstremis (Ilyas et al., 2025). Selain itu, penerapan teknologi AI untuk deteksi dini ujaran kebencian dan konten ekstremis akan mempercepat proses identifikasi serta moderasi konten berisiko, sehingga mitigasi dampak negatif dapat dilakukan secara efisien (Andini et al., 2024; Luthfia et al., 2025).

Pada akhirnya, pendekatan multidisipliner yang memadukan resistansi algoritmik, reformasi regulasi, dan penguatan literasi etika digital melalui kolaborasi lintas sektor adalah solusi krusial untuk mengatasi perilaku komunikasi destruktif yang didorong oleh ekosistem digital yang permisif (Amril & Sazali, 2025). Dengan strategi yang menyeluruh, Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan mendukung terwujudnya masyarakat moderat di tengah arus perkembangan teknologi yang pesat dan dinamis.

6.2 Peluang Inovasi dalam Penanganan Konflik

Peluang inovasi dalam pengelolaan konten digital, khususnya terkait deteksi dan pencegahan radikalisme daring, terletak pada pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin canggih. Salah satu terobosan penting adalah pengembangan sistem deteksi konten berbahaya berbasis AI yang mengintegrasikan kemampuan pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP) untuk menganalisis sentimen dan pola bahasa dalam data media sosial yang sangat besar. Dengan kemampuan ini, sistem dapat mengidentifikasi potensi ancaman radikalisme secara real-time, bahkan ketika narasi yang digunakan sangat halus atau terselubung (Luthfia et al., 2025a, 2025b). NLP, secara khusus, memungkinkan ekstraksi informasi emosional dan opini dari teks, sehingga dinamika percakapan publik dapat dipetakan secara efektif. Model-model NLP modern, seperti transformer dan deep learning, terbukti sangat efektif dalam mendeteksi pola-pola halus dalam penggunaan bahasa yang mengindikasikan keberadaan ujaran kebencian. Hal ini sangat penting untuk pengembangan sistem moderasi konten yang lebih presisi di platform media sosial (Andini et al., 2024). Sebagai contoh, penelitian terbaru menunjukkan bahwa model Convolutional Neural Network (CNN) yang menggabungkan teknik TF-IDF dan Word2Vec mampu mendeteksi ujaran kebencian di Twitter dengan tingkat akurasi mencapai 87%, sekaligus menganalisis asosiasi emosi yang terkandung dalam ujaran kebencian tersebut (Andini et al., 2024).

Implementasi teknologi deep learning, seperti transformer, semakin meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen multibahasa dan memungkinkan analisis opini publik yang lebih presisi terkait isu-isu sosial kompleks dan sensitif (Luthfia et al., 2025). Integrasi pendekatan AI ini juga menunjukkan potensi besar dalam strategi dakwah Islam digital. Dengan menganalisis pola perilaku audiens dan minat mereka, AI dapat menargetkan konten ceramah yang lebih tepat, relevan, dan efektif (Hidayatullah et al., 2024). Selain itu, AI berperan dalam pengembangan chatbot Islami dan aplikasi pengingat ibadah, yang mampu memperluas

jangkauan dakwah secara signifikan di era digital (Fauzi, 2025). Namun, pemanfaatan AI dalam konteks dakwah dan keagamaan harus mempertimbangkan persoalan otoritas keilmuan, validitas konten, dan risiko dehumanisasi. Prinsip-prinsip syariat harus tetap menjadi landasan agar pengembangan teknologi tetap responsif dan etis (Fauzi, 2025). Oleh karena itu, adopsi kerangka kerja etika digital yang komprehensif, sebagaimana ditekankan oleh Ess, menjadi sangat penting dalam menjaga nilai-nilai moral, membentuk budaya digital yang aman, bertanggung jawab, dan menghormati hak semua pihak (Luthfia et al., 2025).

Pendekatan inovatif ini menuntut adanya pengawasan ketat dan panduan yang jelas untuk memastikan bahwa teknologi AI digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan nilai-nilai universal (Muslimin, 2024). Dalam implementasinya, pengembangan dan penggunaan AI dalam dakwah Islam digital harus selalu dievaluasi secara berkelanjutan guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan serta memastikan bahwa inovasi teknologi benar-benar mendukung penyebaran nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan moderasi (Fauzi, 2025; Muslimin, 2024). Selain itu, pemanfaatan AI untuk analisis big data juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tren keagamaan, kebutuhan umat, dan isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, para ulama dan dai dapat menyusun pesan dakwah yang lebih relevan dan kontekstual, serta menjangkau audiens yang lebih luas dengan efisiensi tinggi (Muslimin, 2024). Jadi, tidak hanya sekadar sebagai alat deteksi dan pencegahan, AI juga berpotensi untuk mengembangkan personalisasi konten dakwah, menyesuaikan materi dakwah dengan preferensi, tingkat pemahaman, serta kebutuhan individu atau kelompok tertentu (Fauzi, 2025). Personalization ini dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan, memperkuat engagement, dan menumbuhkan kedekatan emosional antara pemberi pesan dan audiens.

Namun demikian, dalam seluruh proses pengembangan dan penerapan AI untuk dakwah digital, perlu ditegaskan bahwa aspek etika, validitas keilmuan, dan sensitivitas terhadap nilai-nilai agama

harus menjadi prioritas utama. Evaluasi berkelanjutan diperlukan guna memastikan bahwa setiap inovasi teknologi benar-benar membawa manfaat, mendukung penyebaran nilai-nilai moderasi, dan tidak menimbulkan risiko baru yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, peluang inovasi di ranah dakwah digital dan manajemen konflik daring sangat terbuka lebar melalui pemanfaatan AI dan NLP. Sinergi antara pengembangan teknologi, penegakan etika digital, dan integrasi nilai-nilai agama akan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya ekosistem digital yang aman, moderat, dan inklusif di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk pengelolaan risiko radikalisme, tetapi juga untuk mendukung penyebaran pesan-pesan positif, memperkuat harmoni sosial, dan memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

6.3 Rekomendasi Kebijakan dan Praktik Baik

Salah satu rekomendasi utama untuk menghadapi tantangan penyebaran ujaran kebencian dan konten radikal secara daring adalah penguatan kerangka regulasi dan kebijakan yang secara spesifik menargetkan isu ini. Penguatan tersebut mencakup penetapan sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggar, serta pemberian kewajiban pada platform digital untuk meningkatkan sistem moderasi konten mereka. Langkah ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia yang memadai, agar moderasi konten benar-benar efektif dan tidak sekadar formalitas administratif.

Selain aspek regulasi, literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui program-program edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Literasi ini tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga menekankan aspek berpikir kritis dalam menyaring informasi, mengenali narasi yang berpotensi radikal atau intoleran, serta memahami dampak dari penyebaran konten negatif (Isabella & Nofrima, 2024; Nugroho, 2023). Peningkatan kewaspadaan terhadap penyimpangan moral di era teknologi informasi menjadi

sangat krusial, sehingga literasi etika digital harus diintegrasikan dalam setiap program edukasi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas (Luthfia et al., 2025).

Pemerintah memiliki peran sentral dalam menindak tegas penyebaran ujaran kebencian melalui penerbitan regulasi, surat edaran, dan kebijakan yang mengatur ranah digital. Salah satu langkah konkret adalah mendorong pengguna untuk selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan konten negatif kepada pihak berwenang (Kusumasari & Arifianto, 2020). Kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga riset, penyedia platform, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menghasilkan solusi yang adaptif, baik dari aspek teknis maupun non-teknis, terhadap dinamika penyebaran propaganda daring (Kingdon, 2024).

Peran kecerdasan buatan, khususnya analitik data besar dan pembelajaran mesin, semakin penting dalam mendukung upaya prediksi tren penyebaran ujaran kebencian dan konten radikal. Dengan memanfaatkan AI, strategi intervensi dapat dikembangkan secara lebih efektif dan berbasis data (Karhale, 2023; Sonni, 2025). Meski demikian, pengembangan model deteksi ujaran kebencian yang bersifat universal masih menghadapi tantangan signifikan, terutama karena kompleksitas faktor budaya dan sosial yang memengaruhi definisi serta persebaran ujaran kebencian di berbagai konteks (Wijanarko et al., 2024).

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan ukuran dataset dan keberagaman jenis ujaran kebencian yang belum komprehensif, seperti islamofobia dan ujaran kebencian politik. Kurangnya data yang representatif seringkali menghambat pengembangan model deteksi yang akurat dan efektif (Andini et al., 2024; Pamungkas et al., 2023). Oleh karena itu, pengembangan dataset yang lebih holistik dan inklusif sangat diperlukan, mencakup berbagai nuansa ujaran kebencian serta konteks budaya lokal agar akurasi dan cakupan model deteksi berbasis AI semakin meningkat (Bakri et al., 2019).

Peningkatan literasi digital tidak hanya diperlukan bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi akademisi dan tokoh masyarakat. Program pelatihan intensif tentang etika komunikasi online, produksi konten bertanggung jawab, serta pemanfaatan teknologi verifikasi informasi harus terus digalakkan (Bakri et al., 2019; Ilyas et al., 2025). Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan mengembangkan situs verifikasi dan saluran pengaduan berita hoaks, serta mendukung komunitas swadaya yang berperan aktif dalam membasmi dampak negatif media sosial (Budiman et al., 2021).

Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang etis, inklusif, dan bertanggung jawab. Upaya bersama ini menjadi fondasi utama bagi peradaban komunikasi modern yang sehat dan produktif (Amril & Sazali, 2025). Di tengah maraknya fenomena deepfake, peningkatan etika berkomunikasi dan literasi media menjadi sangat fundamental untuk menjaga integritas komunikasi, mengingat tantangan verifikasi keaslian konten yang semakin rumit (Leliana et al., 2024).

Transparansi dalam fungsi teknologi deteksi dan autentikasi informasi juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Pengembangan dan implementasi alat deteksi yang bertanggung jawab harus memperhatikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia (Shoaib et al., 2023). Dengan demikian, penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, inovasi teknologi, dan sinergi multipihak menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang digital Indonesia yang aman, sehat, dan berkontribusi pada kemajuan peradaban bangsa..

6.4 Refleksi dan Prospek Pengelolaan Konflik Sosial

Dalam menghadapi kompleksitas konflik sosial di ranah digital, refleksi mendalam terhadap efektivitas kebijakan yang telah ada serta proyeksi inovasi berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk menghasilkan solusi

yang adaptif dan responsif. Dinamika konflik sosial digital yang dipicu oleh kemajuan teknologi, terutama kecanggihan artificial intelligence (AI) dalam amplifikasi disinformasi dan ujaran kebencian, menuntut adanya analisis berkelanjutan terhadap mekanisme penyebarannya serta evaluasi dampak dari strategi intervensi yang telah diterapkan (Sonni, 2025).

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga riset, dan platform media sosial menjadi pilar utama dalam membangun strategi moderasi yang holistik dan efektif. Kolaborasi ini sangat penting untuk menjaga integritas komunikasi di ruang digital, mengingat sifat disinformasi dan ujaran kebencian yang sangat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Gani et al., 2024). Di sisi lain, penanaman etika komunikasi dan peningkatan literasi digital pada masyarakat harus menjadi landasan utama dalam membangun budaya digital yang aman, bertanggung jawab, dan menghargai hak semua pengguna (Amril & Sazali, 2025; Luthfia et al., 2025).

Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, seperti deepfake dan berbagai platform media sosial baru, sangat vital untuk menopang upaya kolektif menciptakan ruang digital yang sehat. Pengembangan regulasi ini harus mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola konten yang berkeadilan serta memperkuat program literasi digital masyarakat (Amril & Sazali, 2025; Leliana et al., 2024). Selain itu, peningkatan etika komunikasi digital dan literasi media merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas informasi publik di tengah tantangan teknologi manipulatif seperti deepfake, sehingga memerlukan kerja sama dari berbagai pihak (Leliana et al., 2024).

Untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman disinformasi dan konflik digital di masa depan, diperlukan integrasi kebijakan yang komprehensif, edukasi publik secara berkelanjutan, dan inovasi teknologi. Upaya ini meliputi pendidikan publik mengenai bahaya deepfake, penegakan undang-undang yang relevan, dan kerja sama lintas sektor yang berkesinambungan untuk menjaga kepercayaan serta integritas komunikasi di era digital (Tumanggor & Sazali, 2025;

Leliana et al., 2024). Di samping itu, penguatan kapasitas resolusi konflik digital juga membutuhkan pelatihan keterampilan komunikasi efektif, pemahaman tentang dinamika konflik digital, dan strategi mediasi yang dapat memperkuat integrasi nasional (Hidayah et al., 2023). Integritas komunikasi di lingkungan digital harus selalu menekankan pentingnya penggunaan sumber terpercaya dan terverifikasi guna meminimalkan risiko penyebaran informasi palsu. Literasi media sangat diperlukan agar individu mampu mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengevaluasi konten secara kritis sebelum mengambil keputusan untuk menyebarluaskan informasi (Leliana et al., 2024). Salah satu inovasi yang penting dalam konteks ini adalah kemampuan untuk menganalisis sentimen publik di media sosial, yang dapat menjadi indikator signifikan dalam memahami reaksi emosional masyarakat terhadap isu-isu sensitif (Luthfia et al., 2025b, 2025a).

Penguatan kemampuan analisis sentimen, yang didukung oleh teknologi Natural Language Processing (NLP), memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap polarisasi opini dan potensi eskalasi konflik sosial. Dengan pemanfaatan model deep learning multibahasa seperti XLM-RoBERTa, analisis sentimen dapat dilakukan secara otomatis dan efisien, mengungkap kategori sentimen positif, netral, maupun negatif dengan tingkat akurasi yang tinggi (Luthfia et al., 2025). Kemampuan ini memberikan dasar empiris bagi pengambil kebijakan dan pengembang platform digital untuk memperkuat tata kelola konten, mengidentifikasi tren polarisasi, serta mendeteksi dini ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik (Luthfia et al., 2025b, 2025a). Lebih jauh, analisis sentimen yang terintegrasi dengan sistem deteksi otomatis dapat memfasilitasi intervensi proaktif guna memitigasi konflik sosial secara digital. Melalui pendekatan berbasis data dan teknologi, pengambil kebijakan dapat merancang respons yang lebih terinformasi untuk meredakan eskalasi konflik dan membangun ruang digital yang lebih inklusif dan harmonis.

Secara keseluruhan, menghadapi kompleksitas konflik sosial digital membutuhkan refleksi kritis terhadap kebijakan yang ada, inovasi

berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor, penguatan etika komunikasi, literasi digital, serta pemanfaatan teknologi analitik modern. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan era digital dan mampu menjaga integritas komunikasi di tengah arus informasi yang kian deras dan dinamis.



BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi strategi edukasi digital, regulasi yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi analisis sentimen berbasis kecerdasan buatan (AI) merupakan landasan fundamental untuk menjaga integritas komunikasi dan stabilitas sosial di era digital yang semakin kompleks. Pendekatan holistik ini diperlukan guna menghadapi tantangan penyebaran deepfake dan disinformasi yang berdampak pada kerusakan reputasi individu serta meluasnya informasi palsu, yang kian marak dalam ruang digital (Leliana et al., 2024). Peningkatan literasi digital dan pemahaman etika komunikasi menjadi kunci utama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap konten sensitif dan kontroversial, sebagaimana ditekankan oleh Ess dan peneliti lain (Luthfia et al., 2025).

Dalam konteks etika komunikasi, sangat penting untuk selalu mempertimbangkan dampak setiap interaksi digital, sedangkan literasi digital esensial dalam mengasah kemampuan kritis pengguna media sosial (Amril & Sazali, 2025; Rianto, 2019). Oleh karena itu, kebijakan

media digital perlu direformulasi agar lebih etis, inklusif, dan responsif dalam rangka membangun ekosistem digital yang adil dan demokratis (Tumanggor & Sazali, 2025).

Penerapan model deep learning seperti BERT dan RoBERTa telah terbukti efektif dalam analisis sentimen multibahasa, memungkinkan identifikasi serta kategorisasi respons emosional masyarakat terhadap berbagai isu sosial, termasuk ujaran kebencian (Luthfia et al., 2025). Dalam konteks bahasa Indonesia, model seperti IndoBERT menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan mBERT, dengan tingkat akurasi prediksi yang lebih tinggi dalam tugas-tugas analisis sentimen spesifik (Fiala et al., 2011). Efektivitas model-model tersebut menegaskan potensinya dalam pemantauan sentimen secara otomatis, sehingga mampu memberikan wawasan berharga untuk mendukung respons pemerintah dan media terhadap dinamika wacana publik (Setiawan et al., 2025). Dengan pembaruan kebijakan, edukasi yang berkelanjutan, dan inovasi teknologi, diharapkan ekosistem digital Indonesia dapat berkembang secara sehat, adil, dan demokratis, sekaligus menekan dampak negatif disinformasi dan ujaran kebencian di masyarakat.

7.2 Saran untuk Penelitian dan Praktik Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar integrasi model analisis sentimen dengan sistem deteksi deepfake dan disinformasi secara real-time dieksplorasi lebih lanjut, guna memberikan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi terhadap berbagai ancaman digital. Selain itu, studi komparatif mengenai efektivitas regulasi antarnegara dalam menangani penyebaran disinformasi dan deepfake berpotensi memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual (Leliana et al., 2024).

Penggunaan metode pelabelan sentimen berbasis pembelajaran terawasi (supervised learning) juga direkomendasikan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi analisis sentimen, terutama dalam konteks bahasa

Indonesia yang kaya akan nuansa kontekstual (Rohmatun & Baita, 2025). Penelitian di masa depan dapat diarahkan pada pengembangan model yang mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ujaran kebencian secara lebih spesifik, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kerukunan sosial di ranah daring (Juliswara, 2017).

Selain itu, eksplorasi penggunaan algoritma berbasis deep learning seperti LSTM maupun model berbasis Transformer diharapkan dapat meningkatkan akurasi analisis sentimen, khususnya dalam memahami tren sentimen dari waktu ke waktu terhadap pembaruan aplikasi atau isu-isu publik lainnya (Celvin & Barus, 2025). Peningkatan kualitas dan kuantitas data, termasuk pemanfaatan data historis, juga menjadi aspek penting dalam menyempurnakan hasil analisis sentimen untuk memahami konteks multibahasa dan nuansa ekspresi emosional yang kompleks (Anggara, 2025; Luthfia et al., 2025). Penggabungan word embedding yang lebih kaya dan variatif dapat meningkatkan representasi kata, sehingga model lebih mampu menangkap makna yang kompleks dan halus dalam teks (Alghifari et al., 2022). Optimalisasi hyperparameter tuning juga sangat diperlukan untuk meningkatkan performa model, mengingat masih terdapat ruang untuk perbaikan akurasi klasifikasi (Purnomo et al., 2025). Selain itu, studi mendatang dapat memperluas ruang lingkup kajian dengan mengembangkan analisis sentimen di media sosial menggunakan variasi metode atau algoritma yang relevan untuk studi kasus spesifik, seperti dalam bidang pendidikan, birokrasi, atau layanan kesehatan, sehingga cakupan pembahasan menjadi lebih luas dan aplikatif (Afrianto Singgalen, 2021).

BIODATA PENULIS



Dr. Indra Prasetyo, SP., MM^{id}. lahir di Surabaya pada tanggal 24 Maret 1970. Beliau menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra dan lulus dengan gelar Sarjana Pertanian (S.P.) pada tahun 1997. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan Pascasarjana (S-2) di Program Studi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dan lulus dengan gelar Magister Manajemen (M.M.) pada tahun 2000. Selanjutnya, beliau menyelesaikan Program Pascasarjana S-3 di Program Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya dan lulus dengan gelar Doktor Ilmu Manajemen (Dr.) pada tahun 2006.

Bidang keahlian penulis adalah Sumber Daya Manusia dengan fokus pada manajemen konflik. Saat ini, penulis bekerja sebagai staf pengajar di Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana Universitas Wijaya Putra. Motivasi penulis adalah bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan sekarang, akan berdampak besar di masa depan dalam perkembangan Ilmu Manajemen Konflik. Dalam bidang pekerjaan, penulis mengabdikan diri sebagai staf pengajar pada mata kuliah Pengantar Manajemen, Manajemen Sumber Daya Manusia, Metodologi Penelitian, serta aktif menulis buku dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di media

massa, majalah, dan jurnal ilmiah nasional bereputasi yang terindeks Sinta, serta jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus.


WA +62 812-3007-808

SINTA ID: 6154868; SCOPUS ID: 55601102600

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8199-5297>

Email: indraprasetyo@uwp.ac.id



Dr. Rusdiyanto, S.E., M.Ak., CH., CHt  Lahir Di Pamekasan 03 Februari 1980 Pendidikan Tinggi Strata S1 Ditempuh Di Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Madura (Unira) Lulus Sarjana Ekonomi (S.E) Tahun 2010, Pascasarjana Strata S2 Program Studi Magister Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional” Veteran” Jawa Timur (UPN”Veteran”Jatim) Lulus Program Studi Magister Akuntansi (M.Ak) Tahun 2012, Pascasarjana Strata Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekononi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Surabaya (Unair) Lulus Program Pascasarjana Doktor Ilmu Akuntansi (Dr) Tahun 2021.

Bidang keahlian penulis adalah Akuntansi Keprilakuan. Motivasi penulis adalah sekecil kebaikan yang dilakukan sekarang, maka akan berdampak besar di masa depan dalam perkembangan Ilmu Akuntansi. Dalam bidang pekerjaan penulis sampai saat ini mengabdikan diri sebagai staf pengajar pada Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Universitas Gresik (UniGres), menjadi Dosen LB Stiesia Surabaya, Serta UWP Surabaya, Mata kuliah yang diampuh, Pengantar Akuntansi 1 dan 2, Aplikasi Komputer Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan 3, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dan 2, Metodologi Penelitian, serta aktif menulis Buku, Artikel Ilmiah dalam media massa/ Majalah/ Jurnal Ilmiah Nasional bereputasi terindeks Sinta dan Jurnal Internasional bereputasi Terindeks Scopus

WA +62-82231047290


SINTA ID: 6676135

SCOPUS ID: 57238673100

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7456-7072>

Email: rusdiyanto.se.m.ak-2017@feb.unair.ac.id



Nabilah Aliyyah, S, Par., MBA  lahir di Surabaya pada tanggal 19 Oktober 1996. Telah menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada dan lulus dengan gelar Sarjana Pariwisata (S.Par.) pada Tahun 2018. Kemudian, melanjutkan pendidikan Pascasarjana (S-2) di

Program Studi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dan lulus dengan gelar Master of Business Administration (MBA) pada Tahun 2021.

Bidang keahlian penulis adalah Sumber Daya Manusia dengan fokus pada entrepreneurship. Saat ini, penulis bekerja sebagai staf pengajar di Program Studi Manajemen Manajemen, Universitas Wijaya Putra. Motivasi penulis adalah bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan sekarang, akan berdampak besar di masa depan dalam perkembangan Ilmu Manajemen khususnya entrepreneurship Dalam bidang pekerjaan, penulis mengabdikan diri sebagai staf pengajar pada mata kuliah Pengantar entrepreneurship, entrepreneurship Di Era Digital, Metodologi Penelitian, serta aktif menulis buku dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di media massa, majalah, dan jurnal ilmiah nasional bereputasi yang terindeks Sinta, serta jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus.

Scopus ID: 57222544433

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8572-7409>

Email: nabilahaliyyah@uwp.ac.id



Rahmat Luthfi Haidar, S.IP., M,AP^{ID}. lahir di Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2000. Telah menyelesaikan Pendidikan Tinggi S-1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan lulus dengan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P.) pada Tahun 2023. Kemudian, melanjutkan pendidikan Pascasarjana (S-2) di Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada dalam proses dengan gelar Magister Administrasi Publik (M.AP)

Bidang keahlian penulis adalah Sumber Daya Manusia dengan fokus pada kebijakan publik. Saat ini, penulis menyelesaikan proses Magisternya di Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada. Motivasi penulis adalah bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan sekarang, akan berdampak besar di masa depan dalam perkembangan Ilmu kebijakan Publik. Aktif menulis buku dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di media massa, majalah, dan jurnal ilmiah nasional bereputasi yang terindeks Sinta, serta jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus.

Scopus ID: 59897002800

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7654-9866>

Email: rahmat@uwp.ac.id

HASIL PLAGIARM TURNITIN

Manajemen Konflik Sosial: Isu Polarisasi Politik dan Media Sosial

Penulis :

Dr. H. Indra Prasetyo, S.P., MM ^{ID}

^{ID} Dr. Rusdiyanto, S.E., M.Ak., CH.,CHT ^{ID}

Nabilah Aliyyah, S.Par., MBA ^{ID}

Rahmat Luthfi Haidar, S.IP., M.AP ^{ID}

Editor:

^{ID} Prof. Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA., CFA ^{ID}

Dr. Yenni Fayanni, SE, M.Ak., Ak., PIA

Dr. Suharto, MM

Umar Burhan, SE., M.M

^{ID} Dini Ayu Pramitasari, S.Ant., S.E., M.Ak

A diba Fuad Syamlan, S.E., M.M.

Anisaul Hasanah, S.Pd., M.Akun

Manajemen Konflik Sosial: Isu Polarisasi Politik dan Media Sosial

INDRA PRASETYO UWP_2

ORIGINALITY REPORT

	18%	16%	15%	11%
	SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES				
1	elibs.unigres.ac.id			1%
	Internet Source			
2	journal.lapa.or.id			<1%
	Internet Source			
3	jurnalrepo.kemenag.site			<1%
	Internet Source			
4	Submitted to Universitas Negeri Surabaya			<1%
	Student Paper			
5	journal.stmiki.ac.id			<1%
	Internet Source			
6	Submitted to Southern New Hampshire University - Continuing Education			<1%
	Student Paper			
7	repository.upi.edu			<1%
	Internet Source			
8	Susanto Susanto, Emy Hajar Abra, Alwan Hadiyahanto. "Dinamika Politik Identitas Dalam Pemilu 2024: Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025			<1%
	Publication			
9	repository.uniba.ac.id			<1%
	Internet Source			
10	researchhub.id			<1%
	Internet Source			

Doc Hasil Plagiarm Turnitin 05-01-2026:

https://drive.google.com/file/d/16XXbt8orMkt4zPn6oX1w9MKG95z0C3N_/view?usp=sharing

SERTIFIKAT IKAPI



SERTIFIKAT PENULIS DAN EDITOR



DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyantoro, R., Botifar, M., & Ifnaldi, I. (2023). OPTIMALISASI PEMBELAJARAN ABAD 21 MELALUI PENANAMAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA: SEBUAH KAJIAN PADA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *PROFETIK Jurnal Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 130. <https://doi.org/10.24127/profetik.v4i1.5083>
- Achank, H. B., Wekke, I. S., Machmud, M., & Sainuddin, I. H. (2021). Potensi Konflik Berpengaru Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kota Gorontalo. *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 145. <https://doi.org/10.33506/jn.v6i2.1366>
- Achfandhy, M. I., Pujiyanto, W. T., Daniyarti, W. D., & Jamiah, R. (2024). THE PRE-PRESIDENTIAL ELECTION 2024: UNCOVERING THE CONSISTENCY OF RELIGIOUS POLITICIZATION. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 24(1), 67. <https://doi.org/10.22373/jiif.v24i1.17103>
- Adam, C. V., & Pariangu, U. T. (2020). Sosialisasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. *Khadimul Ummah*, 4(1). <https://doi.org/10.21111/ku.v4i1.5243>

- Afrianto Singgalen, Y. (2021). *Pemilihan Metode dan Algoritma dalam Analisis Sentimen di Media Sosial: Systematic Literature Review*.
- Ahmad, N. (2022). Disinformation Order and Social Media Algorithmic Trap: New Challenges for Sustainability of the Indonesia's United Nation-State Narrative and Liberal Democratic Norms. *Politik Indonesia Indonesian Political Science Review*, 7(2), 134. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i2.37261>
- Ahoen, B. (2025). Analisis Kekuatan, Kerentanan, dan Tantangan Pembuktian Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(9), 8414. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i9.4784>
- Akhsan, I. M., & Darmawan, D. (2023). Implementasi Moderasi Beragama dalam Organisasi Massa Persatuan Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(2), 327. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.28192>
- Alam, M. (2016). UPAYA INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBANGUN HARMONI KERAGAMAN AGAMA DAN BUDAYA DI STAIN KERINCI (SEBUAH INOVASI PENDIDIKAN KARAKTER). *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2). <https://doi.org/10.32939/islamika.v15i2.48>
- Albana, H. (2022). Kontestasi Narasi Moderasi Beragama di Instagram. *Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.3791>
- Alfiyani, N. (2018). MEDIA SOSIAL SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK. *Potret Pemikiran*, 22(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762>
- Alghifari, D. R., Edi, M., & Firmansyah, L. (2022). Implementasi Bidirectional LSTM untuk Analisis Sentimen Terhadap Layanan Grab Indonesia. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 12(2), 89. <https://doi.org/10.34010/jamika.v12i2.7764>

- Alhuda, M. I. (2025). Computer-Mediated Communication in the Presidential and Vice-Presidential Social Media Campaigns for the 2024 Election. *International Journal of Science and Society*, 7(1), 546. <https://doi.org/10.54783/ij soc.v7i1.1040>
- Ali, D. J., & Eriyanto, E. (2021). Political Polarization and Selective Exposure of Social Media Users in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(3), 268. <https://doi.org/10.22146/jsp.58199>
- Amril, A., & Sazali, H. (2025). Krisis Etika Komunikasi di Media Sosial: Analisis Multidisipliner terhadap Peran Algoritma, Literasi Digital, dan Regulasi dalam Mewujudkan Ruang Publik Digital yang Bertanggung Jawab. *Jurnal Indonesia Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1342. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1424>
- Amrullah, M. K., & Islamy, M. I. (2021). MODERASI BERAGAMA: PENANAMAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.32332/nizham.v9i02.4308>
- Anas, S., Dewi, S. F., & Indrawadi, J. (2019). FAKTOR PENYEBAB KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA PELADANG PENDATANG VS MASYARAKAT ADAT DI DESA TAMIAI KABUPATEN KERINCI. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 131. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1702>
- Andini, N. M., Findawati, Y., Astutik, I. R. I., & Eviyanti, A. (2024). Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) Untuk Mendeteksi Ujaran Kebencian Dan Emosi Di Twitter. *SMATIKA JURNAL*, 14(2), 314. <https://doi.org/10.32664/smatika.v14i02.1346>
- Andriyani, L., Murod, M., Sulastris, E., Gunanto, D., Sahrul, M., & Andiani, D. (2021). Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penangan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 39. <https://doi.org/10.22146/jkn.61155>

- Anggara, M. B. (2025). *PERBANDINGAN NAÏVE BAYES DAN SVM DALAM ANALISIS SENTIMEN ULASAN APLIKASI RSUD AL IHSAN MOBILE*.
- Anggraini, T. (2025). *KONSOLIDASIDEMOKRASIMENUJU STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN*.
- Anung Wibowo, P. (2024.). *ROUND TABLE DISCUSSION (RTD) KONSOLIDASI DEMOKRASI MENUJU STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN*.
- Araghi, S. M. K., Birch, P., Heggart, K., Buchanan, J., & Wallace, H. (2025). Digital community management for crime prevention and public safety: Strategies for safer and more inclusive online communities. *Journal of Community Safety and Well-Being*, 10(3), 138. <https://doi.org/10.35502/jcswb.478>
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>
- Arif, M., Adeoye, M. A., & Aziz, M. K. N. A. (2024). Religious Moderation Campaign Strategy in the Digital Era. *WARAQAT Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v9i2.952>
- Arifin, A. L., Deastri, L. H., Nugroho, J., & Adi, I. N. (2024). Menggagas Kebhinekaan: Pemuda sebagai Pilar Toleransi Agar Berdaya Saing. *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 355. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1197>
- Arifin, Z., Aqso, M., & Firmansyah. (2023). Aktivisme Moderasi Beragama Dalam Menangkal Radikalisme Di Sekolah Menengah Atas Kota Medan. *Tawazun Jurnal Pendidikan Islam*, 16(3), 471. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i3.15419>
- Ariyanto, K. (2023). Social Conflict Among Religious Groups in the Perspective of Sociology of Religion. *Jurnal Humaya Jurnal*

Hukum Humaniora Masyarakat Dan Budaya, 3(2), 213. <https://doi.org/10.33830/humaya.v3i2.6625>

Arsal, T., Setyowati, D. L., Hardati, P., & Atmaja, H. T. (2022). PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MELALUI BUDAYA LOKAL. *Bookchapter Alam Universitas Negeri Semarang*, 1, 47. <https://doi.org/10.15294/ka.v1i1.85>

Asih, G. Y., Widhiastuti, H., & Dewi, R. (2018). *Stres Kerja*.

Asmar, A., Kasman, S., & Muhammad, F. (2023). FATWA ONLINE DAN OTORITAS ISLAM KAJIAN DAMPAK MEDIA BARU TERHADAP ATURAN AGAMA. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2), 179. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v5i3.24487>

Athoillah, S., Ashari, M. K., & Alauddin, M. B. (2023). RELIGIOUS DIGITAL LITERACY OF URBAN MUSLIM SOCIETY IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *AKADEMIKA Jurnal Pemikiran Islam*, 28(2), 141. <https://doi.org/10.32332/akademika.v28i2.7088>

Avcı, İ. S. (2024). Echoes of Division: Social Media, Disinformation, and Emotional Politics in Turkey's 2023 Elections. *DergiPark (Istanbul University)*. <https://dergipark.org.tr/en/pub/srtc/issue/87963/1550597>

Bagja, R. (2024.). *Konsolidasi Demokrasi Menuju Stabilitas Politik dan Keamanan*.

Baharuddin, T., Qodir, Z., Jubba, H., & Nurmandi, A. (2022). Prediction of Indonesian presidential candidates in 2024 using sentiment analysis and text search on Twitter. *International Journal of Communication and Society*, 4(2), 204. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v4i2.512>

Baihaki, E. S. (2020). Islam dalam Merespons Era Digital. *SANGKÉP Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 185. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1926>

- Baihaqi, M. (2020). PENGARUH KONTESTASI POLITIK DESA TERHADAP KONFLIK AHMADIYAH DI GEGERUNG-LOMBOK BARAT. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(2), 235. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.142-06>
- Bakri, S., Zulhazmi, A. Z., & Laksono, K. (2019). MENANGGULANGI HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN BERMUATAN ISU SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN DI TAHUN POLITIK. *Al-Balagh Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 199. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i2.1833>
- Basid, Abd., & Rahmah, W. (2023). Melawan Cyberbullying: Membangun Kesadaran Kemanusiaan dalam Etika Bermedia Sosial Perspektif Al-Qur'an. *Studia Quranika*, 7(2), 203. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v7i2.9013>
- Benjamin, B. (2018). COMMUNAL CONFLICT: ANALYSIS OF ERVING GOFFMAN'S DRAMATURGY THROUGH A CASE STUDY. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 85(1), 304. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-12.39>
- Boboy, J. T. B., Santoso, B. H., & Irawati, I. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN TEORI DEAN G. PRUITT DAN JEFFREY Z. RUBIN. *NOTARIUS*, 13(2), 803. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- Budiman, A., Handayana, S., & Muttaqin, I. (2021). KELUARGA ERA 4.0: MENILIK PERAN WANITA DI TENGAH ANCAMAN HOAKS. *BUANA GENDER Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(1). <https://doi.org/10.22515/bg.v6i1.3519>
- Celvin, J., & Barus, S. P. (2025). *Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Famiapps Menggunakan Naïve Bayes, SVM, dan Random Forest*.
- Chenou, J.-M., & Restrepo, E. M. (2023). Una nación dividida: análisis del discurso político en redes sociales antes del plebiscito del acuerdo de paz con las FARC. *Análisis Político*, 36(106), 60. <https://doi.org/10.15446/anpol.v36n106.111038>

- Darraz, M. A. (2024). *Pencegahan Intoleransi dan Radikalisme melalui Kurikulum Satuan Pendidikan: Studi Dokumen Kurikulum Pendidikan Hayuning Pakarti SMA Negeri 5 Yogyakarta*.
- Deni, A., Asyari, D., & Abbas, J. (2016). *Konsolidasi Demokrasi: Perbaikan Kualitas Demokrasi di Indonesia*.
- Desike, V., Audia, A., & Wardani, W. (2021). Konflik Antar Masyarakat Etnis Jawa Di Desa Sukaraja Tiga Dan Masyarakat Etnis Lampung Di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur. *SOCIAL PEDAGOGY Journal of Social Science Education*, 2(2), 82. <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v2i2.3517>
- Digdoyo, E. (2018). KAJIAN ISU TOLERANSI BERAGAMA, BUDAYA, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL MEDIA. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 42. <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp42-59>
- Digital Activism and Political Change: Challenges of Social Media's Impact on Political Development. (2024). *Deleted Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.7454/meis.v11i2.177>
- Dutta, S., Arivazhagan, R., & Pradeep, E. (2025). Breaking the bubble: A case study on the echo chamber effect in Instagram. *Journal of Information Technology Teaching Cases*. <https://doi.org/10.1177/20438869251326279>
- Fahmi, M., Harahap, L., & Fatah, M. H. A. (2023). STUDI KUALITATIF REPRESENTASI ISLAM PADA AKUN MEDIA SOSIAL MASJID DI INDONESIA. *NIVEDANA Jurnal Komunikasi Dan Bahasa*, 4(2), 467. <https://doi.org/10.53565/nivedana.v4i2.866>
- Fahrudin, M. (2014). TRANSFORMASI KULTUR PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*. <https://doaj.org/article/e847b11851ce49f2b69ed6b7c2bba113>
- Faizin, B., Fitri, S. A., As, E., & Maylawati, D. S. (2024). Polarization of Religious Issues in Indonesia's Social Media Society and Its Impact

- on Social Conflict. *Research Square (Research Square)*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3926320/v1>
- Farchan, Y. (2022). DINAMIKA SISTEM POLITIK OTORITARIANISME ORDE BARU. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>
- Farisal, U., Widiyanarti, T., Sianturi, M. K., Ningrum, A. J., Fatimah, Y., Hastuti, P. D., Abdilah, A., & Desmonda, W. K. (2024). Menghubungkan Dunia: Peran Media Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Budaya. *Indonesian Culture and Religion Issues.*, 1(4), 10. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i4.105>
- Fatih, I. Z. A. (2024). Peran Media Sosial dalam Kampanye Politik di Indonesia Lima Tahun Terakhir: Antara Demokrasi dan Manipulasi Informasi. *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(7), 2227. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2611>
- Fatmah, F. (2025). KONSEP PROPAGANDA POLITIK PEMILU 2024 DALAM HUKUM DEMOKRASI DI INDONESIA PERSPEKTIF UUNo. 11 Tahun 2008. *Deleted Journal*, 50. <https://doi.org/10.55499/derecht.v3i1.288>
- Fauzi, Fauzi. (2025). Dakwah Islam dan Artificial Intelligence: Penelitian Atas Pemanfaatan AI Dalam Penyebaran Nilai-nilai Islam. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3702. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1087>
- FAUZY, A. L., & Kusdinar, R. (2020). *SKRIPSI HUBUNGAN LEGITIMATE POWER (KEKUASAAN YANG SAH) DENGAN PERILAKU PEMIMPIN DIDINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG.*
- Febriansyah, F., & Muksin, N. N. (2020). FENOMENA MEDIA SOSIAL: ANTARA HOAKS, DESTRUKSI DEMOKRASI, DAN ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA. *Sebatik*, 24(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1091>

- Ferreira, G. B., & Ferreira, L. S. (2025). The Polarization Paradox: Social Media, Young Voters, and the Challenges to the Open Society. *Preprints.Org*. <https://doi.org/10.20944/preprints202502.1941.v1>
- Fiala, D., Mueller, F., Engelmann, C., Riesen, R., & Ferreira, K. B. (2011). *Poster*. 47. <https://doi.org/10.1145/2148600.2148625>
- Fitriatul Ulya, V., Abu Bakar, M. Y., & Mas'ud, A. (2025). *REINTERPRETING NURCHOLISH MADJID'S THEORIES OF SECULARIZATION: REAPPLYING THESE THEORIES TO INDONESIA'S CONTEMPORARY ISLAMIC EDUCATION CURRICULUM*. <https://doi.org/10.30868/ei.v14i03.8524>
- Gani, A., Fattah, A., & Nasri, U. (2024). Social Media and Radicalization: The Latest Threat to Religious Moderation. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 141. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1869>
- Gultom, F., & Fauzi, A. M. (2021). Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi. *DOKTRINA JOURNAL OF LAW*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4868>
- Gultom, F., & Harianto, S. P. (2021). Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani. *TEMALI Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12579>
- Gupta, T., & Bansal, S. (2024). Beyond Echo Chambers: Unraveling the Impact of Social Media Algorithms on Consumer Behavior and Exploring Pathways to a Diverse Digital Discourse. *Journal of Marketing Studies*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.47941/jms.1799>
- Hababil, M. P., Firdaus, M., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). ANALISIS PENGARUH PEMERATAAN EKONOMI DALAM UPAYA MENGHAPUS KETIMPANGAN SOSIAL-EKONOMI ANTAR MASYARAKAT. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.276>
- Hadi Gayung Kasuma, D. W. (1966). *PROPAGANDA ORDE BARU 1966-1980*.

- Hafidz, J. (2021). Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.147>
- Hakim, L. A., & Abdurahman, D. (2023). MODERASI BERAGAMA DI PAPUA: Rekonstruksi Identitas dan Resolusi Kehidupan Keagamaan Pasca Konflik Papua 1998-2001. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 49. <https://doi.org/10.14421/jsa.2023.171-04>
- Haliza, D. A. N., Erina, M. D., Nisa, I. F. C., & Nasrum, A. J. (2022). Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Negara di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. *Jurnal Riset Agama*, 2(1), 100. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.15685>
- Hamid, I. (2019). Urgensitas Masyarakat Madani Civil Society dalam Mengurai Problematika Sosial: Suatu Tinjauan Terhadap Varian Konflik di Lombok. *SANGKÉP Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i1.932>
- Hanif, A., & Rahman, S. (2023). Moralitas Diskursus Dan Otoritas Wacana Keagamaan Di Media Sosial. *PALITA Journal of Social-Religion Research*, 8(1), 79. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3773>
- Hanif, A., Syarifudin, E., & Muhtarom, A. (2025). INTEGRATION OF RELIGIOUS MODERATION IN ISLAMIC EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE DIGITAL ERA. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 49. <https://doi.org/10.30868/ei.v14i01.7767>
- Hapsin, A. (2014). URGENSI REGULASI PENYELESAIAN KONFLIK UMAT BERAGAMA: PERSPEKTIF TOKOH LINTAS AGAMA. *Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(2), 351. <https://doi.org/10.21580/ws.22.2.270>
- Hardjaloka, L. (2015). STUDI DINAMIKA MEKANISME PILKADA DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN MEKANISME PILKADA NEGARA LAINNYA. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.48>

- Harsasto, P. (2016). AIR MENGALIR TIDAK SAMPAI JAUH: KONFLIK SUMBER DAYA AIR DI BOYALALI JAWA TENGAH. *JURNAL ILMU SOSIAL*, 5(2), 112. <https://doi.org/10.14710/jis.5.2.2006.112-124>
- Hasfi, N. (2019). KOMUNIKASI POLITIK DI ERA DIGITAL. *Deleted Journal*, 10(1), 93. <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.93-111>
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Heriyanti, K. (2022). INTERNALISASI KONSEP PLURALISME DI TENGAH KONFLIK SOSIAL (Perspektif Agama Hindu). *Sanjiwani Jurnal Filsafat*, 13(1), 49. <https://doi.org/10.25078/sanjiwani.v13i1.1004>
- Hibana, H., & Surahman, S. (2021). Kompetensi Digital Guru Dalam Upaya Meningkatkan Capaian Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(3), 607. <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.3.2021.1392>
- Hidayah, Y., Ulfah, N., & Trihastuti, M. (2023). Memperkuat Integrasi Nasional Di Era Digital : Penguatan Resolusi Konflik Di Era Digital Sebagai Perwujudan Warga Negara Yang Baik. *Antroposen Journal of Social Studies and Humaniora*, 2(2), 105. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v2i2.5483>
- Hidayatullah, R. R., Kamali, M., & T, N. A. (2024). Innovative Dakwah Strategies Through Social Media: Case Study of Islamic Communication Approaches in Indonesia. *INJIES Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.34125/injies.v1i1.3>
- Hilal, F. (2023). Transformasi Gerakan Radikalisme Menuju Moderasi Beragama. *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 16(1), 77. <https://doi.org/10.35905/kur.v16i1.6670>

- Humaizi, H., Hasan, N. N. N., Dalimunthe, M. A., & Ramadhani, E. (2024). Harmony in virtual space: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) development communication in creating digital literacy based on religious moderation Pusat Pengajian Komunikasi, Universiti Sains Malaysia. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(7), 4299. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.4299>
- Hyangsewu, P., & Lestari, W. (2022). TEOLOGI INKLUSIF SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK AGAMA DI ERA DIGITAL. *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 39. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i1.3558>
- Ichwan, Moh. N., Amin, F., Khusairi, A., & Andrian, B. (2024). Digitalization and the shifting religious literature of Indonesian Muslims in the Era of Society 5.0. *Islamic Communication Journal*, 9(2), 245. <https://doi.org/10.21580/icj.2024.9.2.22515>
- Ikhwan, M., Azhar, A., Wahyudi, D., & Alfianto, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia. *Realita Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.30762/realita.v21i1.148>
- Ilyas, H., Fatmal, Abd. B., & Ahmad, L. O. I. (2025). Digital Jihad in Qur'anic Perspective: An Islamic Response to the Challenges of Cyberspace in the Age of Artificial Intelligence (AI). *QOF*, 9(2), 189. <https://doi.org/10.30762/qof.v9i2.3091>
- Isabella, I., & Nofrima, S. (2024). Radicalism in the Digital Era: The Role of Digital Literacy in Preventing Propaganda in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i18.16357>
- Iskandar, D., Suryawati, I., Suratno, G., Liliyana, L., Muhtadi, M., & Ngimadudin, N. (2023). Public Communication Model In Combating Hoaxes And Fake News In Ahead Of The 2024 General Election. *International Journal of Environmental Sustainability and Social Science*, 4(5), 1505. <https://doi.org/10.38142/ijess.v4i5.856>
- Jati, W. R. (2022). Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(2), 152. <https://doi.org/10.22146/jsp.66057>

- Jinan, M. (2008). *DILEMA GERAKAN PEMURNIAN ISLAM*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/11617/1005/1/4.%20Mutohharun%20Jinan.pdf>
- Jubba, H., Iribaram, S., Pabbajah, M., & Elizabeth, M. Z. (2019). Preferensi Pemilih Muslim Milenial pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2019. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 3(2), 163. <https://doi.org/10.21580/jsw.2019.3.2.4526>
- Juliswara, V. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 142. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28586>
- Jumadin, Z., & Wibisono, Y. (2021). KONFLIK POLITIK ANTARA GUBERNUR DAN DPRD DKI JAKARTA DALAM PROSES PENETAPAN APBD 2015. *Populis Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 249. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i2.698>
- Kamal, A. (2022). Politik Moderasi Beragama di Indonesia di Era Disrupsi: Menuju Dialog Spiritual-Humanis. *Moderate El Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 1(1), 40. <https://doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v1i1.11035>
- Kamaludin, K. (2022). IDENTIFIKASI MANAJEMEN STRATEGIS PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI ERA DISRUPTIF. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(3), 278. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.50>
- Karhale, Prof. S. (2023). Advancing Counter-Terrorism: The Role of AI and ML in Detecting Online Threats. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 11(11), 1618. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.56855>
- Khainuddin, K., & Huda, M. T. (2022). Interfaith Religious Harmony in Besowo Kediri Landscape. *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, 33(2), 326. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v33i2.2328>

- Khotimah, H. (2017). COLLECTIVE MEMORY “JUM’AT KELABU” DI BANJARMASIN (PERSPEKTIF RESOLUSI KONFLIK ATAS PERISTIWA 23 MAY 1997). *AL-BANJARI Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(2), 75. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v16i2.1486>
- Kingdon, A. (2024). Socio-Technical and Multi-stakeholder Approaches to Countering Online Propaganda. In *Palgrave hate studies* (p. 209). https://doi.org/10.1007/978-3-031-75393-0_8
- Kosim, M., Kustati, M., Sirait, W. R., Fajri, S., Febriani, S. R., Mufti, M., & Perrodin, D. D. (2024). DEVELOPING A RELIGIOUS MODERATION-BASED CURRICULUM MODULE FOR LABORATORY MADRASAH TSANAWIYAH IN ISLAMIC HIGHER EDUCATION. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 350. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i2.39163>
- Kumar, A., & Dwivedi, S. N. (2025). The Role of AI in Social Media Misinformation: Strategies and Impacts. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 13(5), 7084. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.71831>
- Kushardiyanti, D., Khotimah, N. K., & Mutaqin, Z. (2022). SENTIMEN PERCAKAPAN PENGGUNA TWITTER PADA HASHTAG #NONHALAL DALAM TIPOLOGI EKSKLUSIVISME, INKLUSIVISME, PLURALISME DAN TOLERANSI BERAGAMA. *Harmoni*, 21(2), 236. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i2.630>
- Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.24912/jk.v12i1.4045>
- Latifah, N. (2018). Agama, Konflik Sosial dan Kekerasan Politik. *FONDATIA*, 2(2), 154. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i2.131>
- Leliana, I., Irhamdhika, G., Haikal, A., Septian, R., & Kusnadi, E. (2024). ETIKA DALAM ERA DEEPFAKE: BAGAIMANA MENJAGA INTEGRITAS KOMUNIKASI. *Jurnal Visi Komunikasi*, 22(2), 234. <https://doi.org/10.22441/visikom.v22i02.24229>

- Luthfia, N. S., Anggraini, E., & Rakhmawati, N. A. (2025a). *ANALISIS SENTIMEN KOMENTAR INSTAGRAM TERHADAP KASUS GRUP 'FANTASI SEDARAH': STUDI KASUS RESPON PUBLIK*.
- Luthfia, N. S., Anggraini, E., & Rakhmawati, N. A. (2025b). *Analisis-Sentimen-Komentar-Instagram-Terhadap-Kasus-Grup-Fantasi-Sedarah-Studi-Kasus-Respon-Publik.pdf*.
- Ma`arif, M. A., Rofiq, M. H., Kausar, S., Sirojuddin, A., Kartiko, A., & Hasan, Moch. S. (2024). SHAPING STUDENTS' MODERATE ISLAMIC CHARACTER AT MADRASAH. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 323. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i2.34029>
- Mahyudin, Habib, M. A. F., & Sulvinajayanti. (2022). DINAMIKA PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA DALAM PERKEMBANGAN MASYARAKAT DIGITAL. *ASKETIK*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30762/asketik.v6i1.181>
- Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>
- Mardiyah, N. A., Safira, V., & Saefudin, A. (2024). Sosial Media Ruang Belajar: Pemanfaatan Platform Digital, Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 3 Jepara. *Ideguru Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(3), 1251. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i3.913>
- Marpaung, H. W., & Sazali, H. (2025). Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts di Media Sosial. *Jurnal Indonesia Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1439. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1438>
- Masykuri, R., & Ramadlan, M. F. S. (2021). Analisis Manifestasi Segragasi Politik Pelabelan dan Polarisasi di antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 68. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.68-87>
- Masyrullahshomad, M. (2019). MENGOKOHKAN PERSATUAN BANGSA PASCA KONFLIK BERNUANSA AGAMA DI AMBON

- DAN POSO. *ISTORIA Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 15(1).
<https://doi.org/10.21831/istoria.v15i1.24378>
- Messakh, J. J., Boiliu, E. R., Rantung, D. A., & Naibaho, L. (2023). Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Membangun Moderasi Beragama di Era 5.0. *EDUKATIF JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 5(5), 2160.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i5.5678>
- Miarta, W. M. (2024). Voter Behavior and Social Media Influence: A Case Study of Indonesia's 2024 General Election. *Riwayat Educational Journal of History and Humanities*, 7(4), 2592. <https://doi.org/10.24815/jr.v7i4.41632>
- Mubarok, R., & Bakri, M. (2021). MEMBUMIKAN MULTIKULTURALISME SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SIKAP RADIKALISME BERAGAMA. *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(2), 252. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i2.178
- Mufida, S., & Mustolehudin, M. (2020). NEW MEDIA DAN KONFLIK EKSTRIMIS PEREMPUAN INDONESIA. *Jurnal Bimas Islam*, 13(2), 345. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i2.231>
- Mulyono, S. (2015). OPTIMALISASI KEMAMPUAN DETEKSI DINI DAN MITIGASI RISIKO KONFLIK OLEH SATUAN KORAMIL DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA KONFLIK SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH (Studi Di Koramil 05/Pasar Kliwon, Kodim 0735/Surakarta, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(3), 188. <https://doi.org/10.22146/jkn.15669>
- Munandar, E., Pasaribu, Y. M., Dahlan, F., & El-Hussaini, A. (2025). Reconfiguring Rivalry: Ideological Sorting, Digital Media, and the New Landscape of Affective Polarization in Post-2024 General Election. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 8(4), 199. <https://doi.org/10.37275/oaijss.v8i4.294>

- Mupida, S. (2019). MEDIA BARU DAN KONFLIK POLITIK ISLAM DI INDONESIA. *Idarotuna*, 2(1). <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v2i1.8185>
- Mursalat, M., & M, S. A. (2024). ANALISIS GERAKAN MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA DI ERA DIGITAL. *Journal of Religious Policy*, 3(2), 243. <https://doi.org/10.31330/repo.v3i2.78>
- MUSLIMIN, MOH. (2024). INOVASI DAKWAH BERBASIS AI DI ERA 5.0: PERSPEKTIF ISLAM KONTEMPORER. *JNDARISCOMB Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.30739/jdariscomb.v4i1.3316>
- Muyassaroh, M., & Dzulkarnain, I. (2022). Konflik Lahan Pemukiman Pada Tanean Lanjheng. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 11(1). <https://doi.org/10.21107/djs.v11i1.16090>
- Novita, N. N. I. (2023). Penguatan Etika Digital Melalui Materi “Adab Menggunakan Media Sosial” Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Menghadapi Era Society 5.0. *Journal of Education and Learning Sciences*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.56404/jels.v3i1.45>
- Nugroho, N. D. (2023). E-Government dalam Mitigasi Potensi Konflik Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *DIMENSIA Jurnal Kajian Sosiologi*, 12(1), 73. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v12i1.57959>
- Otieno, P. (2024). The Impact of Social Media on Political Polarization. *Journal of Communication*, 4(1), 56. <https://doi.org/10.47941/jcomm.1686>
- Pabbajah, M., Hannani, H., Pabbajah, T. H., & Deraman, D. (2022). Beragama Di Ruang Digital: Pergeseran Orientasi Dari Pemahaman Agama Ke Spirit Beragama. *DIALEKTIKA*, 15(2), 1. <https://doi.org/10.33477/da.v15i2.4028>

- Pamungkas, E. W., Putri, D. G. P., & Fatmawati, A. (2023). Hate Speech Detection in Bahasa Indonesia: Challenges and Opportunities. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(6). <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2023.01406125>
- Peran Algoritma Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu. (2024). *Jurnal Pewarta Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10090>
- Perbawati, C. (2015). DAMPAK POLITIK HUKUM PERTANAHAN YANG BELUM BERPERSPEKTIF HAM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 44(4), 521. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.521-531>
- Permana, I. S., Fardhoni, F., & Juliane, C. (2024). Public Response to the Constitutional Court's Decision on Indonesia's 2024 Elections. *Research Square (Research Square)*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4482093/v1>
- Pernanda, A., & Holid, S. (2024). Pengaruh Karya Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Era Digital. *Journal on Education*, 6(4), 19693. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5790>
- Politik Identitas, Ancaman Demokrasi dan Ketahanan Nasional Jelang Pilpres 2024. (2023). *Jurnal Pewarta Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10075>
- Prasetyo, G., Fauziah, Y. R., & Syafii, A. (2025). From Policy to Pedagogy: Religious Moderation as a Counter-Radicalization Strategy in Islamic Education — A Systematic Literature Review. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 233. <https://doi.org/10.14421/jpi.2025.142.233-251>
- Prasojo, P. (2021). Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perubahan Budaya Politik. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2), 209. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.590>
- Prasojo, Z. H., & Pabbajah, M. (2020). AKOMODASI KULTURAL DALAM RESOLUSI KONFLIK BERNUANSA AGAMA DI

INDONESIA. *Aqlam Journal of Islam and Plurality*, 5(1). <https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131>

- Pratidina, N. D., & Mitha, J. (2023). Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial Masyarakat: Studi Literature. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 810. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3083>
- Prayudi, Susilo, M. E., & Probosari, N. (2025). Social Media Use and 2024 Indonesian General Election. *SHS Web of Conferences*, 212, 4023. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202521204023>
- Prihantoro, M., & Hamidah, A. (2017). *Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah Daerah dalam Menangani Konflik Sosial di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus : Konflik Sosial antara Suku Samawa dengan Suku Bali Tahun 2013)*. 3(2).
- Purnomo, D., Firgiawan, W., & Nur, N. (2025). *Komparasi Algoritma Random Forest, Naïve Bayes, dan SVM pada Sentimen Kebijakan PPN 12%*.
- Purwantoro, S. A., Syahardani, R., Hermawan, E., Kuvaeni, A., & Indarti, I. (2021). Media Sosial: Peran dan Kiprah dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 55. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.416>
- Puspita, T., Setyawan, A., Prayogi, S. F., & Lestari, A. D. (2024). POLITICAL IDENTITY IN THE 2024 ELECTIONS THROUGH SOCIAL MEDIA INSTAGRAM. *International Journal of Social Service and Research*, 4(9). <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i9.867>
- Qodir, Z., Jubba, H., & Hidayati, M. (2022). ISLAMISM AND CONTEMPORARY INDONESIAN ISLAMIC POLITICS. *Jurnal Adabiyah*, 22(1), 160. <https://doi.org/10.24252/jad.v22i1a9>
- Rahman, F. N., & Lestari, S. (2024). Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Pemerintah di Era Kabinet Joko Widodo Berdasarkan Sosial Media X Menggunakan Naïve bayes dan K-Nearest Neighbor (KNN).

- INTECOMS Journal of Information Technology and Computer Science*, 7(5), 1537. <https://doi.org/10.31539/intecom.v7i5.11823>
- Rahmawati, A., Astuti, D. M., Harun, F. H., & Rofiq, M. K. (2023). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN GEN-Z. *J-ABDI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 905. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i5.6495>
- Rahyudidwiputra, Ridhoh, M. Y., Zahrah, F., & Sanur, I. S. (2024). Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Resolusi Konflik Beragama di Ruang Digital. *Antroposen Journal of Social Studies and Humaniora*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v3i1.5693>
- Ramadhan, Moh. F. S., & Wahyudi, T. (2016). Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilu Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional. *Politik Indonesia Indonesian Political Science Review*, 1(2), 136. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6581>
- Rando, R., & Hastuti, H. (2025). Formulation of a model for the dissemination of government policy issues in online media and YouTube in Indonesia. *Frontiers in Communication*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1710197>
- Rantona, S., & Husna, A. (2018). Ketika Agama dan Masyarakat Digital Menjadi Senjata Baru Propaganda Politik. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(2), 347. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.122-09>
- Retnowati, P. (2018). Agama, Konflik dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik. *SANGKÉP Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v1i1.603>
- Revisi, T., Alfi, & Revisi, T. (2023). *PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI SEJARAH*.

- Rianto, P. (2019). LITERASI DIGITAL DAN ETIKA MEDIA SOSIAL DI ERA POST-TRUTH. *Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 24. <https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.24-35>
- Ridho, H., & Sabil, A. (2023). Moderate Dai in the Era of Digitalization; Challenges and Ethics of Preaching on Social-Media According to Islam and Local Wisdom. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 3(2), 185. <https://doi.org/10.24235/sejati.v3i2.64>
- Ridzki, M. M. (2024). *Analyzing the Role of Social Media in Shaping Public Opinion and Public Policy in the Post-Truth Era*. 1(1), 1. <https://doi.org/10.59261/jpia.v1i1.4>
- Rofi'ah, R., Sumardjo, S., Sarwoprasodjo, S., & Lubis, D. P. (2021). Pola Jaringan Komunikasi pada Partisipasi Politik Akar Rumput (Studi Netnografi Media Sosial Twitter pada Aksi Bela Islam). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 25(1), 17. <https://doi.org/10.31445/jskm.2021.3430>
- Rohmatun, L., & Baita, A. (2025). Machine Learning-Based Sentiment Analysis on Twitter (X): A Case Study of the “Kabur Aja Dulu” Issue Using SVM. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 9(4), 1972. <https://doi.org/10.30871/jaic.v9i4.9991>
- Rolando, D. M., As'ad, M., Setiawati, R., & Fajri, F. (2024). Strengthening Religious Literacy as an Effort to Overcome the Moral Degradation of Generation Z in the Digital Era. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i12.15821>
- Rosana, E. (2015). KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern). *Al-Adyan Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), 216. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i2.1430>
- Rosidi, I., & Khotimah, K. (2018). Budaya Populer dalam Politik di Indonesia. *Al-Ulum*, 18(1), 209. <https://doi.org/10.30603/au.v18i1.709>

- Rum, S. N. M., Mohamed, R., & Asfarian, A. (2023). Identifying Political Polarization in Social Media: A Literature Review [Review of *Identifying Political Polarization in Social Media: A Literature Review*]. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 34(1), 80. <https://doi.org/10.37934/araset.34.1.8089>
- Rumata, F. 'Arif, Iqbal, Muh., & Asman, A. (2021). Dakwah digital sebagai sarana peningkatan pemahaman moderasi beragama dikalangan pemuda. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2), 172. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9421>
- Rumata, V. M., Karman, K., & Sastrosubroto, A. S. (2024). *Religion in Urban Politics: Social Media and Its Regulatory Debates in the Aftermath of the 2017 Jakarta Gubernatorial Election* (p. 193). https://doi.org/10.1007/978-981-97-4304-9_13
- Rusanto, I., Aryaputra, M. I., & Triwati, A. (2019). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok: Studi Kasus Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 7(3), 198. <https://doi.org/10.26623/humani.v7i3.1427>
- Ruslan, I., Irham, M. A., & Halim, A. (2023). The 2024 Presidential Election: Contestation of Religious Ideology in Electoral Politics. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14056>
- Sajian, A., & Alif, A. (2025). Struktur dan Konflik Sosial: Perspektif Teori Sosiologi terhadap Polarisasi di Era Media Sosial. *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 4(1), 309. <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i1.1632>
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM CENGKERAMAN POLITIK IDENTITAS: REFLEKSI MENUJU PEMILU SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 2(3), 332. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1052>
- Sapiudin, & Ika. (2025). *THE STRATEGIC ROLE OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION (PAI) IN COUNTERING RADICAL IDEOLOGIES IN THE DIGITAL AGE*. <https://doi.org/10.30868/ei.v14i03.8636>

- Saputra, I., & Firdaus, F. (2023). Penguatan Nasionalisme Millennial Dalam Politik : Studi Kasus Kader Sekolah Penggerak Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Antroposen Journal of Social Studies and Humaniora*, 2(2), 129. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v2i2.5582>
- Saputra, M. N. A., & Mubin, M. N. (2021). URGENSI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM FENOMENA RADIKALISME DI INDONESIA. *SCAFFOLDING Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v3i1.693>
- Saraswati, D., & Anas, M. (2023). STRATEGI RESOLUSI KONFLIK KELOMPOK MINORITAS; Studi Konflik Penutupan Kapel di Dau, Kabupaten Malang. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 121. <https://doi.org/10.14421/jsa.2023.171-08>
- Sari, Y. (2022). Pemanfaatan E- Dakwah Sebagai Media Pengarusutamaan Moderasi Beragama Dalam Situasi Pandemi Covid 19. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(2), 95. <https://doi.org/10.29240/jdk.v7i2.5765>
- Sastrawardana, V. (2024). Nilai Keagamaan dan Moderasi Beragama : Upaya Pencegahan Permasalahan di Media Sosial. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(5), 132. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i5.320>
- Setiawan, V. D., Iswavigra, D. U., & Anggiratih, E. (2025). Implementation of IndoBERT for Sentiment Analysis of the Constitutional Court's Decision Regarding the Minimum Age of Vice Presidential Candidates. *Scientific Journal of Informatics*, 12(3), 397. <https://doi.org/10.15294/sji.v12i3.26320>
- Shoailb, M. R., Wang, Z., Ahvanooey, M. T., & Zhao, J. (2023). *Deepfakes, Misinformation, and Disinformation in the Era of Frontier AI, Generative AI, and Large AI Models*. <https://doi.org/10.1109/icca59364.2023.10401723>

- Simarmata, M. J. S., Rizaldy, F. R., Sihombing, L. Y. L., & Amiruddin, M. (2024). Strategi Lobi dan Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Sosial: Studi Kasus Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Cilegon, Indonesia. *Indonesian Culture and Religion Issues.*, 1(2), 12. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.18>
- Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Moderasi Beragama: Studi Kasus Kemenag Bali, Masjid Ibnu Batutah, dan Desa Pegayaman.* (2024.).
- Singalena, Y. A. (2021). Pemilihan Metode dan Algoritma dalam Analisis Sentimen di Media Sosial : Systematic Literature Review. *Journal of Information Systems and Informatics*, 3(2), 278. <https://doi.org/10.33557/journalisi.v3i2.125>
- Sitorus, H. J., Tanoyo, M., & Irwansyah, I. (2024). Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial Di Instagram: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Indonesia. *JKOMDIS Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4(2), 383. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1675>
- Sohendra, A. (2022). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 IKHTIAR MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 282. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62838>
- Solehudin, Rd. H., Corliana, T., Murod, M., Puteh, A. C. A., Ridwan, W., & Budiarti, E. (2024). NARRATIVE OF IDENTITY POLITICS IN THE 2024 PRESIDENTIAL ELECTIONS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(3). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i3.3462>
- Sonni, A. F. (2025). AI-based disinformation and hate speech amplification: analysis of Indonesia's digital media ecosystem. *Frontiers in Communication*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1603534>

- Sopiyan, W., Hidayat, R., Setiawati, R., & Hadi, F. N. (2022). Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Beragama Sebagai Mediasi Konflik Sosial. *EL-Ghiroh*, 20(2), 219. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v20i02.381>
- Sugitanata, A., & Ridwan, M. (2024). Menuju Keluarga yang Harmonis: Manajemen Konflik Politik dalam Keluarga di Tengah Perbedaan Pilihan Politik. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i1.706>
- Suhendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial. *Iapa Proceedings Conference*, 293. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1059>
- Sukmawati, R., & Fatmawati, F. (2023). Tindak Tutur Ekspresif Warganet dalam Akun Instagram @Kompascom “PKS Deklarasi Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden 2024.” *Jurnal Onoma Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 9(1), 653. <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i1.2557>
- Suprpto, S. (2013). REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL BAGI UPAYA RESOLUSI KONFLIK. *Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1), 19. <https://doi.org/10.21580/ws.21.1.235>
- Suprobowati, G. D. (2021). DCF (Dieng Culture Festival), Wujud Harmonisasi Antara Kearifan Lokal, Agama dan Sosial Ekonomi di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization/Parental: Jurnal Hukum Dan Budidaya*, 9(1), 22. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.51714>
- Susanti, L. E., & Nurmiati, N. (2022). Penanggulangan Dampak Penggunaan Media Sosial Hoax Guna Mewujudkan Kesatuan Bangsa. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(2), 153. <https://doi.org/10.12928/adlp.v2i2.6864>
- Susanto, S., Abra, E. H., & Hadiyanto, A. (2025). Dinamika Politik Identitas Dalam Pemilu 2024: Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1506. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12697>

- Suwardi, S., & Dinata, M. R. K. (2021). PENCEGAHAN KONFLIK MASYARAKAT LOKAL DENGAN PENDATANG BERDASARKAN PRINSIP NEMUI NYIMAH PADA MASYARAKAT LAMPUNG MARGA NUNYAI. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 50(1), 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.1-16>
- Syamsudin, M., & Dewi, S. M. (2024). The Potential Rise of Populism among the Indonesian Muslim Middle Class. Post Covid-19 Pandemic. *UNISCI Journal*, 22(65), 127. <https://doi.org/10.31439/unisci-204>
- Syarif, Z., & Hannan, A. (2020). Islamic Populism Politics and Its Threat to Indonesian Democracy. *Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, 20(2), 251. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i2.2128>
- Takdir, M. (2017). Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Berbasis Sektarian dan Komunal di Indonesia). *Ri Ayah Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.32332/riayah.v2i01.962>
- TARIGAN, D. A., Situmorang, Z., & Rosnelly, R. (2025). Analisis Sentimen Aplikasi Playstore Sirekap 2024 Pasca Pilpres Dengan Perbandingan Metode Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes Classifier Dan Random Forest. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 12(3), 661. <https://doi.org/10.25126/jtiik.20259608>
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2), 134. <https://doi.org/10.21580/jid.v41i2.9364>
- Taufiq, T. T. (2021). KONTRIBUSI FILSAFAT PERDAMAIAN ERIC WEIL BAGI RESOLUSI KONFLIK MASYARAKAT MAJEMUK. *Living Islam Journal of Islamic Discourses*, 4(1). <https://doi.org/10.14421/lijid.v4i1.2780>
- Tinambunan, H. S. R. (2020). MEME: UPAYA REKONSILIASI 4.0 DALAM PEMILIHAN UMUM 2019. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 49(1), 61. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.61-70>

- Trisno, A., Indrawadi, J., Dewi, S. F., & Montessori, M. (2019). Potensi Konflik Sosial Masyarakat Nagari Padang Sibusuk dengan Desa Kampung Baru Pasca Resolusi Konflik. *JUPIIS JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(2), 283. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.14146>
- Tumanggor, T., & Sazali, H. (2025). Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi. *Jurnal Indonesia Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(3), 1657. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i3.1565>
- Ummatin, K. (2020). Demokratisasi Dalam Politik Kepartaian Islam. *POROS ONIM Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v1i1.23>
- Undang, G., & Thamrin, H. (2017). KONFLIK DAN INTEGRASI ISLAM POLITIK. *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15(2), 177. <https://doi.org/10.24014/af.v15i2.4014>
- Vu, N. V., Nazari, M. A., Dang, T., Muralev, Y., Mohanraj, M., Tran, T., & Quoc, H. A. (2025). *Type of the Paper: Article*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5384374>
- Wahyuni, D. (2021). Melampaui Sekularisasi : Meninjau Ulang Peran Agama di Ruang Publik pada Era Disrupsi. *Hanifiya Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 87. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.12699>
- WARDIANA, W. (2025). *KONSOLIDASI DEMOKRASI MENUJU STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN ROUND TABLE DISCUSSION LEMHANAS*.
- Widodo, I. A. (2020). RUNTUHNYA BUDAYA PATRIAKHI: PERUBAHAN PERAN DALAM KELUARGA BURUH MIGRAN. *Marwah Jurnal Perempuan Agama Dan Jender*, 19(1), 65. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i1.8443>
- Wijanarko, M. I., Susanto, L., Pratama, P. A., Idris, I., Hong, T., & Wijaya, D. (2024). *Monitoring Hate Speech in Indonesia: An NLP-based*

- Classification of Social Media Texts*. 142. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-demo.15>
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D. P., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>
- Wulandari, C. D. (2023). Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Avant Garde*, 11(1), 134. <https://doi.org/10.36080/ag.v11i1.2380>
- Yasin, A., & Rahmadian, M. I. (2024). Strategi Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Pluralisme Agama di Masyarakat Multikultural. *Aksiologi Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i1.208>
- Yuliatwati, E., & Asri, I. (2024). Religious Moderation: An Analysis of Understanding, Internet and Social Media Exposure and Social Interaction Systems. *Jurnal The Messenger*, 14(2), 158. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v14i2.2812>
- Yuliyanto, Y. (2017). PERANAN HUKUM ADAT MASYARAKAT DAYAK DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan dan Kedamaian. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.134>
- Zulfikar, E., Apriyanti, A., & Halimatussadiyah, H. (2023). Gagasan Instagram Mubadalah.id dalam Mewujudkan Islam Moderat di Indonesia. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat Religi Dan Tradisi)*, 9(1), 15. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1816>



Manajemen Konflik Sosial

Isu Polarisasi Politik dan Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, telah merevolusi pola interaksi sosial masyarakat secara mendasar. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga menjadi arena pembentukan opini publik serta ruang kontestasi politik yang sangat dinamis. Di satu sisi, media sosial membuka peluang bagi demokratisasi informasi; di sisi lain, ia juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga memperuncing perbedaan pandangan yang berujung pada polarisasi sosial dan politik. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan konflik sosial di era digital.

Buku referensi ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika polarisasi politik, peran media sosial, serta strategi manajemen konflik sosial yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Penulis berupaya menyajikan analisis berdasarkan kerangka ilmiah yang mutakhir, memadukan teori-teori klasik dengan temuan empiris terbaru. Pembahasan dalam buku ini meliputi konsep dasar konflik sosial, pola polarisasi politik, peran dan dampak media sosial, serta pendekatan strategis dalam pengelolaan konflik.

Penyusunan buku ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah terkini, dengan menekankan kejelasan argumentasi, sistematika pembahasan yang terstruktur, serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai perkembangan kebahasaan. Data dan referensi yang digunakan berasal dari sumber-sumber kredibel dan telah melalui proses seleksi serta verifikasi yang ketat, guna memastikan validitas dan relevansi informasi yang disajikan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu-isu sosial, politik, dan komunikasi. Melalui buku ini, diharapkan pembaca mampu memahami akar permasalahan polarisasi politik yang dipicu oleh media sosial, serta memperoleh wawasan mengenai strategi efektif dalam menangani dan meminimalisasi konflik sosial di lingkungan sekitar.

litnus.

Penerbit



litrasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara_

085755971589

Pendidikan

+17

ISBN 978-623-127-662-9



9 786231 276629